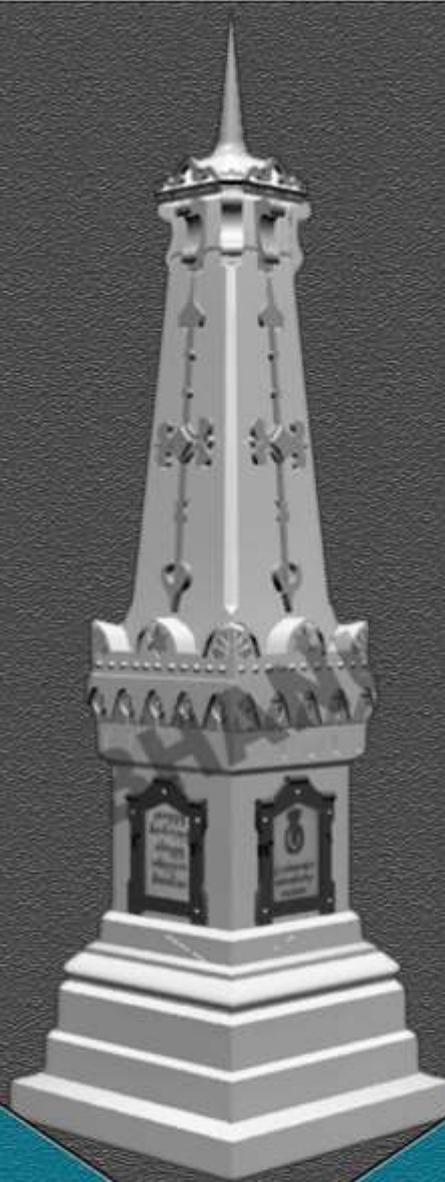




BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAPORAN AKHIR

**ANALISIS**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**2015-2019**

KERJA SAMA  
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH BAPPEDA  
DAN BADAN PUSAT STATISTIK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2020





**LAPORAN AKHIR**

**ANALISIS  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2015-2019**

**KERJA SAMA  
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH BAPPEDA  
DAN BADAN PUSAT STATISTIK  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2020**



## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi di bawah negara, dengan definisi yang sama namun wilayah penghitungannya disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. PDB/PDRB PDRB dihitung dinilai dalam satuan moneter.

Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2020” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu 2015 hingga triwulan I-2020. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antarprovinsi di Pulau Jawa dan juga antarwilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis indeks turunan dalam publikasi ini, diantaranya: struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks perkembangan. Sementara analisis lintas sektor dilakukan dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan beberapa indikator makro ekonomi dan indikator sosial ekonomi lainnya, seperti: inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan. Identifikasi potensi ekonomi kabupaten/kota dilakukan untuk mendukung rekomendasi kebijakan. Publikasi ini juga mencakup kesimpulan analisis dan rumusan rekomendasi kebijakan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan tindaklanjut perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah di masa mendatang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, Agustus 2020

Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala,

**Dr. Heru Margono, M.Sc.**



## KATA SAMBUTAN

Perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan data dan indikator statistik sebagai evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan di daerah. RPJMD dan RKPD juga merumuskan indikator-indikator ekonomi dan sosial sebagai tolok ukur pencapaian target dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang.

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2020”, sebagai produk kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPSD-BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini menjadi salah satu bahan untuk menyusun kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan analisis PDRB dan indikator turunannya maka dapat diidentifikasi potensi perekonomian daerah. Lebih lanjut melalui analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antardaerah serta capaian pembangunan manusia diharapkan kesimpulan dari analisis dapat menjadi acuan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerjanya. Hasil analisis ini juga dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Konteks sosial ekonomi DIY yang unik, yang tercermin dari dua sisi hasil pembangunan yang berselisih, karena meskipun sebagian besar indikator-indikator mencerminkan prestasi yang membanggakan namun masih terdapat indikator yang memotret hasil pembangunan yang masih kurang memuaskan. Namun semua perlu disikapi dengan bijak bahwa pembangunan di DIY masih memerlukan kerja keras untuk memperbaiki format perencanaan dan implementasinya di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerja sama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen yang bermanfaat untuk evaluasi dan rumusan perencanaan pembangunan. Dampak lain dari hasil analisis ini adalah bermanfaat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala,

**Drs. Beny Suharsono, MM.**



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Sambutan .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Dasar Pelaksanaan.....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	6
1. Maksud .....	6
2. Tujuan .....	6
D. Sasaran .....	7
E. Manfaat.....	7
F. Lokasi Kegiatan .....	7
G. Sumber Pendanaan .....	7
H. Tenaga Ahli dan Pendukung.....	7
I. Rencana Kerja .....	7
J. Lingkup Pekerjaan .....	8
<b>II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pembangunan .....	11
1. Konsepsi Pembangunan .....	11
2. Pembangunan Ekonomi .....	12
3. Pembangunan Kewilayahan .....	13
4. Pembangunan Manusia .....	14
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	16
1. Definisi PDRB .....	16
2. Pendekatan Penghitungan.....	16
3. Metode Penghitungan .....	17
4. Turunan PDRB .....	19
5. PDRB menurut Lapangan Usaha .....	20

6. PDRB menurut Pengeluaran .....	21
7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008 .....	23
C. Indikator Utama Pembangunan DIY .....	24
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	24
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi .....	27
3. Ketimpangan (Disparitas).....	27
4. Kemiskinan .....	34
D. Ketenagakerjaan dan Pengangguran .....	35
1. Ketenagakerjaan .....	37
2. Pengangguran .....	40
<b>III METODOLOGI.....</b>	<b>41</b>
A. Sumber Data .....	43
B. Kerangka Pikir Analisis .....	43
C. Indikator Penyajian PDRB .....	44
1. Distribusi Persentase.....	44
2. PDRB per Kapita .....	44
3. Indeks Perkembangan .....	44
4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan) .....	44
5. Indeks Harga Implisit .....	45
6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen) ..	45
D. Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY .....	45
1. Pertumbuhan, Rata-rata Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Ekonomi	45
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi/Deflasi .....	48
3. Indikator Ketenagakerjaan dan Pengangguran .....	49
4. Indikator Kemiskinan .....	53
5. Indikator Ketimpangan (Disparitas) .....	56
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	61
<b>IV. PDRB Menurut Lapangan Usaha .....</b>	<b>65</b>
A. Struktur Perekonomian PDRB .....	67
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan .....	71
1. Pertumbuhan menurut Kategori .....	71
2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota .....	75

C. PDRB Per Kapita .....	76
D. Indeks Perkembangan Kategori .....	77
E. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/Kota.....	79
F. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi .....	83
<b>V. PDRB Menurut Pengeluaran .....</b>	<b>87</b>
A. Struktur PDRB Pengeluaran .....	89
1. Konsumsi Rumah Tangga .....	89
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga .....	93
3. Konsumsi Pemerintah .....	93
4. Investasi .....	94
5. Ekspor dan Impor .....	96
B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran .....	98
<b>VI. Analisis Indikator Utama Pembangunan DIY .....</b>	<b>101</b>
A. Pertumbuhan Ekonomi .....	103
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	103
2. Sebaran Pertumbuhan Ekonomi .....	106
B. Stabilitas Harga .....	109
1. Perbandingan Laju Inflasi Yogyakarta dan Nasional .....	109
2. Andil Inflasi Kelompok dan Subkelompok Konsumsi .....	112
3. Perubahan Harga dan Andil Inflasi Terbesar Beberapa Komoditas terhadap Inflasi Yogyakarta .....	113
C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran .....	115
1. Angka Beban Tanggungan ( <i>Dependency Ratio/DR</i> ) .....	115
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	117
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	119
4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) .....	121
5. Produktivitas Tenaga Kerja .....	122
6. Pengurangan Angka Pengangguran .....	125
7. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran .....	125
D. Kemiskinan dan Ketimpangan .....	127
1. Perkembangan Kemiskinan .....	128

2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	131
E. Pertumbuhan dan Disparitas Ekonomi Kabupaten/Kota .....	134
1. Sebaran Pertumbuhan .....	134
2. Sektor Ekonomi Potensial di Kabupaten/Kota .....	136
3. Indeks Ketimpangan Regional .....	139
4. Disparitas Sektoral (Shift Share Analysis) .....	139
F. Pembangunan Manusia .....	146
1. Perkembangan dan Posisi Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta .....	147
2. Kualitas Hidup .....	148
3. Kualitas Pengetahuan .....	149
4. Standar Hidup Layak .....	149
5. Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	150
<b>VII. Perekonomian diy di Tengah Pandemi COVID-19 .....</b>	<b>153</b>
A. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Triwulan I dan II 2020 ( <i>y-on-y</i> ) .....	155
B. Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Triwulan I dan II 2020 ( <i>y-on-y</i> ) .....	159
C. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Semester I 2020 .....	161
D. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Saat COVID-19 dan Saat Kondisi Normal .....	162
E. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Saat COVID-19 dan Saat Kondisi Normal .....	164
<b>VIII. Kesimpulan .....</b>	<b>167</b>
A. Kesimpulan .....	169
B. Rekomendasi .....	171
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>173</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>177</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1.	Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2015 – 2019 .....	68
Tabel 4.2.	Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2019 di DIY (persen), 2015-2019 .....	72
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2019 di DIY (persen), 2015-2019 .....	75
Tabel 4.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita DIY, 2015-2019 .....	77
Tabel 4.5.	Indeks Perkembangan PDRB DIY menurut Kategori, 2015-2019 (2010=100) .....	78
Tabel 4.6.	Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2015–2019 .....	79
Tabel 4.7.	Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2019**) .....	81
Tabel 4.8.	Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di DIY (persen), 2017 – 2019 .....	82
Tabel 4.9.	Nilai PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2015-2019 .....	83
Tabel 4.10.	Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2019 .....	84
Tabel 5.1.	Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2015–2019 .....	90
Tabel 5.2.	Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2015–2019 .....	91
Tabel 5.2.	Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015 – 2019 ...	92
Tabel 5.3.	Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2015–2019	92
Tabel 5.4.	Perkembangan dan Struktur Konsumsi LNPRT DIY, 2015-2019 .....	93
Tabel 5.5.	Perkembangan dan Struktur Konsumsi Pemerintah DIY, 2015-2019 .	94
Tabel 5.6.	Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2015–2019 .....	96
Tabel 5.7.	Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015–2019	100

## Daftar Isi

---

Tabel 6.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2019 (Persen).....	107
Tabel 6.2.	Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019 (Persen) .....	111
Tabel 6.3.	IHK, Inflasi, dan Andil Per Kelompok dan Subkelompok Kota Yogyakarta (2012=100), 2019 .....	112
Tabel 6.4.	Perubahan Harga dan Andil 10 Besar Barang Terhadap Inflasi Kota Yogyakarta 2019 .....	115
Tabel 6.5.	TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2019 *) .....	120
Tabel 6.6.	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY (persen), 2015-2019 .....	121
Tabel 6.7.	Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2015–2019 .....	122
Tabel 6.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di DIY (persen), 2015-2019 .....	127
Tabel 6.9.	Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2015 – 2019 .....	134
Tabel 6.10.	Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2019 (Persen) .....	136
Tabel 6.11.	Indeks LQ Tahun 2019 dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Analisis (RPa) 2015-2019 menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	137
Tabel 6.12.	Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010-2019 .	141
Tabel 6.13.	Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010–2019	142
Tabel 6.14.	Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010–2019 ....	144
Tabel 6.15.	Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2010-2019 .....	145
Tabel 6.16.	Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015-2019.....	146
Tabel 6.17.	Indeks Pembangunan Manusia DIY menurut Komponen, 2015-2019	148
Tabel 6.18.	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018-2019	151
Tabel 7.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral DIY Triwulanan I dan II 2020 .....	163
Tabel 7.2.	Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran DIY Triwulanan I dan II 2020 ....	164

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan DIY, 2011-2018 (persen) .....	3
Gambar 1.2.	Perkembangan Laju Inflasi Nasional dan Kota Yogyakarta, 2011-2019 (persen).....	3
Gambar 3.1.	Kerangka Pikir Analisis .....	43
Gambar 3.2.	Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita .....	48
Gambar 3.3.	Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja .....	51
Gambar 3.4.	Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan .....	55
Gambar 3.5.	Kurva Lorenz .....	57
Gambar 4.1.	Produk Domestik Regional Bruto DIY, 2015-2019 (triliun rupiah).....	67
Gambar 4.2.	Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor, 2015- 2019 (persen) .....	70
Gambar 4.3.	Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2019 .....	73
Gambar 4.4.	Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019 .....	74
Gambar 4.5.	Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah), 2015 – 2019 .....	80
Gambar 5.1.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2015-2019 (persen) .....	91
Gambar 5.2.	Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di DIY, 2019 .....	99
Gambar 6.1.	Pertumbuhan Kategori-Kategori dengan Pangsa Terbesar dalam PDRB DIY, 2015-2019 (persen) .....	104
Gambar 6.2.	Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2015-2019 (persen) .....	105
Gambar 6.3.	Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015 .....	108
Gambar 6.4.	Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2019 .....	108
Gambar 6.5.	Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional, 2008 – 2019 (persen) .....	110
Gambar 6.6.	Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional 2019 (persen) .....	111

Gambar 6.7.	Komoditas Utama Penyumbang dan Penahan Inflasi Kota Yogyakarta 2019 .....	114
Gambar 6.8.	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten/Kota dan DIY, 2010-2019 .....	117
Gambar 6.9.	Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah (persen), 2015-2019 .....	118
Gambar 6.10.	TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2015-2019 .....	119
Gambar 6.11.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2015 .....	124
Gambar 6.12.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2019 .....	124
Gambar 6.13.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY (persen), 2015-2019 .....	126
Gambar 6.14.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2015 – 2019 .....	129
Gambar 6.15.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di DIY, 2015 – 2019 .....	131
Gambar 6.16.	Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas Maret 2019 .....	132
Gambar 6.17.	Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2015–2019 (persen).....	133
Gambar 6.18.	Perbandingan Distribusi Andil PDRB Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2019	135
Gambar 6.19.	Scatterplot Indeks LQ 2019 dan Rasio Pertumbuhan 2015-2019 menurut Kategori Usaha dan Kabupaten/Kota di DIY .....	138
Gambar 6.20.	Indeks Williamson DIY, 2010-2019 .....	139
Gambar 6.21.	Perkembangan Capaian IPM DIY dan Indonesia, 2010-2019 .....	148
Gambar 7.1.	Pertumbuhan Tertinggi/Terendah Lapangan Usaha, Triwulan I-2020 (persen) .....	156
Gambar 7.2.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi DI.Yogyakarta Tahun 2018-2020 Menurut Lapangan Usaha (Persen) .....	157
Gambar 7.3.	Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2020 .....	158
Gambar 7.4.	Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulanan 2015-2020 (y-on-y) .....	159
Gambar 7.5.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi D. I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2020 menurut Pengeluaran (Persen) .....	160

Gambar 7.6.	Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Triwulan II – 2020 (y-on-y) .....	161
Gambar 7.7.	Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulanan 2015-2020 (y-on-y) .....	162



**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Manfaat
- F. Lokasi Kegiatan
- G. Sumber Pendanaan
- H. Tenaga Ahli Pendukung
- I. Rencana Kerja
- J. Lingkup Pekerjaan





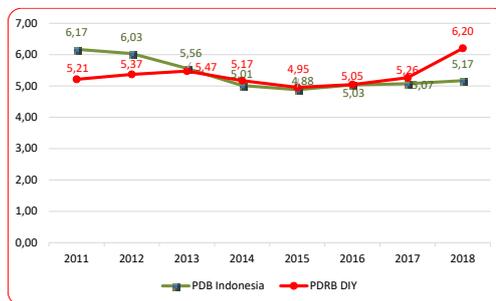
# BAB I

## PENDAHULUAN

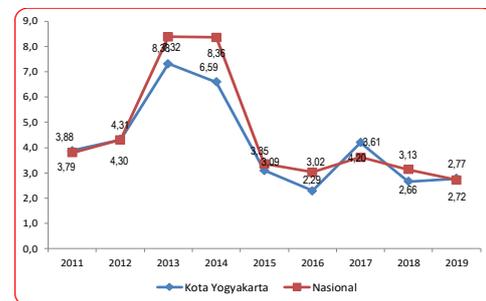
### A. Latar Belakang

Kinerja pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) direpresentasikan dengan pertumbuhan ekonomi. Menjelang satu dasa warsa terakhir, laju perekonomian ekonomi mengalami fluktuasi. Krisis global yang dialami selama 2013-2014 memberikan dampak pada kinerja perekonomian DIY karena memang salah satu andalannya adalah beberapa kegiatan ekonomi pendukung pariwisata dan wisatawan andalannya adalah wisatawan mancanegara. Beruntungnya krisis tersebut segera dapat teratasi sehingga mulai 2015 laju perekonomian merangkak naik lagi (Gambar 1). Pertumbuhan ekonomi DIY melejit di tahun 2018 yang disebabkan adanya pembangunan mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta (*Yogyakarta International Airport - YIA*) dan juga beberapa fasilitas infrastruktur lainnya seperti kelanjutan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), *underpass* bandara YIA, *underpass* Kentungan, dan lainnya.

Gambar 1.1.  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan  
DIY, 2011-2018 (persen)



Gambar 1.2.  
Perkembangan Laju Inflasi Nasional dan  
Kota Yogyakarta, 2011-2019 (persen)



Indikator makro ekonomi yang biasa didampingkan dengan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat atau inflasi harga atau biasa disebut inflasi saja. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi mempunyai keterkaitan erat karena tingkat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang dan jasa. Demikian pula perekonomian yang kondusif akan menjaga daya beli masyarakat sehingga laju inflasi terkendali dengan baik. Ketersediaan atau distribusi barang/jasa mempengaruhi perubahan harga, di samping juga karakteristik pola konsumsi masyarakat. Perkembangan perubahan harga konsumen atau inflasi selain menjadi tolok ukur stabilitas harga-harga barang dan jasa juga berpengaruh besar pada perubahan aktivitas berbagai bidang sektor ekonomi.

Fenomena perubahan harga barang dan jasa di tingkat konsumen di DIY direpresentasikan oleh inflasi Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 2011-2019 inflasi Yogyakarta mengalami fluktuasi. Periode 2011-2014 inflasi bergerak terus meningkat, dan

pada saat krisis global 2013-2014 posisinya sudah mengkhawatirkan karena inflasi bertengger di atas 8 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perubahan kenaikan harga barang/jasa cukup tinggi, juga adanya hambatan pada jalur distribusi, serta adanya ketidakseimbangan antara produksi dengan besarnya permintaan barang dan jasa.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi antara lain adalah mengendalikan harga-harga sehingga daya beli berangsur membaik. Selain itu untuk mendorong dan menjaga daya beli masyarakat sektor-sektor produksi didorong untuk menjamin ketersediaan kebutuhan barang dan jasa. Adanya peningkatan produksi mendorong permintaan jumlah pekerja atau jam kerja sehingga akan mendorong peningkatan balas jasa (upah pekerja). Oleh karena adanya peningkatan balas jasa pekerja maka akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan grafik 1 dan grafik 2 bisa dijelaskan bahwa perubahan harga-harga akan bergerak lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015 penurunan perubahan harga-harga langsung dirasakan oleh masyarakat, yang terlihat dari turunnya angka inflasi dari semula di atas 8 persen menjadi di bawah 4 persen. Namun demikian pemulihan ekonomi belum langsung berdampak menggerakkan sektor-sektor perekonomian di tahun itu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih tertahan di bawah 5 persen. Di tahun berikutnya sektor-sektor ekonomi mulai menggeliat lagi dan laju pertumbuhan ekonomi merangkak naik di atas 5 persen.

Kinerja perekonomian secara makro membaik bila pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah menguat. Inflasi terkendali artinya perubahan harga wajar tidak turun tajam dan tidak naik drastis. Inflasi yang terus menurun atau bahkan menjadi deflasi dalam kurun waktu yang berkelanjutan mencerminkan perekonomian yang tidak kondusif karena bisa jadi kondisi ekonomi sedang lesu dan geliat ekonomi sangat lemah. Sebaliknya, inflasi yang bergerak naik terus perlu diwaspadai karena menunjukkan tidak seimbangnya tingginya permintaan dengan persediaan jumlah barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi disebabkan di antaranya meningkatnya permintaan atau daya beli masyarakat, meningkatnya likuiditas atau uang beredar, meningkatnya biaya produksi barang atau jasa, adanya perilaku spekulasi, dan bisa juga karena adanya kekacauan ekonomi dan politik di suatu negara.

Disandingkan dengan angka nasional, inflasi di Kota Yogyakarta secara rata-rata lebih rendah. Demikian pula dilihat fluktuasinya, inflasi Kota Yogyakarta rendah. Meskipun demikian di tahun 2016 menurut para pengamat ekonomi sedikit meresahkan karena terus melambat sehingga dapat mengancam aktivitas ekonomi. Meskipun di tahun 2017 laju inflasi sempat naik di atas 4 persen, namun di dua tahun terakhir cenderung lebih rendah bahkan berada di bawah 3 persen di tahun 2019. Ada dua makna yang bisa dipahami dari kondisi ini. Pertama, rendahnya laju inflasi mencerminkan terkendalinya gejolak harga-harga barang dan jasa. Kedua, kondisi inflasi yang relatif rendah bisa mengindikasikan geliat ekonomi yang kurang menggairahkan. Alangkah baiknya kalau laju inflasi bisa bergerak di antara 3-4 persen. Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral

Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI), berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.

Pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyejahterakan penduduknya. Untuk itu agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas maka harus ada peningkatan pemerataan distribusi pendapatan kepada penduduknya. Rasio gini merupakan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan penduduk. Rasio gini DIY tergolong tertinggi dibanding dengan provinsi-provinsi di Indonesia, meskipun masih di level moderat. Pada September 2017 rasio gini DIY sebesar 0,44, merupakan tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan rasio gini DIY selama periode 2010-2018 nilainya bertengger di sekitar angka 0,42 hingga 0,44 dengan tren perkembangan cenderung meningkat. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk tergolong tinggi. Dengan demikian permasalahan distribusi pendapatan masih menjadi masalah yang serius bagi pembangunan ekonomi di DIY.

Secara spasial, kondisi perekonomian wilayah di kelima kabupaten/kota DIY memang beragam. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tumbuh sebagai daerah perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana ekonomi serta ragam sektor yang lengkap dibanding tiga kabupaten lainnya, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Oleh karena itu sangat tepat bila landasan tonggak pembangunan masa depan bergeser dengan menempatkan megaprojek di ketiga wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah yang hingga tahun 2016 masih terlihat tinggi meskipun masih dalam skala ketimpangan sedang. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di DIY yang menggunakan ukuran Indeks Williamson perkembangannya cenderung menurun dari 0,476 tahun 2011 menjadi 0,466 di tahun 2016. Untuk itu pengurangan ketimpangan wilayah juga seharusnya menjadi prioritas penanganan permasalahan dalam pembangunan ekonomi di DIY.

Meskipun perkembangan persentase kemiskinan dari tahun ke tahun sudah menunjukkan adanya tren menurun namun masih dalam kelompok provinsi dengan kemiskinan yang tinggi. Terlebih di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa persentase penduduk miskin DIY masih yang tertinggi. Untuk itu masih perlu menggali informasi yang lebih akurat sehingga selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan indikator-indikator makro ekonomi-sosial seperti yang disebut di atas, dipandang perlu untuk menganalisis potensi ekonomi DIY. Melalui optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, Analisis PDRB diharapkan memberikan manfaat untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di DIY. Selain itu, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dalam analisis PDRB diharapkan searah dengan kerangka penyusunan perencanaan dan mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 serta teraplikasi dalam pelaksanaan pembangunan tahunan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 008 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola;
11. Peraturan Kepala BPS Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2020 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di DIY.

#### 2. Tujuan

1. Tujuan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2020 adalah:
2. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi DIY 2015-2019 berdasarkan PDRB tahun dasar 2010
3. Menyediakan angka pertumbuhan ekonomi dan indeks turunan PDRB DIY lainnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIY periode 2015-2019;
4. Menyediakan analisis pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan capaian indikator makro ekonomi lainnya;

5. Menyediakan hasil analisis sektoral PDRB DIY dan antar wilayah kabupaten/kota periode 2015-2019;
6. Menyediakan kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan akurasi perencanaan serta validitas implementasi program pembangunan.

#### **D. Sasaran**

Data PDRB DIY tahun 2015-2020 (triwulan I-2020) menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan dilengkapi data pendukung lain yang terkait, serta indikator ekonomi sosial lainnya.

#### **E. Manfaat**

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB DIY 2015–2020 (triwulan I-2020) adalah sebagai bahan evaluasi perencanaan dan implementasi program pembangunan. Selain itu rekomendasi menjadi bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah termasuk di kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta ke depan.

#### **F. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **G. Sumber Pendanaan**

Pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2020 ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 162.500.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### **H. Tenaga Ahli dan Pendukung**

Personil Tenaga Ahli yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Tenaga Ahli Madya bidang Ekonomi Pembangunan 2 orang
2. Tenaga Ahli Muda bidang Statistik 3 orang
3. Tenaga Administrasi 2 orang
4. Tenaga Kompilator Data 4 orang
5. Tenaga Entry Data 2 orang

#### **I. Rencana Kerja**

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Analisis PDRB DIY 2015-2020, urutannya sebagai berikut:

1. Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
2. Penyusunan metodologi pengumpulan data dan analisis;
3. Pengumpulan data sekunder;
4. Kompilasi dan pengolahan data;
5. Penghitungan indikator;
6. Analisis dan penyajian;

7. Penyerahan *draft* publikasi.

### J. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan penyusunan Analisis PDRB DIY 2014-2018 Tahun Anggaran 2019, meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY 2015-2019 menurut lapangan usaha dan penggunaan;
2. Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta peranan masing-masing kategori dan subkategori (kelompok) lapangan usaha;
3. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi DIY menurut lapangan usaha dan juga penggunaan;
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kabupaten/kota di DIY;
5. Menganalisis kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan di perkotaan dan perdesaan;
6. Menganalisis kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota;
7. Menganalisis hubungan pengeluaran perkapita dan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di kabupaten/kota;
8. Menganalisis tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk di DIY, wilayah perkotaan dan pedesaan, pengangguran menurut tingkat Pendidikan, dan pengangguran menurut kelompok usia;
9. Menganalisis tingkat pengangguran untuk memperoleh gambaran peluang kesempatan kerja dan potensi serta daya saing angkatan kerja; dan
10. Menganalisis potensi ekonomi unggulan di level kabupaten/kota.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pembangunan
- B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- C. Kualitas Pertumbuhan
- D. Ketenagakerjaan dan Pengangguran





## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pembangunan

#### 1. Konsepsi Pembangunan

Konsep pembangunan di tahun 1970-an yang cukup populer adalah yang didefinisikan oleh Portes (1976), yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Situasi lingkungan juga mempengaruhi konsepsi pembangunan yang muncul. Di era tahun 1990-an, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Konsepsi mengenai pembangunan juga dikemukakan Alexander (1994), yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Konsepsi pembangunan yang lebih baru dikemukakan oleh Tikson (2005), yaitu pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Menurut Rogers (1995) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

### 2. Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith (1723-1790) pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sementara menurut Prof. Meier pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Ahli ekonomi yang lain, Schumpeter, berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional dimana proses tersebut terjadi secara spontan dan tidak terputus-putus.

Irawan (2002) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Sukirno (1999) menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi adalah upaya atau usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan melakukan penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi, dan meningkatkan standar manajemen.

Merujuk pada konsepsi yang dibuat oleh Wikipedia, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

### **3. Pembangunan Kewilayahan**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi lain dari kedua UU tersebut yaitu adanya bagian pemberian kewenangan urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Hoover dan Fisher (Ridwan, 2016) menyebutkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi regional, meliputi: pertama, ekonomi subsisten. Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-sehari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan pengumpulan hasil-hasil alamnya.

Kedua, pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal. Pada tahap kedua ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasi-lokasi tertentu. Di kalangan masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.

Ketiga, perdagangan antardaerah. Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan dari arah produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi. Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.

Keempat, industrialisasi. Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi dari peningkatan produksi pertanian dan produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja yaitu melalui industrialisasi yang lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri-industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

Kelima, spesialisasi daerah. Dalam tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa-jasa untuk keperluan penjualan ke daerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

Keenam, aliran faktor produksi antardaerah. Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antardaerah.

Di awal era otonomi daerah, permasalahan pokok pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Bila dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan kurang akurat maka permasalahan ini berlarut-larut dan menyebabkan kemajuan perekonomian daerah berjalan di tempat. Energi sumber daya dan pembiayaan pembangunan yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk implementasi lanjut bagi pengembangan potensi daerah masih berkutat untuk menentukan skala prioritas kebijakan.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

#### **4. Pembangunan Manusia**

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

*United Nations Development Programme* dalam terbitan laporan tahunannya (*Human Development Index – HDI*) menegaskan bahwa “manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat *Gross National Income* - GNI per kapita yang sama dapat menghasilkan hitungan pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (*Human Development Reports, 2019*).

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

Pembangunan manusia dimaknai sebagai proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Badan Pusat Statistik mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator komposit untuk mengukur capaian atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas kehidupan manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ukuran IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi yang terakhir dilakukan pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* mulai tahun 2010.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. Pengukuran IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

- **Umur panjang dan hidup sehat** (*a long and healthy life*)

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk pada saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat.

- **Pengetahuan** (*knowledge*)

Dimensi pengetahuan dalam IPM dibentuk oleh dua indikator pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan variabel stok atau akumulasi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas).

- **Standar hidup layak** (*decent standard of living*)

Dimensi ketiga yang terangkum dalam ukuran IPM adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli penduduk (harga konstan 2012).

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

### **B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

#### **1. Definisi PDRB**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

#### **2. Pendekatan Penghitungan**

##### **a. Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Pengangkutan dan Pergudangan; ; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

**b. Pendekatan Pengeluaran**

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

**c. Pendekatan Pendapatan**

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

**Angka PDRB** hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

**3. Metode Penghitungan****a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku**

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

**b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan**

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

**Revaluasi**

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun

2010. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

### **Ekstrapolasi**

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

### **Deflasi**

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

### **Deflasi Berganda**

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

#### 4. Turunan PDRB

##### a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

##### b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

##### c. PDRN atas dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

##### d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil). Data penduduk yang digunakan adalah hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota berdasarkan SP2010. Data PDRB per kapita menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada setiap penduduk wilayah tersebut. Namun PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah.

Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

##### e. Indeks Perkembangan Kategori

Indeks perkembangan merupakan gambaran perkembangan nilai tambah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks perkembangan sektoral dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sektor-sektor mana yang berkembang cepat, lambat

atau bahkan menurun sejak tahun dasar (2010). Selanjutnya, dengan menelusuri besaran indeks ini akan dapat diketahui sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Supaya hasilnya dapat dibandingkan secara nasional, analisis makro ekonomi suatu daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa indikator analisis perekonomian nasional. Namun tidak semua analisis perekonomian nasional dapat diterapkan secara mutlak di tingkat regional, sehingga perlu dipahami perbedaan prinsipnya. Satu contoh yang secara nyata membedakan *region* dengan *nation* adalah bahwa *region* tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana *nation*. Hal ini menyebabkan adanya **keterbukaan hubungan antar-region**, sehingga arus barang dan jasa antardaerah sangat bebas, tidak seperti *nation* di mana arus barang dan jasa dari dan ke luar negeri harus melalui pihak bea dan cukai. Keterbukaan antar-*region* ini menyebabkan teori ekonomi tertutup sangat sulit diterapkan pada tingkat regional. Di satu sisi, keterbukaan antar-*region* memungkinkan hubungan spasial yang sangat kuat antar *region*. Adanya hubungan spasial tersebut menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif. Korelasi spasial tersebut sebenarnya dapat lebih akurat bila dilihat dari hasil analisis *spillover effect*, namun analisis tersebut tidak dilakukan dalam analisis PDRB ini.

Semenjak era otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota memiliki hak untuk mengatur sendiri kebijakan fiskal sekaligus menentukan arah pembangunannya. Sehingga perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing pembuat kebijakan (*decision maker*).

### 5. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer**. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan

sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

## **6. PDRB menurut Pengeluaran**

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

### **a. Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Provinsi DIY. Sementara untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Provinsi DIY.

### **b. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)**

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

### **c. Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran

konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah dan tidak termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

### **d. Investasi**

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan, dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (17 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Perkiraan nilai PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/ bangunan. Sementara perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga konstan tahun 2010 diperoleh dengan cara mendeflate/ membagi nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga berlaku dengan IHPB barang impor, dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau. Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda DIY.

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/ stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

### e. Ekspor dan Impor

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

### 7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008

Selama satu dekade terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan regional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar tersebut dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008 System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Table* (SUT).

Implikasi dari perubahan harga tahun dasar memberikan dampak, antara lain: meningkatkan nominal PDB/PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi, dan pergeseran struktur perekonomian. Dampak lain adalah merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi, dan juga berdampak pada perubahan input data untuk *modelling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut: secara umum perekonomian Indonesia relatif stabil; selama 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan indeks harga produsen (*producer price index/PPI*); dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB/PDRB.

### C. Indikator Utama Pembangunan DIY

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah terlalu bermakna. Namun meraih keduanya secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Para ekonom pun punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Mengorbankan pemerataan seringkali diperlukan guna meraih pertumbuhan, kata para ekonom penganut aliran *capital fundamentalism*. Pertumbuhan hanya bisa berlangsung ketika ketimpangan justru eksis dalam masyarakat, terutama pada fase awal pembangunan, kata ekonom Simon Kuznets, 60 tahun lampau.

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow (1916-1979) yang juga diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru telah menimbulkan permasalahan kesenjangan distribusi pendapatan yang menganga. Di samping itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung terjadinya krisis ekonomi dan sosial di tahun 1998.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (*stagnasi*). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1999), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2015) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

*Asian Development Bank* (ADB, 2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang oleh tiga pilar, yaitu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim. Pertumbuhan merupakan syarat penting bagi terciptanya pertumbuhan inklusif. Klasen (ADB, 2010) menyatakan bahwa penting untuk menentukan episode ekonomi seperti apa yang memiliki karakteristik sebagai pertumbuhan yang inklusif. Ada dua kemungkinan untuk hal tersebut, yang pertama melihat melalui proses. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antar sektor atau intensif terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Fokus kedua yaitu pada hasil dari proses pertumbuhan. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Berdasarkan kedua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antar kelompok).

Sementara *World Economic Forum* (WEF, 2017) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Pada ajang penutupan *Indonesia Development Forum* (IDF) 2018, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan saat ini masih belum ada konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional, karena menurutnya konsep yang dipakai ADB maupun WEF belum mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik karena tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan (jender, wilayah, dan pendapatan) serta beberapa indikator yang tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) menginisiasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Tingkat Nasional Tahun 2011-2017. IPEI terdiri dari tiga

pilar, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sementara kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan kabupaten/kota maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu kabupaten/kota dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*). Laju pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun berikutnya. Metode ini sudah menghilangkan faktor kenaikan harga dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya (*the real economic growth*). Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, dianggap kurang tepat karena dalam PDB/PDRB harga berlaku tersebut masih dipengaruhi oleh perubahan harga.

## **2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi**

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas. Untuk Kota Yogyakarta mencakup 398 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Laju inflasi/deflasi adalah persentase perubahan indeks setiap bulan diperoleh dengan cara mengurangkan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) suatu bulan dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/ umum) bulan sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) bulan sebelumnya dan dikalikan 100.

## **3. Ketimpangan (Disparitas)**

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Uppal dkk, (1986), mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, antar lain seperti misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing provinsi melalui daftar isian proyek (DIP).

Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey,1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.

### **a. Ketimpangan (Disparitas) Antarwilayah**

Ketimpangan antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi,

kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Setiap wilayah memiliki potensi lapangan usaha unggulan yang berbeda-beda yang akan diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih efisien dan memiliki daya saing. Identifikasi potensi lapangan usaha potensial atau unggulan setiap wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur potensi ekonomi suatu wilayah adalah metode *Economic Base Approach*. Metode ini mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan setiap lapangan usaha serta mengelompokkannya menjadi lapangan usaha unggulan dan non unggulan. Pendekatan yang paling populer digunakan adalah menggunakan indeks *Location Quotient* atau LQ, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis kuadran. Indeks LQ lebih mengkaji potensi setiap kategori usaha dari sisi andil, sementara MRP mengkaji potensi dari sisi pertumbuhan setiap kategori usaha. Dalam analisis MRP nilai rasio pertumbuhan daerah analisis ( $RP_a$ )  $> 1$  menggambarkan bahwa kategori usaha tersebut memiliki potensi pada level regional. Sebaliknya, jika  $RP_a \leq 1$  menggambarkan kategori usaha tersebut tidak potensial pada level regional. Berdasarkan nilai indeks LQ dan  $RP_a$  dapat disusun sebuah *scatterplot* yang menggambarkan sebaran potensi setiap kategori usaha menurut wilayah dari sisi *share* secara ekonomi maupun dari sisi pertumbuhan. Lapangan usaha yang potensial akan memiliki nilai Indeks LQ  $> 1$  dan nilai  $RP_a > 1$  atau terletak di kuadran I. Sebaliknya, lapangan usaha yang tidak potensial akan memiliki nilai Indeks LQ  $\leq 1$  dan nilai  $RP_a \leq 1$  atau terletak di kuadran III.

Menurut Yadiansyah (2007), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Indonesia adalah, yang pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di Pulau Jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antardaerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kebijakan dari

birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996).

Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarpulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antardaerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima, adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Ketidاكلancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis "development gap" atau "disparitas" antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita.  
Asumsi yang digunakan untuk menganalisis konsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.
- c. *Human Development Index*.  
Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.
- d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.  
Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.
- e. Struktur Fiskal.  
Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

Selain itu, menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar

dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

### **b. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson**

Berdasarkan data PDRB per kapita kabupaten/kota dan provinsi serta data jumlah penduduk dapat diukur indikator ketimpangan antarwilayah dalam provinsi. Salah satu indikatornya adalah Indeks Williamson, yang dimaknai sebagai tingkat ketimpangan antarkabupaten/kota.

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan diberbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai CV-nya semakin rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai CV-nya rendah, seperti negara-negara yang sangat belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik (Williamson, 1975).

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antarwilayah, yaitu :

- i. *Labor Migration* ( Perpindahan Tenaga Kerja)

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang bersemangat dan berjiwa *entrepreneur*, terdidik dan mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpercarnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari itu, *human capital* yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar.

ii. *Capital Migration* (Perpindahan Modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan *entrepreneur*, dan pasar modal yang belum berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin.

iii. *Central Government Policy* (Kebijakan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya.

iv. *Interregional Linkages* (Keterkaitan antar Daerah)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada permulaan pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil., tetapi selanjutnya diharapkan pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya.

**c. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain

memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa dilihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari dua indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan dan disparitas dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antarakedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antardaerah.

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Beberapa ukuran yang cukup populer dan digunakan dalam kajian ini mencakup Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia. Ketiga ukuran ini cukup mampu menjelaskan besaran ketimpangan secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Ketimpangan pendapatan antarindividu penduduk yang diukur menggunakan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas pendapatan antar wilayah juga perlu dicermati sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

#### **d. Ketimpangan (Disparitas) Sektoral**

Berdasarkan kategori lapangan usaha ekonomi suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik antara yang satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah dan bila perbedaan tersebut mencolok timpang maka menimbulkan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan yang signifikan dari pendapatan masing-masing sektor ekonomi. Kesenjangan output antarkategori dalam perekonomian dikenal dengan istilah disparitas sektoral dan dikaji dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*). Analisis *shift share* juga berguna untuk mengkaji pergeseran serta peranan perekonomian di suatu daerah. Model ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Di samping itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Implementasi analisis *shift share* perekonomian dalam provinsi, disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuannya, dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam kabupaten/kota itu sendiri. Berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi, maka dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektor atau kategori. Suatu kabupaten/kota atau sektor di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuannya, karena tergantung pada perannya terhadap provinsi juga.

### **1) Analisis Pangsa Regional (PR)**

Pemilihan periode waktu dalam analisis *shift share* sangat menentukan hasil atau output. Artinya, untuk suatu periode yang dipilih dengan periode yang lain memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan. Oleh karena itu dalam analisis ini, analisis *shift share* digunakan untuk mengkaji struktur perekonomian beserta perubahannya selama periode 2010-2018. Pertimbangan dipilihnya periode tersebut adalah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dalam periode satu windu terakhir. Bila periode yang diamati terlalu pendek, maka pergeserannya struktur ekonomi tidak terlihat begitu nyata. Pangsa Regional (PR) merupakan komponen andil pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi nasional atau regional yang lebih tinggi.

### **2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)**

Analisis pergeseran dalam analisis *shift share* dapat digunakan untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi dalam periode 2010-2018. Komponen analisis pergeseran (*Shift Analysis*) terdiri dari nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Different Shift* (DS). Kelompok pertama (Kuadran I) merepresentasikan daerah yang perekonomiannya maju pesat. Kelompok kedua (Kuadran II) mencakup daerah yang memiliki nilai PS bertanda positif dan nilai DS bertanda negatif. Kuadran II ini merepresentasikan daerah yang perekonomiannya cenderung berpotensi. Kelompok ketiga (Kuadran III) mencakup daerah yang memiliki nilai PS dan DS dengan arah negatif dan merepresentasikan daerah yang perekonomiannya tertinggal dan memiliki daya saing lemah. Kelompok keempat (Kuadran IV) mencakup daerah dengan nilai PS negatif dan nilai DS positif. Kuadran IV ini merepresentasikan daerah yang perekonomiannya sedang berkembang atau tumbuh.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan suatu situasi pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber daya berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah

merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali DIY. Dimensi persoalan kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan dapat diukur menggunakan dua pendekatan yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Sementara, kemiskinan relatif mencakup kondisi seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang atau sekelompok orang disebut hampir miskin, bila sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga,

kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Kemiskinan yang disajikan dalam pembahasan merupakan kemiskinan yang diukur dengan pendekatan absolut. Angka kemiskinan ini sudah dirilis secara berkala oleh BPS dan digunakan secara resmi oleh pemerintah.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk nominal uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nilai kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan menggunakan data dasar hasil survei pengeluaran rumah tangga Susenas yang dilakukan secara berkala. Seseorang dianggap miskin jika memiliki pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan. Melalui pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ )** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ )**. Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran  $P_1$  dan  $P_2$  dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

#### **D. Ketenagakerjaan dan Pengangguran**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan subyek yang paling penting dalam pembangunan di sebuah negara atau wilayah. Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga ke sektor politik. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan masalah pekerjaan baik masalah pekerjaan itu sendiri, tenaga kerjanya, upah, hingga masalah yang ada pada sektor.

Permasalahan yang biasanya muncul dalam pembangunan terkait kependudukan, antara lain: angka kelahiran atau kematian yang tinggi, eksodus migrasi, persebaran yang tidak merata, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, tingkat pendidikan yang rendah,

pemukiman kumuh, tingkat kesehatan yang rendah, dan lain-lain. Sementara isu yang biasa muncul dalam hal ketenagakerjaan di antaranya adalah pengangguran, upah yang minimum, dan lapangan atau kesempatan kerja yang minim.

Sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam pembangunan ekonomi, permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan, perumusan program, dan implikasi pembangunan. Pembahasan berikut akan mengurai permasalahan penting yang dapat menjadi penyebab berbagai simpul permasalahan yang mempengaruhi hasil akhir pembangunan yang diukur dengan PDRB.

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin

meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial-ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

### **1. Ketenagakerjaan**

Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja ( contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

Menurut Tambunan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja ( berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sementara menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja

ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Thomas Robert Malthus dalam Albert WS Kusen (2013), menyebutkan bahwa ukuran pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) potensialnya meningkat. Sektor yang paling dominan adalah sektor industri dan pertanian. Jika output di kedua sektor itu ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa di tingkatkan. Menurut Thomas Robert Malthus ada dua faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan juga faktor nonekonomis seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tetapi, diantara faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal.

Meski relasi antara pertumbuhan dan ketimpangan telah memicu debat panjang para ahli, namun tetap ada keinginan kuat untuk "mengawinkan" keduanya. Oleh karena kompleksitasnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ini, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan sejumlah gagasan konseptual agar implikasi pembangunan lebih baik, mulai dari *redistribution with growth*, *the quality of growth*, *broad-based growth*, *pro-poor growth*, hingga *inclusive growth*. Analisis PDRB ini hanya berfokus membahas tentang konsep kualitas pertumbuhan (*the quality of growth*).

### a. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)

Angka beban tanggungan dikenal juga sebagai angka ketergantungan, beban ketergantungan, atau rasio ketergantungan. Angka ini menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif (kelompok umur 15-64 tahun) yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi dibagi golongan umur non produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas). Angka ketergantungan memberikan makna jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung setiap 100 orang penduduk yang produktif secara ekonomis.

### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Salah satu faktor produksi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, dan juga dari pengalaman. Tenaga kerja seperti ini sangat diperlukan oleh dunia usaha karena merupakan modal manusia (*human capital*) untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

TPAK menggambarkan ketersediaan angkatan kerja diantara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Ketersediaan angkatan kerja menunjukkan kemampuan penduduk dalam beraktivitas secara ekonomi, karena mencakup jumlah penduduk yang bekerja

dan penduduk yang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Sebagai pembanding adalah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun ke atas.

**c. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Angka TKK merupakan indikator ketenagakerjaan yang lebih spesifik. Angka ini menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena TKK merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan. Oleh karena itu TKK dapat disajikan menurut lapangan usaha.

Kelompok penduduk lain yang merupakan bagian dari angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja. Kelompok ini terdiri dari tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat kategori yang masih menjadi bagian dari angkatan kerja tersebut dikenal dengan istilah sebagai penganggur dan indikator pengukurannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**d. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)**

Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) menunjukkan besarnya persentase jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah output atau pertumbuhan pada setiap sektor. Analisis EKK dapat menggunakan metoda *Ordinary Least Square* (OLS) atau dapat juga menggunakan rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

Melalui EKK, diperoleh indikasi secara makro bahwa kesempatan kerja suatu sektor atau lapangan usaha bersifat elastis atau inelastis. Kesempatan kerja bersifat *elastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja lebih besar dari 1 persen (*increasing return to scale*). Kesempatan kerja bersifat *inelastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), dan kesempatan kerja bersifat *unitary*, artinya persentase perubahan output sama besarnya dengan persentase perubahan kesempatan kerja (*constan return to scale*).

**e. Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja menghasilkan produk (Pangestu, 1997:41). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut J. Ravianto, (1986:3), tingkat produktivitas tenaga kerja diukur menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai tambah dengan sumber daya yang terpakai.

### 2. Pengangguran

Konsep dan definisi ketenagakerjaan dan pengangguran Badan Pusat Statistik merujuk pada konsepsi *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah *chaos* politik bagi pemerintahan.

Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya. Demikian pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi. Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari pada tidak memiliki produksi sama sekali.

### **BAB 3**

### **METODOLOGI**

- A. Sumber Data
- B. Kerangka Pikir Analisis
- C. Indikator Penyajian PDRB
- D. Analisis Potensi dan Kualitas Indikator  
Pertumbuhan PDRB





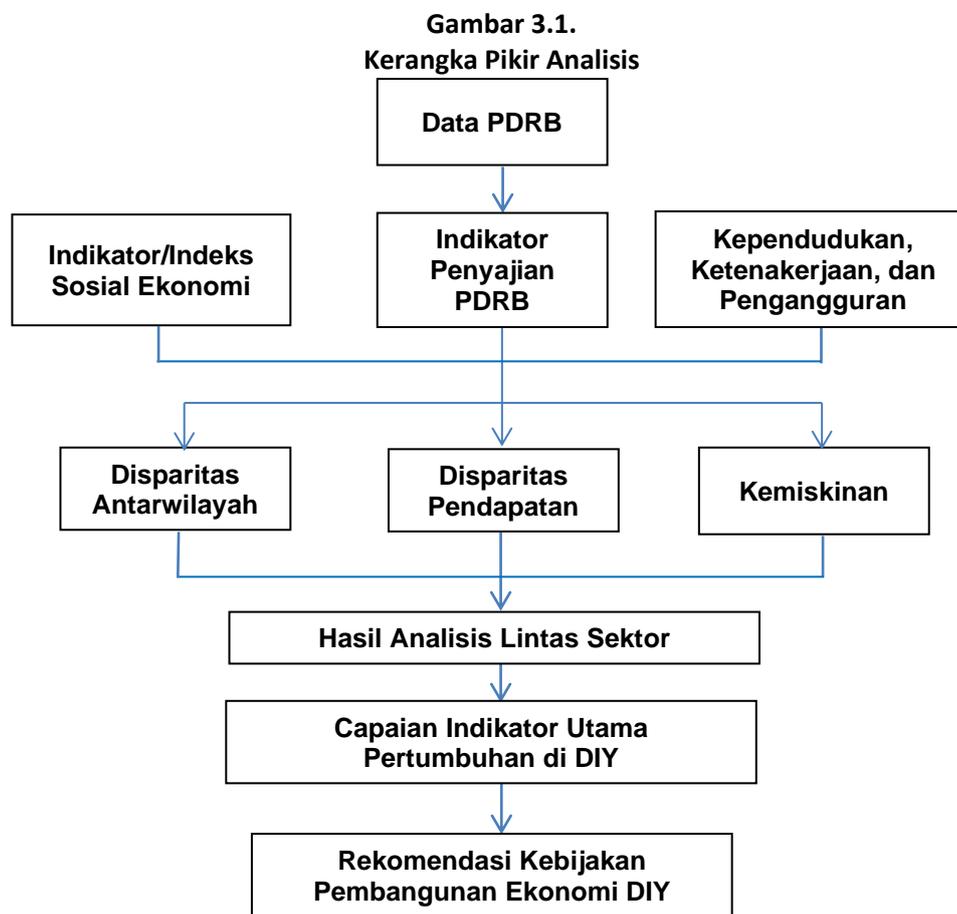
## BAB III METODOLOGI

### A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Analisis PDRB 2015-2020 ini bersumber dari data PDRB DIY dan PDRB Kabupaten/Kota yang merupakan hasil pengolahan data dari kegiatan Survei Khusus Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), survei dan kompilasi data keuangan dari Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten/kota, kompilasi data keuangan dari Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Statistik Niaga dan Jasa, Survei Statistik Pertanian, Survei Industri Besar Sedang (IBS), Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK), Angka Kemiskinan 2010-2019, dan data-data dari publikasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (DDA DIY).

### B. Kerangka Pikir Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sumber data, maka kerangka pikir analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**C. Indikator Penyajian PDRB**

Data PDRB yang digunakan dalam buku Analisis PDRB DIY ini terdiri dari PDRB menurut sektor/ lapangan usaha dan menurut pengeluaran, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu distribusi persentase (kontribusi/peran), PDRB per kapita, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit.

**1. Distribusi Persentase**

**Distribusi persentase** diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor/penggunaan dengan total PDRB. Distribusi persentase mengindikasikan struktur PDRB menurut sektor atau menurut penggunaan.

$$Share(\%) = \frac{ntb \text{ sektor / penggunaan}}{PDRB_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

**2. PDRB per Kapita**

**PDRB per kapita** diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_t}{\sum \text{penduduk}_t} \dots\dots\dots(3.2)$$

**3. Indeks Perkembangan**

**Indeks perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan, sebagai berikut:

$$IP_t = \frac{PDRB_t - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

**4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)**

**Indeks berantai** diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh **angka laju pertumbuhan**.

$$IB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.4)$$

**5. Indeks Harga Implisit**

Indeks harga implisit diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen.

$$II_t = \frac{PDRB_{adhb}_t}{PDRB_{adhk}_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.5)$$

**6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen)**

Selanjutnya, apabila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga suatu tahun terhadap tahun sebelumnya (laju inflasi).

$$IIB_t = \frac{II_t - II_{t-1}}{II_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.6)$$

**D. Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY**

**1. Pertumbuhan, Rata-rata Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Ekonomi**

Model pertumbuhan ekonomi mengacu pada fungsi produksi yang diperkenalkan oleh **Cobb-Douglass** (Mankiw, 2004), yaitu:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots(3.7)$$

keterangan:

- $Y_t$  = tingkat produksi (output) pada periode t
- $T_t$  = tingkat teknologi pada periode t
- $K_t$  = jumlah stok modal pada periode t
- $L_t$  = jumlah tenaga kerja pada periode t
- $\alpha$  = produktivitas modal
- $\beta$  = produktivitas tenaga kerja

Formula di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi berikut:

$$Y = f(T, K, L)$$

Dari rumusan fungsi produksi Cobb-Douglas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap teknologi, kapital, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan teknologi, kapital atau tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.8)$$

keterangan:

- LPE* = Laju pertumbuhan ekonomi
- PDRB<sub>t</sub>* = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t
- PDRB<sub>(t-1)</sub>* = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left( \sqrt[n-1]{\left( \frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}} \right)} - 1 \right) \times 100 \dots\dots\dots(3.9)$$

keterangan:

- r* = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun
- n* = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)
- t<sub>n</sub>* = Tahun terakhir periode
- t<sub>0</sub>* = Tahun awal periode

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran andil terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formula berikut:

$$Andil_i = \frac{(LPE_i \times DP_{i(t-1)})}{100} \dots\dots\dots(3.10)$$

- Andil<sub>i</sub>* = Andil sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap pertumbuhan ekonomi
- LPE<sub>i</sub>* = Laju pertumbuhan ekonomi sektor/ wilayah/ komponen ke-i
- DP<sub>i(t-1)</sub>* = Rasio dari selisih PDRB sektor/wilayah/komponen ke-i periode t dengan (t-1) terhadap selisih total PDRB periode t dengan (t-1)
- i* = 1, 2, ..., 17.
- t* = tahun observasi

Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997)

disebut sebagai **Tipologi Klassen** disajikan pada Gambar 3.2 dalam bentuk “**diagram empat kuadran**”, di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horisontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horisontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horisontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan DIY. Apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata DIY. Suatu kabupaten/kota terletak di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita DIY, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan DIY. Selanjutnya dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita DIY, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan DIY.

Kabupaten/kota di kuadran I disebut “daerah maju dan cepat tumbuh” yang secara relatif menunjukkan daerah–daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata DIY. Kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II disebut “daerah maju tapi tertekan” atau *Retarded Region*, merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata DIY. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan “daerah relatif tertinggal” atau *Relatively Backward Region*, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya. Sementara itu, kabupaten/kota yang digambarkan di Kuadran IV menunjukkan bahwa daerah tersebut “daerah berkembang” atau *Growing Region*, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata DIY.



Persentase perubahan IHK dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan metode *point to point*, tetapi sebelum April 1998 menggunakan metode kumulatif bulanan.

**3. Indikator Ketenagakerjaan dan Pengangguran**

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

**a. Pendidikan Penduduk**

Pendidikan mencerminkan kualitas pengetahuan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka kualitas pengetahuan dan ketrampilannya diasumsikan semakin baik. Pendidikan tertinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

**b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha**

Lapangan usaha merupakan mata pencaharian penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kategori lapangan usaha mengacu pada lapangan usaha 17 (tujuh belas) kategori atau lapangan usaha seperti yang digunakan dalam uraian PDRB tahun dasar 2010.

**c. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio - DR*)**

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-14} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{15-64}} \dots\dots\dots(3.13)$$

Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

**d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan perlindungan

kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak.

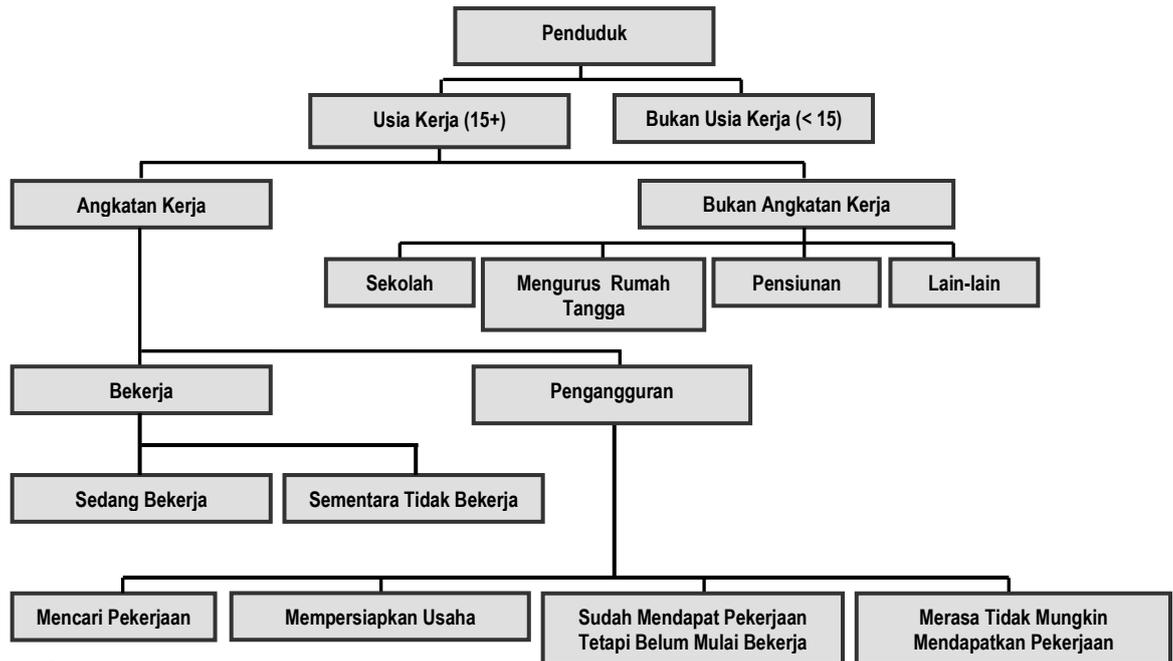
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 3.3.

Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

**Gambar 3.3**  
**Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja**



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**e. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**

Menurut Simanjutak (2001), kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor. Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.15)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja ( $r_{KK}$ )**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.16)$$

keterangan:

- $B_t$  = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t
- $B_{t-1}$  = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

#### **f. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran. Dalam analisis ini indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(3.17)$$

#### **g. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)**

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut Simanjutak (2001), Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (regional bruto (PDB/PDRB)). Dengan demikian elastisitas kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \quad \dots\dots\dots(3.18)$$

keterangan:

- $E_{KK}$  = Elastisitas kesempatan kerja

- $r_{KK}$  = Laju pertumbuhan kesempatan kerja
- $r_{PDRB}$  = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

**h. Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)**

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(3.19)$$

keterangan:

- $PTK_i$  = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i
- $PDRB_i$  = PDRB sektor ke-i
- $TK_i$  = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

**4. Indikator Kemiskinan**

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *“inability of the individual to meet basic needs”* (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *“the failure to have certain minimum capabilities”*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan **nilai standar kebutuhan minimum**, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai

**garis pembatas** untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. *Uppal (1985)* menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai **garis kemiskinan (*poverty line*)** atau **batas kemiskinan (*poverty threshold*)**.

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara **2.100 kilo kalori per kapita per hari** dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. **Biaya** untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. **Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan** merupakan **indikator kemiskinan** yang sering digunakan dan biasa disebut **Head Count Index (HCI)**.

Kajian tentang kemiskinan tidak cukup hanya mempelajari jumlah dan persentase penduduk miskin saja yang diukur dari metode HCI. Salah satu kelemahan metode HCI adalah tidak memperhitungkan kedalaman kemiskinan serta ketimpangan sebaran pada kelompok miskin (*distribution among the poor*). Dua indikator berikut ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam melihat perubahan tingkat hidup penduduk miskin. Indikator tersebut adalah **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ )** dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ )**.

Penurunan angka pada  $P_1$  mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman dari insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan dari  $P_2$  mengidentifikasi berkurangnya (membaiknya) ketimpangan di antara penduduk miskin.

Pada tahun 1994 **Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT)** memperkenalkan suatu rumusan yang mengandung tiga jenis indikator kemiskinan. Rumusan FGT inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = (I / N) \sum_{j=1}^q \left( \frac{(Z - Y_j)}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(3.20)$$

Keterangan:

- $P_{\alpha}$  = Indeks kemiskinan (  $\alpha = 0,1,2$ )
- $N$  = Jumlah penduduk
- $Z$  = Garis kemiskinan
- $Y_j$  = Pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan  $Z$

$Q$  = Banyaknya penduduk miskin

Pengeluaran penduduk miskin perkapita dapat langsung dihitung dari hasil SUSENAS yang menggambarkan perbedaan antara pengeluaran si miskin (*proxy* pendapatan) dengan garis kemiskinan. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan :

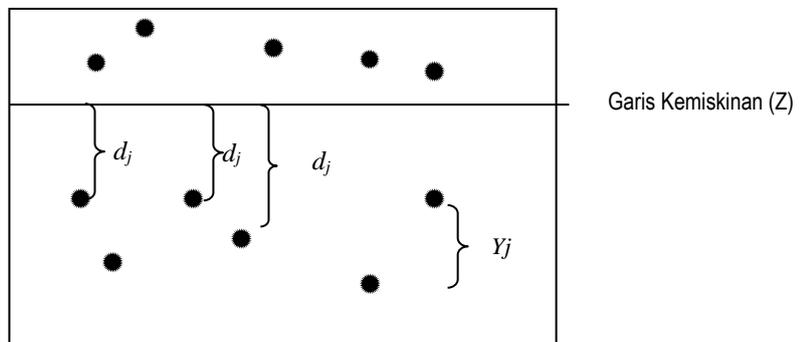
$$d_j = Z - Y_j \quad \dots\dots\dots(3.21)$$

bila persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus FGT di atas, maka akan diperoleh :

$$P_\alpha = (1/N) \sum_{j=1}^Q \left( \frac{d_j}{Z} \right)^\alpha \quad \dots\dots\dots(3.22)$$

Keterangan:  $d_j/Z$  disebut **rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)**.

**Gambar 3.4**  
**Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan**



Gambar 3.4 adalah *plotting* pengeluaran per kapita ( $Y_j$ ) dengan garis kemiskinan ( $Z$ ). Jarak antara pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap batas kemiskinan ditunjukkan oleh setiap titik  $d_j$  yang terdistribusikan di bawah garis kemiskinan. **Golongan penduduk sekitar garis miskin** relatif lebih mudah ditanggulangi, tetapi **rentan terhadap perubahan harga**. Jika harga naik menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas, maka mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan mudah jatuh ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah, maka mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk tidak miskin. Golongan penduduk seperti inilah yang dikenal sebagai ***the near non-poor*** yang sensitif terhadap perubahan harga.

Dari rumusan FGT diperoleh tiga macam indeks, yaitu :

- i. Jika  $\alpha = 0$  maka  $P_0 = Q/N$  rasio ini tidak lain adalah **Head Count Index**, dan bila dikalikan dengan 100 menjadi **persentase penduduk miskin**. Jika 20 persen dari total penduduk diklasifikasikan sebagai miskin, maka  $P_0 = 0,2$ .

- ii. Jika  $\alpha = 1$  maka  $P_1$  menunjukkan ukuran **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index*)**.  $P_1$  merupakan persentase rata-rata kesenjangan antar pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah seluruh penduduk (baik yang di bawah atau di atas garis kemiskinan). Misal  $P_1 = 0,15$  ini berarti bahwa kesenjangan antara total pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumahtangga (baik rumahtangga miskin atau tidak miskin) adalah sebesar 15 persen. Karena nilai  $P_1$  belum menggambarkan kesenjangan riil yang dihadapi oleh penduduk miskin, maka nilai  $P_1$  harus dikoreksi dengan jumlah penduduk yang berada di atas GK dengan rumus:

$$\frac{P_1}{P_2} = \sum_{j=1}^Q \left( \frac{(Z - Y_j)}{Q} \right) \dots\dots\dots(3.23)$$

Rasio  $P_1/P_2$  merupakan persentase rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain rasio tersebut merupakan rata-rata kesenjangan taraf hidup yang diukur dengan pengeluaran.

- iii. Jika  $\alpha = 2$  maka  $P_2$  menunjukkan ukuran **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau *distribution sensitive index*)** yang menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin. Tidak seperti dua ukuran terdahulu, ukuran ini sensitif terhadap penyebaran pengeluaran (*proxy* pendapatan) yang terjadi di antara penduduk miskin, dan juga dapat dipakai untuk mengetahui intensitas kemiskinan (*severity*). Ukuran ini dianggap yang paling memenuhi aksioma-aksioma untuk ukuran kemiskinan yang diinginkan oleh berbagai literatur, termasuk *Amartya Sen* (1976) dengan '*transfer axiom*'-nya, yaitu jika terjadi transfer pengeluaran dari penduduk miskin kepada penduduk yang lebih miskin berarti secara rata-rata telah terjadi suatu penurunan kemiskinan (BPS, 1992).

**5. Indikator Ketimpangan (Disparitas)**

**a. Ketimpangan Pendapatan**

Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan distribusi pendapatan atau pembagian pendapatan seperti diawali oleh *Sundrum* (1973) serta *King* dan *Weldon* (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti *Hendra Esmara* (1974 dan 1978), kemudian *Parera* (1977) atau *Sam F. Poli* (1978). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* dalam pembagian pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam ukuran **Gini Ratio**. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.

Selama ini, pemerintah di banyak negara berkembang dalam kebijakan politik dan ekonominya lebih menekankan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam upaya terciptanya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara:

memperbesar 'kue' terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata, atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar 'kue' yang diperoleh. Namun terlepas dari polemik dikhotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

**a.1. Rasio Gini (Gini Ratio)**

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

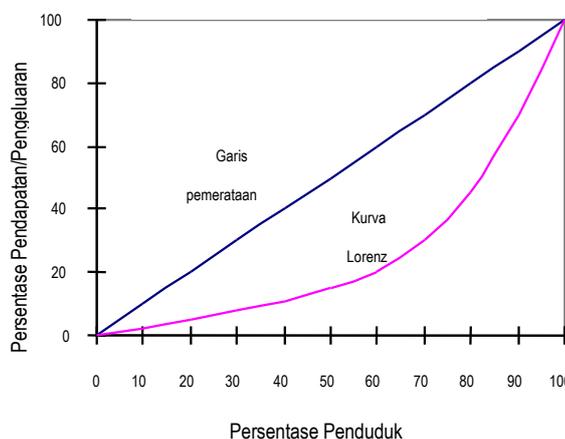
$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(3.24)$$

Keterangan :

- $P_i$  = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
- $Q_i$  = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i
- $k$  = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan **"rendah"**; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan **"moderat"**; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan **"tinggi"**.

**Gambar 3.5. Kurva Lorenz**



**a.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia (KBD)**

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- Tingkat ketimpangan **rendah**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **moderat**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai dengan 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **tinggi**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima **kurang dari 12** persen jumlah pendapatan.

**b. Ketimpangan Sektoral Antar Kabupaten/Kota**

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, disparitas ekonomi juga dapat digambarkan dengan disparitas sektoral antar wilayah. Indikator disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

• **Indeks Ketimpangan Regional**

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukuran adalah: semakin besar nilai indeks, semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya; sebaliknya, **semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik.**

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \dots\dots\dots(3.25)$$

keterangan:

- IW* : Indeks Williamson
- y* : Rata-rata pendapatan (PDRB) di Provinsi DIY
- y<sub>i</sub>* : Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i

- $f_i/n$  : Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi DIY  
 $i$  : 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di Provinsi DIY).

• **Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)**

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional. Disamping itu analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan.

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten atau propinsi) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (nasional). Metode analisis ini bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

- i. **Pertumbuhan nasional (*national growth component*)**, perubahan output atau pendapatan (atau indikator ekonomi lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional, atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah dan sektor secara seragam.
- ii. **Pertumbuhan sektoral (*industrial mix component*)**, timbul karena perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.
- iii. **Pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component*)**, terjadi karena peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat atau lambat dari wilayah lainnya.

Perubahan nilai tambah bruto (NTB) atau PDRB suatu sektor  $i$  di suatu wilayah  $j$  dalam 2 periode, yaitu periode  $o$  dan periode  $t$  dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^t - Q_{ij}^o$$

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^o ( Y_t/Y_o - 1 ) + Q_{ij}^o ( Q_i^t/Q_i^o - Y_t/Y_o ) + Q_{ij}^o ( Q_{ij}^t/Q_{ij}^o - Q_i^t/Q_i^o ) \dots\dots\dots (3.26)$$

Dari persamaan diatas dapat kita asumsikan bahwa pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah disebabkan oleh 3 komponen pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

keterangan:

- PR<sub>ij</sub> = Pangsa Regional sektor i pada wilayah j
- PS<sub>ij</sub> = Proportional Shift (pergeseran proporsional) sektor ke-i pada wilayah j
- DS<sub>ij</sub> = Different Shift (pergeseran yang berbeda) sektor ke-i pada wilayah j
- Y<sub>0</sub> dan Y<sub>t</sub> = Total PDRB Wilayah pada tahun 0 dan pada tahun t
- Q<sup>0</sup><sub>ij</sub> dan Q<sup>t</sup><sub>ij</sub> = PDRB sektor i propinsi j pada tahun 0 dan pada tahun t
- Q<sup>0</sup><sub>i</sub> dan Q<sup>t</sup><sub>i</sub> = Total PDRB Wilayah sektor i pada tahun 0 dan pada tahun t

$$PR_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Y_t}{Y_o} - 1 \right\} \dots\dots\dots (3.27)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^o} - \frac{Y_t}{Y_o} \right\} \dots\dots\dots (3.28)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^o} - \frac{Q_i^t}{Q_i^o} \right\} \dots\dots\dots (3.29)$$

**Analisis SS dapat dibagi ke dalam 2 bagian:**

**1) Analisis Pangsa Regional (*Share Analysis*)**

Untuk melihat struktur atau posisi relatif provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat propinsi. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja. *Share analysis* akan mengukur proporsi dari, misalnya, PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi. Oleh sebab itu bila nantinya ditemukan satu atau beberapa kabupaten di suatu propinsi memiliki pangsa yang tinggi maka kabupaten tersebut dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB propinsi. Disamping itu analisis ini juga digunakan untuk melihat peranan/kontribusi sektor yang signifikan di suatu wilayah.

**2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)**

Dalam analisis pertumbuhan regional komponen pergeseran lebih penting daripada komponen PR. Total pergeseran (total shift) terdiri dari:

- ∞ Perubahan secara proporsional atau Proportionality Shift (PS) mengukur sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat wilayah. Jadi PS memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.
- ∞ Perubahan yang berbeda atau Different Shift (DS) terjadi apabila laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan posisi keuntungan

lokasi (locational advantage position) suatu wilayah yang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan satu atau beberapa sektor tertentu di wilayah tersebut.

Berdasarkan besaran PS dan DS beberapa wilayah dalam suatu daerah dapat di kelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region*),

Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang (*depressed region* yang berkembang),

Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi (*depressed region* yang berpotensi)

Kategori IV (PS dan DS negatif) adalah wilayah *depressed region* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan Analisis *Shift-Share*, yaitu:

1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah  $t$  atau  $(t+1)$  tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM metode baru di Indonesia dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dihitung dengan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dan dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Definisi dari indikator-indikator tersebut adalah:

### a. Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010.

### b.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

### b.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

### c. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Masing-masing indeks tersebut dihitung dengan standar normalisasi dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan : Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.30)$$

Keterangan:

IPM<sub>t</sub> : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM<sub>t-1</sub> : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Selanjutnya hasil hitungan IPM diklasifikasikan level IPM untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: IPM ≥80 diklasifikasikan "**sangat tinggi**"; 70≤IPM<80 diklasifikasikan "**tinggi**"; 60≤IPM<70 diklasifikasikan "**sedang**"; dan IPM<60 diklasifikasikan "**rendah**".



## **BAB 4**

### **PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**

- A. Struktur Perekonomian PDRB
- B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil  
Pertumbuhan
- C. PDRB Per Kapita
- D. Indeks Perkembangan Kategori
- E. Perbandingan Nilai PDRB Antar  
Kabupaten/Kota
- F. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi





## BAB IV

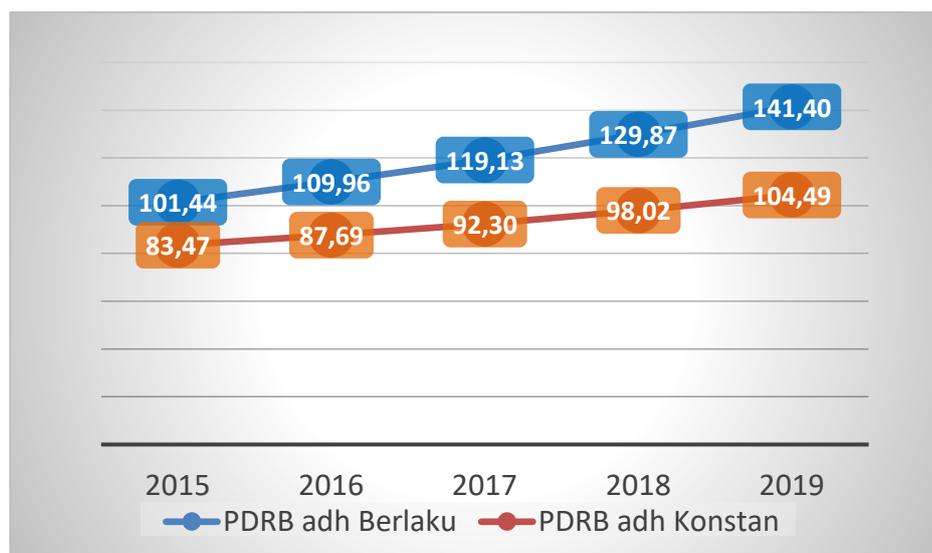
### PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA

#### A. Struktur Perekonomian PDRB

Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022. Selama 2014-2019 perkembangan ekonomi mengalami anomali krisis ekonomi sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Namun dengan kembalinya tren pertumbuhan ke arah yang positif sejak 2016 memberikan harapan besar bahwa dalam periode RPJMD DIY 2017-2022 perekonomian akan terus tumbuh.

Harapan membaiknya perekonomian ditandai dengan nilai PDRB DIY yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB DIY di tahun 2019 meningkat 11,5 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 6,5 triliun rupiah atas dasar harga konstan. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dengan peningkatan tersebut, tercipta nilai PDRB tahun 2019 sebesar 141,4 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan sebesar 104,5 triliun rupiah atas dasar harga konstan.

**Gambar 4.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY (triliun rupiah),  
2015-2019**



Sesuai dengan rekomendasi PBB, penghitungan struktur PDB Indonesia dan PDRB provinsi/kabupaten/kota menggunakan dasar *System National Accounts, 2008 (SNA2008)* yang terdiri dari 17 kategori atau lapangan usaha. Struktur perekonomian DIY tahun 2019 atas dasar harga berlaku dapat dilihat di Tabel 4.1.

Tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Masing-masing lapangan usaha tersebut memberi kontribusi sebesar 12,85 persen, 11,11 persen, dan 10,35 persen. Peningkatan kontribusi lapangan usaha konstruksi yang sangat tajam selama dua tahun terakhir telah menggeser posisi penyediaan akomodasi dan makan minum yang biasanya berada pada urutan kedua menjadi urutan ketiga, sedangkan pertanian yang semula berada pada urutan ketiga menjadi urutan keempat. Pergeseran tersebut terlihat dari kontribusi lapangan usaha pertanian yang cenderung menurun selama 4 (empat) tahun terakhir. Sebaliknya, kontribusi lapangan usaha konstruksi cenderung meningkat hingga mampu menempati posisi kedua, seiring dengan meningkatnya volume kegiatan konstruksi khususnya bandara baru *Yogyakarta International Airport (YIA)*.

**Tabel 4.1. Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2015 – 2019**

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	10,64	10,42	10,02	9,79	9,37
2	Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51
3	Industri Pengolahan	13,11	13,23	13,13	12,99	12,85
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,13	0,15	0,14	0,14
5	Pengadaan Air	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	9,37	9,35	9,49	10,28	11,11
7	Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor	8,22	8,46	8,58	8,59	8,47
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,68	5,68	5,69	5,75	5,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	10,24	10,33	10,22	10,35
10	Informasi dan Komunikasi	8,13	8,15	8,21	8,10	7,98
11	Jasa Keuangan	3,97	3,94	3,90	3,93	4,00
12	Real Estat	7,02	7,09	7,03	6,95	7,00
13	Jasa Perusahaan	1,03	1,01	1,02	1,01	1,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	8,26	8,38	8,57	8,43	8,23
15	Jasa Pendidikan	8,48	8,19	8,14	8,11	8,14
16	Jasa Kesehatan	2,52	2,51	2,52	2,48	2,50
17	Jasa-jasa Lainnya	2,55	2,57	2,61	2,60	2,59
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan untuk skala industri besar-sedang terutama berasal dari kontribusi sub kategori industri makanan dan minuman dan industri tekstil dan pakaian jadi. Lebih dari setengahnya (56,6 persen) dari nilai tambah lapangan

usaha industri merupakan kontribusi dari sub lapangan usaha industri makanan dan minuman, dan lebih dari sepersepuluhnya (11,4 persen) merupakan kontribusi sub lapangan usaha industri tekstil dan pakaian jadi.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor ekonomi andalan di DIY. Hal ini terlihat dari peringkat kontribusinya yang selalu mencapai peringkat tiga besar. Provinsi DIY mempunyai daya tarik tersendiri sebagai salah satu *icon* wisata di Indonesia. Banyaknya event unggulan selama 2019, baik *event* destinasi, *event* seni dan budaya, *event* komunitas, dan *event* olahraga menjadi menarik kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Banyaknya *event* nasional dan juga internasional tersebut memberikan dampak meningkatnya tingkat hunian penginapan berbintang maupun nonbintang serta wisata kuliner. Nilai tambah lapangan usaha ini biasanya akan mencapai puncaknya pada waktu liburan, terutama liburan sekolah, hari raya, dan tahun baru. Dilihat menurut golongan pokok usaha, penyediaan makan minum menjadi penyumbang utama lapangan usaha ini yaitu sekitar 76 persen dari total nilai tambah lapangan usaha atau kategori ini. Sementara penyediaan akomodasi memberikan sumbangan sekitar 24 persen terhadap nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Setelah tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar tersebut, ada enam kategori usaha ekonomi sebagai lapisan kedua yang juga cukup kuat kontribusinya dalam struktur ekonomi DIY. Kontribusi lapangan usaha tersebut dalam PDRB DIY sekitar 7 hingga 9 persen, yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan dan reparasi mobil dan motor; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa informasi dan komunikasi; dan real estate.

Sampai dengan tahun 2017, kontribusi pertanian lebih dari 10 persen dan termasuk tiga besar kontributor terbesar PDRB DIY. Kontribusi pertanian berangsur-angsur menurun hingga di bawah 10 persen di tahun 2018 dan 2019 sehingga peringkatnya turun menjadi urutan keempat. Kondisi ini menggambarkan bahwa nilai tambah yang tercipta dari lapangan usaha pertanian tumbuh lebih lambat, utamanya jika dibandingkan dengan tiga lapangan usaha kontributor terbesar tersebut di atas. Meskipun demikian, pertanian masih menjadi mata pencaharian dominan bagi sebagian besar masyarakat DIY. Kontributor utama lapangan usaha pertanian adalah sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, yang menyumbang sekitar 87,9 persen terhadap nilai tambah pertanian. Sedangkan kontributor utama sub lapangan usaha pertanian adalah tanaman pangan, sekitar 40 persen, diikuti tanaman hortikultura sebesar 31,7 persen, dan peternakan sebesar 23 persen.

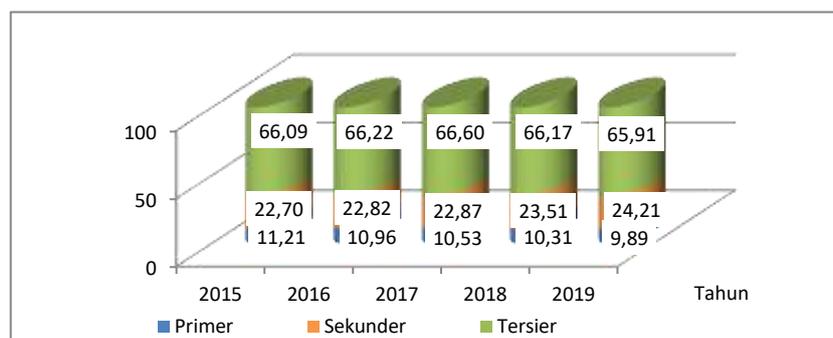
Berdasarkan tiga kategori usaha sebagai penyumbang utama dan enam kategori pada kelompok pelapis kedua tersebut memperlihatkan bahwa struktur perekonomian DIY menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi ini juga selaras dengan Visi

DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Demikian pula dikaitkan kondisi ekonomi DIY tersebut juga mempunyai keterpaduan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yaitu **“Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Menurut sifat output barang yang dihasilkan, 17 lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Selanjutnya, sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya termasuk dalam sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Perkembangan distribusi persentase kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier dalam PDRB relatif sama dari tahun ke tahun. Selama 4 (empat) tahun terakhir, kontribusi sektor primer dan tersier menurun. Sebaliknya, kontribusi sektor sekunder terlihat meningkat. Pada tahun 2019 sektor tersier memegang peran 65,91 persen dari total PDRB atau turun 0,27 poin persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor primer juga mengalami penurunan 0,43 poin persen, sehingga menjadi 9,89 persen. Oleh karena adanya penurunan kontribusi sektor primer dan tersier sektor maka sektor sekunder naik sebesar 0,70 poin persen menjadi 24,21 persen.

**Gambar 4.2. Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2015-2019**



Cakupan sektor tersier meliputi aktivitas perdagangan dan jasa-jasa, yang terdiri dari 11 sektor. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian DIY karena hampir dua pertiga bagian dari total PDRB DIY merupakan sumbangan dari sektor ini. Kontributor tertinggi dalam sektor tersier adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, lebih dari 15 persen. Kontributor tertinggi selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, dan informasi dan komunikasi, masing-masing sekitar 12 persen. Sementara itu, kontribusi real estate sekitar 10 persen dan yang lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Jika dilihat lebih rinci pada golongan usaha, penguatan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum bersumber pada golongan usaha penyediaan makan minum, seperti restoran, warung makan, kedai makan dan minum, dan sejenisnya. Usaha kuliner di DIY semakin menjamur, baik untuk jenis usaha menu makanan utama maupun kudapan, seperti warung kopi dan angkringan. Hal ini sebagai bukti makin menguatnya aktivitas ekonomi golongan usaha ini. Selain itu, toko oleh-oleh juga semakin menjamur, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan di DIY. Menguatnya usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dapat dilihat dari semakin padatnya lalu lintas jalan raya di berbagai jalur. Sementara itu, menguatnya peran lapangan usaha jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, utamanya merupakan efek dari peningkatan tren porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun porsi terbesar masih bersumber dari pos belanja pegawai. Demikian pula peningkatan jasa pemerintahan juga disumbangkan oleh meningkatnya dana alokasi khusus Dana Keistimewaan (Danais) DIY hingga realisasi pelaksanaan tahun 2019.

## **B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan**

### **1. Pertumbuhan menurut Kategori**

Penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010 sudah mengacu pada SNA2008, dan salah satu implikasinya adalah terdapat perubahan nomenklatur penggolongan. Selain itu, perubahan istilah sektor menjadi industri atau kategori atau masih bisa juga menggunakan istilah lapangan usaha. Namun, dalam pembahasan tertentu istilah sektor kadang-kadang masih digunakan, tujuannya agar kalimat yang disampaikan lebih mudah dipahami maknanya.

Perekonomian DIY tahun 2019 tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian yang tumbuh sebesar 6,20 persen di tahun 2018, meningkat menjadi 6,60 persen di tahun 2019. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terlihat meningkat sejak tahun 2015 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi telah mengalami masa pemulihan setelah krisis yang dialami. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi di DIY juga ditunjukkan oleh pertumbuhan positif di seluruh lapangan selama lima tahun terakhir.

## Bab 4 | PDRB menurut Lapangan Usaha

**Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2019 di DIY (persen), 2015-2019**

Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>	Rata-rata 2015-2019	Andil Pertumbuhan 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	2,11	1,46	1,93	2,16	1,03	1,64	0,09
2. Pertambangan & Penggalian	0,13	0,42	3,39	10,59	3,04	4,29	0,02
3. Industri Pengolahan	2,13	5,06	5,74	5,12	5,73	5,41	0,73
4. Pengadaan Listrik, Gas	2,19	14,26	3,96	3,31	5,43	6,65	0,01
5. Pengadaan Air	2,90	2,36	3,46	5,13	8,90	4,93	0,01
6. Konstruksi	4,24	5,42	7,01	13,10	14,39	9,91	1,47
7. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	6,19	6,07	5,72	5,54	5,16	5,62	0,43
8. Pengangkutan & Pergudangan	3,73	4,60	4,76	6,60	3,55	4,87	0,19
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	5,51	6,21	6,77	8,89	6,84	0,85
10. Informasi dan Komunikasi	5,11	8,32	6,14	6,48	7,45	7,09	0,83
11. Jasa Keuangan	8,27	4,99	2,81	6,14	8,52	5,60	0,30
12. Real Estat	6,05	5,13	4,91	5,54	5,93	5,38	0,43
13. Jasa Perusahaan	7,31	3,49	5,92	5,51	6,75	5,41	0,08
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,57	4,51	4,06	3,30	4,36	0,24
15. Jasa Pendidikan	7,28	3,07	5,52	6,01	6,57	5,28	0,58
16. Jasa Kesehatan	7,15	4,52	5,84	6,05	6,61	5,75	0,17
17. Jasa Lainnya	8,00	5,70	5,76	6,19	6,25	5,98	0,17
<b>PDRB</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>	<b>5,77</b>	<b>6,60</b>

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sementara

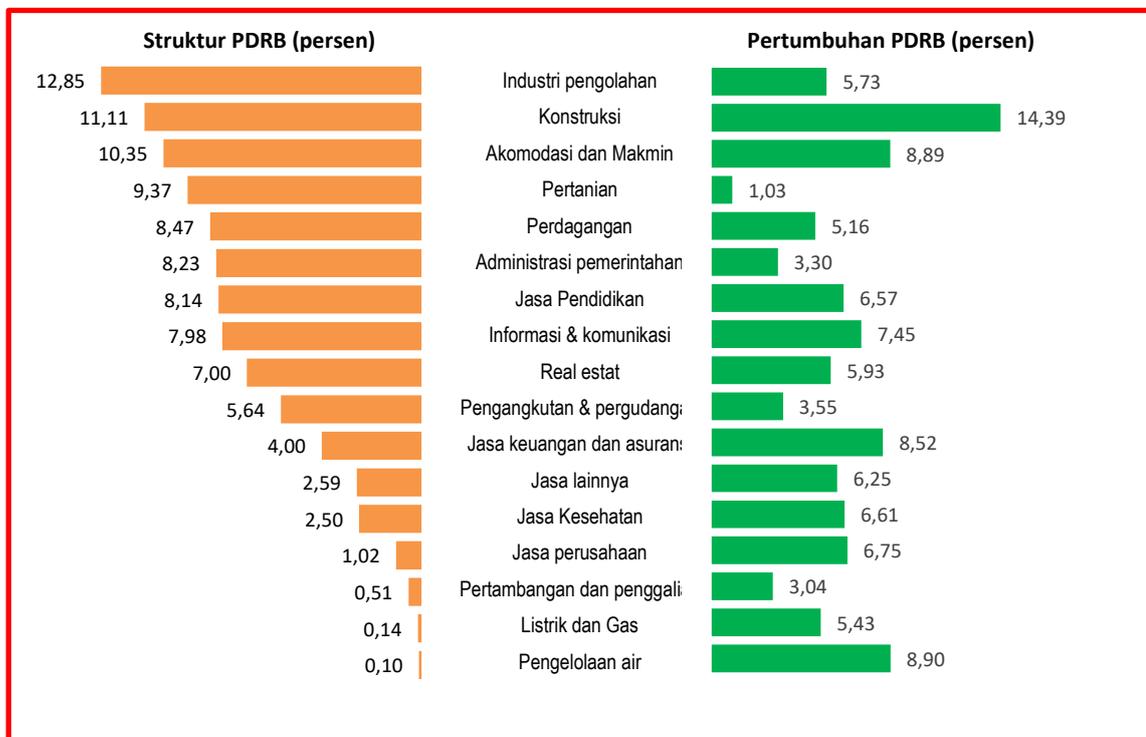
Lapangan usaha konstruksi dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fantastis, yaitu dua digit. Hal ini didorong oleh pembangunan mega proyek bandara YIA yang di pertengahan 2018 secara masif dipercepat untuk mengejar target mulai operasi di bulan April 2019. Di samping itu, beberapa proyek infrastruktur yang nilainya cukup besar juga turut mendorong pertumbuhan lapangan usaha ini, di antaranya kelanjutan jalan jalur lintas selatan (JJLS), *under pass* bandara YIA, *under pass* perempatan Kentungan, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan.

Delapan dari sebelas lapangan usaha yang berada di kelompok sektor tersier menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat di tahun 2019, meskipun laju pertumbuhan tertinggi tahun ini lapangan usaha di kelompok sektor sekunder yaitu konstruksi. Lapangan usaha di sektor tersier yang mempunyai laju pertumbuhan di atas pertumbuhan total PDRB adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan.

Gambaran potensi ekonomi daerah dapat dilihat lebih dekat dari pangsa distribusi sekaligus dengan pertumbuhannya, seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. Industri

pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum adalah tiga lapangan usaha yang mempunyai pangsa paling tinggi. Selain pangsa yang tinggi, lapangan usaha konstruksi juga memiliki laju pertumbuhan yang tertinggi, sehingga sangat potensial dalam mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara lapangan usaha pengadaan air meskipun memiliki pertumbuhan tertinggi kedua, namun karena kontribusinya hanya 0,1 persen menjadikan tidak begitu pengaruh bagi perekonomian DIY. Pertumbuhan pengadaan air yang tinggi karena adanya musim kemarau yang cukup panjang sehingga intensitas usaha pengadaan air meningkat terutama di Gunungkidul. Nilai tambah lapangan usaha ini yang relatif kecil dibanding lapangan usaha yang lain, sehingga adanya perubahan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya.

Gambar 4.3. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2019



Industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, memiliki laju pertumbuhan yang di bawah pertumbuhan total PDRB, namun memiliki pangsa yang tinggi sehingga juga potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pertambangan dan penggalian yang sempat melejit hingga mencapai 2 (dua) digit di tahun 2018, kini tumbuh melambat, kurang dari 4 persen.

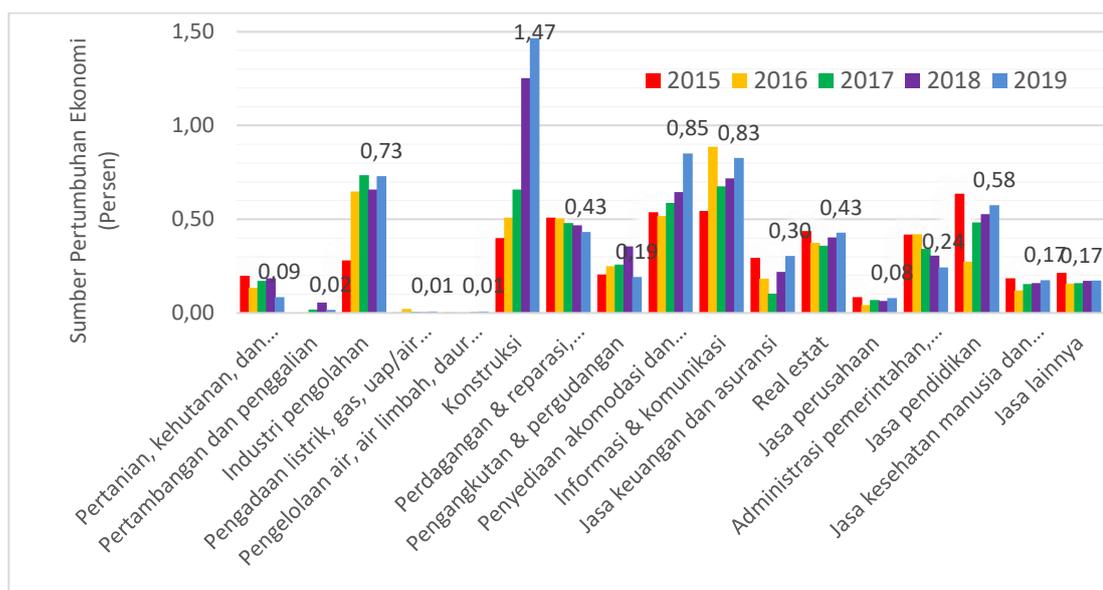
Meskipun pertumbuhannya lapangan usaha pertanian paling rendah di antara lapangan usaha yang lain atau berada dalam urutan terakhir, namun pangsa kontribusinya menempati urutan tertinggi keempat. Mengingat lapangan usaha ini masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk DIY maka lapangan usaha ini harus tetap

dipertahankan dan dikembangkan. Kendala utama dalam menjaga peran dan mengembangkan potensi lapangan usaha pertanian adalah semakin berkurangnya luas area pertanian akibat alih fungsi lahan.

Meningkat potensi ekonomi terbesar DIY adalah pariwisata, industri pengolahan (kategori C) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I) merupakan lapangan usaha yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain memiliki kontribusi yang besar, pertumbuhan keduanya juga tinggi. Berdasarkan hasil SE 2016, tercatat bahwa jumlah usaha industri pengolahan menurut skala usaha didominasi oleh usaha mikro dan kecil, yaitu 99,5 persen dari total usaha kategori industri pengolahan. Demikian juga untuk penyediaan akomodasi dan makan minum, didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil, yaitu 99,4 persen. Oleh karena skala usaha yang dominan adalah usaha mikro dan kecil, pengembangan kedua lapangan usaha tersebut masih menghadapi kendala yaitu keterbatasan kemampuan berproduksi.

Lapangan usaha informasi dan komunikasi terlihat sudah melewati masa puncak *booming*-nya. Sejak lima tahun terakhir, lapangan usaha ini tidak termasuk lagi dalam lima terbesar kontributor PDRB DIY. Namun, semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, lapangan usaha ini masih mempunyai prospek yang menjanjikan dalam upaya peningkatan PDRB DIY. Pengembangan lapangan usaha ini perlu didistribusikan secara proporsional ke kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Harapannya, pertumbuhan ekonomi akan menyebar ke wilayah lebih merata baik secara total maupun sektoral.

**Gambar 4.4. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019**



Peran setiap lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat diamati lebih lanjut dari andil pertumbuhannya. Masing-masing lapangan usaha memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2019. Berbeda dengan potensi yang dimiliki, kategori yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2019 yang sebesar 6,60 persen adalah kategori konstruksi dengan andil sebesar 1,47 persen. Selanjutnya diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,85 persen, dan informasi dan komunikasi dengan andil sebesar 0,83 persen. Urutan keempat dan kelima andil terbesar berikutnya adalah industri pengolahan dengan andil sebesar 0,73 persen dan jasa pendidikan dengan andil sebesar 0,58 persen. Sementara itu, kategori pertanian yang masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk hanya mampu memberikan andil bagi pertumbuhan sebesar 0,09 persen, semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

## 2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Luas wilayah DIY relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Secara administrasi, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kelima kabupaten/kota tentunya memiliki nilai PDRB yang berbeda-beda, namun pertumbuhan ekonominya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan hingga tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2019 berada pada kisaran 5,33 hingga 13,49 persen. Dibanding tahun sebelumnya, level pertumbuhan juga meningkat dan kesenjangan pertumbuhan antarkabupaten/kota semakin menyempit.

**Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2019 di DIY (persen), 2015-2019**

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	2015	2016	2017	2018*	2019***	Rata-rata 2015-2019	Andil Pertumbuhan 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kulonprogo	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49	8,71	1,07
2. Bantul	4,97	5,06	5,10	5,46	5,53	5,29	1,03
3. Gunungkidul	4,82	4,89	5,00	5,15	5,33	5,09	0,70
4. Sleman	5,18	5,25	5,35	6,37	6,49	5,86	2,20
5. Yogyakarta	5,09	5,11	5,24	5,48	5,96	5,45	1,59
<b>DIY</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>	<b>5,77</b>	<b>6,60</b>

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: \* angka sementara; \*\*\* angka sangat sementara

Pembangunan mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta termasuk sarana dan prasarana penunjangnya seperti pembangunan *under pass*, pelebaran jalan dan jembatan, menjadikan kabupaten Kulon Progo unggul dalam pertumbuhan dibandingkan empat kabupaten/kota yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo melejit mencapai 2 digit

sejak tahun 2018. Bahkan di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mencapai 13,49 persen dan menduduki posisi pertama. Kabupaten Sleman yang biasanya berada pada peringkat pertama tergeser ke posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 persen. Kota Yogyakarta yang biasanya menduduki peringkat kedua, tergeser menjadi peringkat ketiga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96 persen.

Perbedaan luas wilayah, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia, serta ketersediaan teknologi yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah dari luas wilayah DIY (46,63 persen), menciptakan nilai PDRB sebesar 18,89 triliun rupiah di tahun 2018 atau 13,36 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya kurang dari seperlima bagian dari luas wilayah DIY (sebesar 18,40 persen) mampu meraih total PDRB sebesar 12,02 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB DIY terendah yaitu 8,50 persen. Luas wilayah Kabupaten Sleman hampir sama dengan Kulon Progo, sekitar 18,04 persen dari luas wilayah DIY menghasilkan total PDRB sebesar 47,58 triliun rupiah atau sekitar 33,65 persen dari total PDRB DIY. Kabupaten Bantul memberikan sumbangan terhadap PDRB DIY sebesar 26,35 triliun rupiah atau sekitar 18,63 persen. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah DIY, memberikan sumbangan sebesar 36,60 triliun rupiah atau sekitar 25,88 persen terhadap total PDRB DIY. Lain dengan empat kabupaten yang lain, Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi nonpertanian dan non penggalian. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB DIY, terlihat hanya Kulon Progo saja yang meningkat persentase PDRBnya, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya menurun.

Perekonomian terlihat menggeliat di semua kabupaten/kota DIY. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota secara berangsur-angsur selama 2015- 2019. Kondisi ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan ekonomi wilayah di DIY secara bertahap.

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, andil PDRB Sleman terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 2,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2018 yang sebesar 6,60 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya dari Kota Yogyakarta yaitu 1,59 persen, dan diikuti oleh Kulon Progo sebesar 1,07 persen. Peningkatan andil pertumbuhan Kulon Progo dalam dua tahun terakhir ini, diakibatkan dari melesatnya pertumbuhan ekonomi dan memuncaki pertumbuhan ekonomi di DIY. Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo mencapai 13,49 persen di tahun 2019. Kali ini andil perekonomian Bantul sebesar 1,03 persen, lebih kecil dibandingkan Kulon Progo.

### C. PDRB per Kapita

Angka PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2019 tercatat sebesar 36,79 juta rupiah (Tabel 4.4). Jika dihitung berdasarkan harga konstan 2010, diperoleh PDRB

per kapita DIY sebesar 27,19 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010, merupakan data awal untuk mendapatkan angka pendapatan riil per kapita suatu wilayah. PDRB per kapita bermakna bahwa nilai PDRB DIY atas dasar harga konstan 2019 sebesar 104,49 triliun rupiah bila dibagi rata untuk setiap penduduk maka setiap penduduk memperoleh bagian sekitar 2,27 juta rupiah bulannya. Namun realita dalam kenyataan kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan tidaklah demikian. PDRB tidak terbagi merata seperti dalam hitungan matematis, sehingga PDRB per kapita tidak diartikan menjadi pendapatan riil per kapita. Angka PDRB per kapita dapat dimanfaatkan sebagai indikasi kebijakan agar pemerintah dapat menciptakan pemerataan implementasi dan juga hasil pembangunan di wilayahnya agar memberi dampak pada pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan antarpenduduk.

Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita DIY, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. berlaku (juta rupiah)	101.447.650	109.962.354	119.131.000	129.874.338	141.400.183
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	83.474.441	87.685.810	92.302.022	98.024.264	104.489.706
Penduduk pertengahan tahun (orang) <sup>1)</sup>	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872	3.842.932
PDRB per kapita adh. Berlaku:(rupiah)	27.573.470	29.552.527	31.665.527	34.151.646	36.794.870
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (rupiah)	22.688.352	23.565.677	24.534.270	25.776.378	27.190.100
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	8,02	7,18	7,15	7,85	7,74
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	3,75	3,87	4,11	5,06	5,48

Keterangan : 1) Hasil Backcasting dan Proyeksi SP 2010  
 \*) Angka sementara      \*\*) Angka sangat sementara  
 Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

#### D. Indeks Perkembangan Kategori

Hingga tahun 2019 kategori jasa keuangan di DIY memiliki indeks perkembangan atas dasar harga berlaku terbesar, yaitu 277,28. Indeks ini menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga 2019 lapangan usaha jasa keuangan mampu telah berkembang lebih dari dua setengah kali lipat. Namun, indeks perkembangan ini masih dipengaruhi kenaikan harga, sehingga perlu dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan. Jika dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan yang telah terbebas dari pengaruh inflasi, ternyata perkembangan kategori jasa keuangan menempati posisi tertinggi kedua, dengan indeks 186,78. Lapangan

## Bab 4 | PDRB menurut Lapangan Usaha

usaha informasi dan komunikasi berkembang lebih cepat bila dinilai atas dasar harga konstan dengan indeks perkembangannya sebesar 189,11 (Tabel 4.5).

**Tabel 4.5. Indeks Perkembangan PDRB DIY menurut Kategori, 2015-2019 (2010=100)**

Lapangan Usaha	PDRB Berlaku					PDRB Konstan				
	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>***)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	148,83	157,96	164,53	175,22	182,76	105,72	107,27	109,34	111,70	112,85
Pertambangan dan Penggalian	140,92	145,84	151,44	169,08	177,67	115,89	116,37	120,32	133,06	137,11
Industri Pengolahan	144,36	157,86	169,67	183,06	197,19	116,03	121,91	128,90	135,50	143,26
Pengadaan Listrik, Gas	124,58	149,68	183,35	196,89	213,53	134,81	154,03	160,12	165,42	174,41
Pengadaan Air	144,13	150,79	159,34	168,34	183,49	112,02	114,66	118,63	124,72	135,82
Konstruksi	153,63	166,36	182,96	215,93	254,16	126,58	133,43	142,81	161,48	184,71
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	162,10	180,66	198,59	216,78	232,80	134,95	143,13	151,32	159,71	167,95
Pengangkutan & Pergudangan	157,87	171,12	185,77	204,56	218,41	124,36	130,08	136,28	145,27	150,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,89	196,08	214,35	231,24	254,99	136,62	144,15	153,11	163,47	178,00
Informasi dan Komunikasi	133,30	144,84	158,23	170,17	182,44	143,76	155,72	165,29	176,00	189,11
Jasa Keuangan	197,72	212,76	227,86	250,64	277,28	150,23	157,73	162,16	172,11	186,78
Real Estat	158,21	173,41	186,05	200,58	219,97	135,22	142,15	149,13	157,39	166,72
Jasa Perusahaan	145,10	154,44	167,39	181,20	198,96	137,24	142,03	150,44	158,73	169,45
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	175,38	192,92	213,77	229,18	243,45	131,97	139,32	145,61	151,52	156,52
Jasa Pendidikan	158,41	165,99	178,65	194,06	212,01	137,14	141,36	149,16	158,12	168,51
Jasa Kesehatan	165,80	179,20	195,03	209,14	229,54	143,52	150,01	158,77	168,38	179,51
Jasa Lainnya	150,26	163,95	180,43	195,91	212,39	132,84	140,42	148,51	157,70	167,56
<b>PDRB</b>	<b>156,85</b>	<b>170,01</b>	<b>184,19</b>	<b>200,80</b>	<b>218,62</b>	<b>129,06</b>	<b>135,57</b>	<b>142,71</b>	<b>151,56</b>	<b>161,55</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY

Lapangan usaha informasi dan komunikasi serta jasa keuangan menjadi lapangan usaha dengan indeks perkembangan yang tinggi di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di DIY sudah modern karena sudah tersentuh oleh teknologi yang maju. Lapangan usaha ini termasuk *capital intensive* sehingga memerlukan perhatian pemerintah terutama dari sisi penggunaan tenaga kerja, baik jumlah maupun kualitas pendidikannya.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami perkembangan yang cepat adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 254,99, konstruksi sebesar 254,16, administrasi pemerintahan 243,45, dan perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 232,80. Sementara jika atas dasar harga konstan 2010, perkembangan tercepat dicapai oleh konstruksi, jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi

dan makan minum, dan pengadaan listrik, gas, dan air. Masing-masing mempunyai indeks perkembangan sebesar 184,71, 179,51, 178,00, dan 174,41. Urutan laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasa memang berbeda dengan laju perkembangan atas dasar harga berlaku karena fluktuasi harga mempengaruhi laju perkembangan atas dasar harga berlaku.

Sementara itu, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Bahkan, indeks perkembangan riil lapangan usaha pertanian ini paling rendah di antara semua lapangan usaha. Hal ini memberikan indikasi masih minimnya inovasi di usaha pertanian. Oleh karenanya untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, perlu terobosan teknologi agar pengelolaan usaha pertanian menghasilkan output produktivitas yang meningkat.

**E. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/Kota**

Secara sosial demografis, kelima wilayah administratif kabupaten/kota di DIY memiliki keterkaitan erat, sehingga tidak dapat dipisahkan dari **analisis spasial (tata ruang/geografis)** dalam melakukan analisis kinerja perekonomian,. Di tingkat provinsi, untuk membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antardaerah, dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi.

**Tabel 4.6. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2015–2019**

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	7.671.548	8.312.005	9.060.465	10.318.259	12.016.935
Bantul	19.325.203	20.913.086	22.611.707	24.443.274	26.345.477
Gunungkidul	13.798.657	14.980.281	16.199.842	17.540.149	18.889.873
Sleman	33.826.505	36.932.843	40.047.864	43.793.254	47.580.784
Kota Yogyakarta	26.791.936	28.895.413	31.309.045	33.818.853	36.599.057
<b>DIY</b>	<b>101.440.518</b>	<b>109.962.354</b>	<b>119.128.719</b>	<b>129.874.338</b>	<b>141.400.183</b>

*Keterangan:* \*) Angka sementara    \*\*) Angka sangat sementara

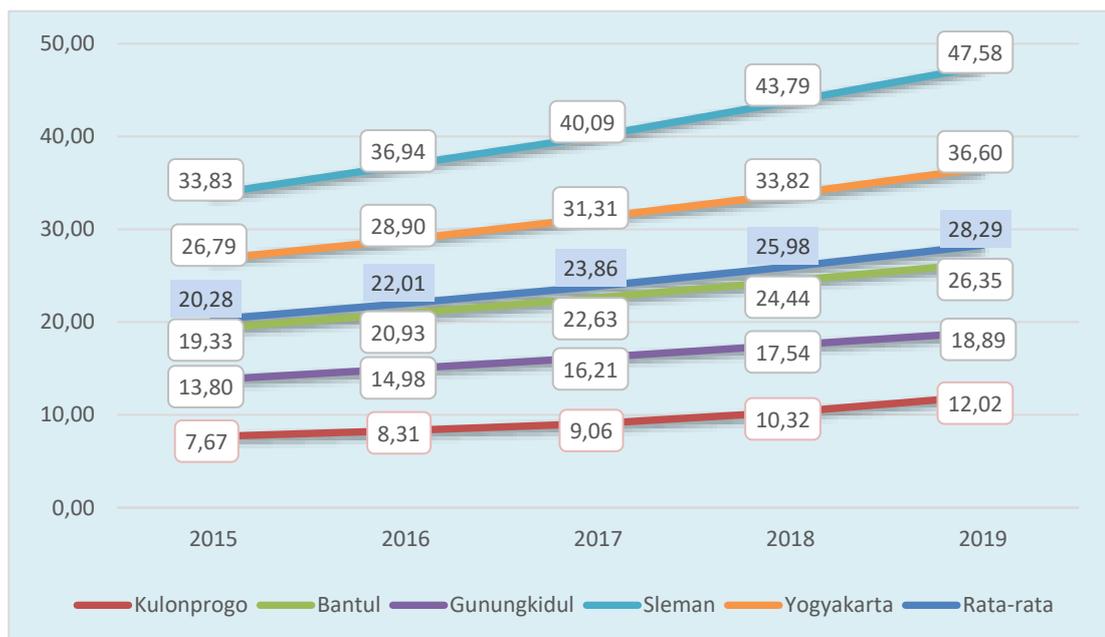
*Sumber :* BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Sebagai daerah penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman masih memiliki potensi untuk terus berkembang lebih cepat, sementara potensi perkembangan Kota Yogyakarta sudah mengarah ke titik jenuh. Kabupaten Bantul sebagai penyanggah kedua wilayah perkotaan juga berkembang relatif cepat. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo yang diharapkan akan melejit perkembangan ekonominya seiring dengan pembangunan mega proyek **Bandara**

**Internasional Yogyakarta** (BIY), secara absolut laju pertumbuhannya sudah melesat paling tinggi, namun nilainya masih paling kecil. Sementara Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dan kepariwisataan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Gunungkidul sudah menembus angka 5 persen sejak tahun 2017, namun untuk memacu perkembangannya, Gunungkidul masih membutuhkan suntikan investasi yang lebih tinggi.

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY pada periode tahun 2015-2019. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menjadi penopang utama perekonomian di DIY. Kabupaten Bantul berada pada level sekitar nilai rata-rata DIY. Sementara kinerja ekonomi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata-rata DIY dan jarak dengan rata-rata DIY juga masih relatif besar. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa kesenjangan nilai PDRB yang paling lebar adalah antara Kabupaten Sleman dengan Kulon Progo.

**Gambar 4.5. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah), 2015 - 2019**



Dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan keempat sampai dengan tahun 2019. Kegiatan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Lahan pertanian yang diusahakan di Gunungkidul sebagian besar merupakan lahan pegunungan berbatu sehingga sulit untuk memacu produktivitas pertanian terutama untuk komoditas padi dan sayuran yang memerlukan tanah yang subur dan banyak air. Sebaliknya, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terkecil, mampu mencapai nilai PDRB yang jauh lebih besar, yakni menempati urutan kedua. Hal ini sangat wajar, karena

selain merupakan pusat pemerintahan ibu kota DIY, juga sekaligus pusat aktivitas ekonomi nonpertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, mendukung semua aktivitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta, kecuali pertanian dan penggalian.

Komposisi struktur ekonomi masing-masing daerah menurut kategori menarik untuk dicermati karena dapat mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi antar kabupaten/kota. Struktur dan kontribusi kategori PDRB menurut lapangan usaha di kabupaten/kota di tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.7. Di Kabupaten Kulonprogo, lapangan usaha konstruksi tampak lebih unggul. Nilai tambah lapangan usaha ini mencapai sekitar Rp2,40 triliun atau sekitar 19,95 persen dari nilai PDRB Kulonprogo. Selanjutnya, lapangan usaha pertanian dan perdagangan, masing-masing menduduki peringkat kedua dan ketiga dengan kontribusi 15,86 persen dan 12,36 persen. Kabupaten Bantul dan Sleman memiliki struktur yang sama untuk kontributor PDRB peringkat 1 dan 3, yaitu lapangan usaha industri pengolahan menduduki peringkat pertama dan penyediaan akomodasi dan makan minum menempati peringkat ketiga. Selain merupakan pusat bisnis seperti supermarket, *hipermart*, rumah pertokoan, hotel, dan bisnis hiburan, kedua kabupaten tersebut juga menjadi sentra industri baik usaha mikro-kecil maupun usaha menengah-besar. Perbedaannya, pertanian masih menjadi andalan kedua di Kabupaten Bantul sedangkan konstruksi menjadi andalan kedua di Kabupaten Sleman. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan lapangan usaha pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Lapangan usaha ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar 4,43 triliun atau sekitar 23,48 persen dari PDRB Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul merupakan penghasil komoditas utama pertanian DIY, yaitu padi dan jagung. Bersama dengan Kabupaten Sleman, Gunungkidul merupakan penghasil terbesar padi di DIY. Namun untuk komoditas jagung, 85 persen jagung DIY dihasilkan oleh Gunungkidul. Sementara itu, penopang utama perekonomian di Kota Yogyakarta adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

**Tabel 4.7. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2019\*\*)**

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1.906.137	3.442.614	4.435.362	3.403.633	52.991
Pertambangan dan Penggalian	178.401	135.245	224.102	183.677	1.184
Industri Pengolahan	1.331.235	3.999.979	1.789.517	6.244.767	4.823.506
Pengadaan Listrik, Gas	10.022	37.927	17.866	54.69	81.767
Pengadaan Air	13.893	20.716	30.786	21.902	51.778
Konstruksi	2.397.087	2.569.857	1.955.967	5.978.725	2.872.931
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.484.752	2.277.891	1.778.363	3.704.461	2.742.495
Pengangkutan & Pergudangan	906.133	1.278.988	949.017	3.357.229	1.491.284
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	413.16	3.140.309	1.115.778	4.929.770	5.028.895

## Bab 4 | PDRB menurut Lapangan Usaha

Informasi dan Komunikasi	515.236	1.915.285	1.359.282	3.747.296	3.754.663
Jasa Keuangan	347.719	775.317	451.05	1.575.357	2.489.417
Real Estat	359.287	1.767.422	700.94	3.709.644	3.348.084
Jasa Perusahaan	29.365	128.329	83.039	797.241	396.039
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	962.944	2.010.644	1.784.315	3.174.206	3.703.369
Jasa Pendidikan	613.341	1.816.960	1.173.154	4.511.265	3.376.944
Jasa Kesehatan	154.736	488.347	379.949	1.118.210	1.388.276
Jasa Lainnya	393.486	539.647	661.387	1.068.711	995.433
<b>PDRB</b>	<b>12.016.935</b>	<b>26.345.477</b>	<b>18.889.873</b>	<b>47.580.784</b>	<b>36.599.057</b>

Keterangan : \*) Angka sementara; \*\*) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

Idealnya, pencapaian PDRB yang tinggi disertai pemerataan distribusi pendapatan penduduk supaya tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi. Indikator pemerataan pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, namun indeks gini dan PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat pendekatan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah kepada penduduknya. Konsep dan makna angka PDRB per kapita telah dijelaskan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks gini akan dibahas lebih jauh di Bab 6.

**Tabel 4.8. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di DIY (persen), 2017 - 2019**

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Konstruksi	9,10	13,34	19,95
	2. Pertanian	19,04	17,62	15,86
	3. Perdagangan	13,94	13,46	12,36
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,25	15,22	15,18
	2. Pertanian	13,85	13,63	13,07
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,73	11,69	11,92
Gunungkidul	1. Pertanian	24,47	24,21	23,48
	2. Konstruksi	9,65	10,03	10,35
	3. Industri Pengolahan	9,48	9,45	9,47
Sleman	1. Industri Pengolahan	13,30	13,19	13,12
	2. Konstruksi	10,93	11,78	12,57
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,29	10,16	10,36
Yogyakarta	1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,55	13,54	13,74
	2. Industri Pengolahan	13,47	13,26	13,18
	3. Informasi dan Komunikasi	10,45	10,41	10,26

Keterangan: \*) Angka sementara; \*\*) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasil hitungan PDRB per kapita kabupaten/kota di DIY menunjukkan kesenjangan pendapatan antarwilayah cukup besar. Sampai dengan tahun 2017 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 79,1 juta rupiah (Tabel 4.9). Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai PDRB-nya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sementara itu Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai PDRB paling tinggi mencatat PDRB per kapita sebesar 36,3 juta rupiah, jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Sleman cukup besar yaitu 2,8 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. PDRB per kapita terendah adalah Gunungkidul yaitu 23,8 juta rupiah. Sementara itu, Bantul dan Kulon Progo berbeda tipis, masing-masing 24,3 juta rupiah dan 24,1 juta rupiah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018 Kulon Progo mulai melampaui Gunungkidul. Kondisi ini masih mungkin berkembang selama dua hingga tiga tahun mendatang.

**Tabel 4.9. Nilai PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah), 2015-2019**

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	18.611.318	19.949.109	21.513.038	24.235.032	27.932.069
Bantul	19.891.904	21.280.083	22.741.440	24.280.787	25.869.428
Gunungkidul	19.291.212	20.737.011	22.220.787	23.824.927	25.432.994
Sleman	28.973.924	31.292.125	33.587.802	36.291.328	39.012.154
Yogyakarta	64.918.044	69.171.102	74.062.657	79.108.798	84.732.004
<b>DIY</b>	27.571.532	29.565.194	31.676.665	34.151.646	36.794.870

Keterangan: \*) Angka sementara; \*\*) Angka sangat sementara  
 Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

**F. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi**

Perekonomian provinsi-provinsi di Pulau Jawa mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa empat besar provinsi yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDB berada di Pulau Jawa, antara lain: DKI Jakarta (17,67 persen), Jawa Timur (14,63 persen), Jawa Barat (13,22 persen), dan Jawa Tengah (8,47 persen). Lebih jauh dapat dilihat bahwa lebih dari setengah bagian nilai PDB merupakan kontribusi dari Pulau Jawa, yakni 59,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih dominan di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh aktivitas industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Selanjutnya, sebagai pemegang kontribusi ekonomi terbesar kelima diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara (4,99 persen). Dilihat secara khusus di lingkup Pulau Jawa, perekonomian di seluruh provinsi meningkat. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami penurunan.

**Tabel 4.10. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2019**

PROPINSI	2019				
	ADHB (Juta Rp)	ADHK (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	
				Thd Pulau	Thd 34 Prov
<b>Sumatera</b>	<b>3,427,225,864.79</b>	<b>2,331,601,601.89</b>	<b>4.57</b>	<b>100.00</b>	<b>21.31</b>
01. Aceh	164,210,636.34	132,087,462.20	4.15	4.79	1.02
02. Sumatra Utara	801,733,339.98	539,526,595.25	5.22	23.39	4.99
03. Sumatra Barat	246,422,724.79	172,320,500.99	5.05	7.19	1.53
04. Riau	765,198,298.61	495,845,906.34	2.84	22.33	4.76
05. Jambi	217,711,779.47	149,264,615.38	4.40	6.35	1.35
06. Sumatra Selatan	455,232,776.78	315,622,619.36	5.71	13.28	2.83
07. Bengkulu	72,143,372.88	46,362,327.16	4.96	2.11	0.45
08. Lampung	360,663,624.81	244,436,794.49	5.27	10.52	2.24
09. Kep. Bangka Belitung	75,829,323.69	53,951,052.13	3.32	2.21	0.47
10. Kepulauan Riau	268,079,987.44	182,183,728.59	4.89	7.82	1.67
<b>Jawa</b>	<b>9,487,232,038.10</b>	<b>6,534,967,873.31</b>	<b>5.52</b>	<b>100.00</b>	<b>59.00</b>
11. DKI Jakarta	2,840,827,863.08	1,838,500,708.45	5.89	29.94	17.67
12. Jawa Barat	2,125,157,989.07	1,491,705,807.48	5.07	22.40	13.22
13. Jawa Tengah	1,362,457,380.57	992,105,788.08	5.41	14.36	8.47
14. DI Yogyakarta	141,400,183.08	104,489,706.37	6.60	1.49	0.88
15. Jawa Timur	2,352,425,220.74	1,650,143,150.60	5.52	24.80	14.63
16. Banten	664,963,401.57	458,022,712.33	5.53	7.01	4.14
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>492,164,495.62</b>	<b>326,171,152.64</b>	<b>5.07</b>	<b>100.00</b>	<b>3.06</b>
17. Bali	252,597,504.04	162,783,940.20	5.63	51.32	1.57
18. Nusa Tenggara Barat	132,674,150.90	94,014,743.09	4.01	26.96	0.83
19. Nusa Tenggara Timur	106,892,840.68	69,372,469.35	5.20	21.72	0.66
<b>Kalimantan</b>	<b>1,294,475,095.85</b>	<b>919,679,475.13</b>	<b>4.99</b>	<b>100.00</b>	<b>8.05</b>
20. Kalimantan Barat	212,318,428.46	137,121,182.17	5.00	16.40	1.32
21. Kalimantan Tengah	150,283,195.64	100,428,666.02	6.16	11.61	0.93
22. Kalimantan Selatan	180,737,964.03	133,317,865.77	4.08	13.96	1.12
23. Kalimantan Timur	653,677,102.66	486,977,181.13	4.77	50.50	4.07
24. Kalimantan Utara	97,458,405.05	61,834,580.04	6.91	7.53	0.61
<b>Sulawesi</b>	<b>1,018,122,014.51</b>	<b>686,020,804.63</b>	<b>6.65</b>	<b>100.00</b>	<b>6.33</b>
25. Sulawesi Utara	130,201,361.04	89,028,050.78	5.66	12.79	0.81
26. Sulawesi Tengah	166,402,665.13	111,003,073.76	7.15	16.34	1.03
27. Sulawesi Selatan	504,746,873.15	330,605,132.61	6.92	49.58	3.14
28. Sulawesi Tenggara	129,260,128.71	94,078,149.32	6.51	12.70	0.80
29. Gorontalo	41,150,593.35	28,432,866.65	6.41	4.04	0.26
30. Sulawesi Barat	46,360,393.14	32,873,531.52	5.66	4.55	0.29
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>360,037,235.30</b>	<b>254,443,235.30</b>	<b>-7.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2.24</b>
31. Maluku	46,257,180.82	31,108,758.91	5.57	12.85	0.29
32. Maluku Utara	39,715,966.50	26,586,034.33	6.13	11.03	0.25
33. Papua Barat	84,347,692.51	62,070,804.32	2.66	23.43	0.52
34. Papua	189,716,395.47	134,677,637.74	-15.72	52.69	1.18

Kontribusi PDRB DIY terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Pulau Jawa meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 0,01 poin. Kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa menjadi 1,48 persen dan kontribusi terhadap 34 provinsi di Indonesia menjadi 0,88 persen. Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 6,60 persen. Sudah dua tahun ini DIY mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Jika tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi DIY menduduki peringkat 10 dari 34 provinsi, tahun ini pertumbuhan ekonomi DIY menduduki peringkat ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan

Kalimantan Utara. Meskipun pertumbuhan ekonomi DIY relatif tinggi bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, namun andil terhadap pertumbuhan PDB termasuk rendah (0,06 persen) karena kontribusi DIY terhadap pembantuan PDB relatif kecil, kurang dari 1 persen. Hal ini memberikan tantangan terhadap perencanaan pembangunan DIY untuk dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan terutama untuk lapangan usaha potensial atau komoditas unggulan.

Sementara itu, di tingkat regional Kawasan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), posisi PDRB DIY berada di atas NTB dan NTT, tetapi di bawah Bali, dan semua provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa DIY masih berada di peringkat ke-7 di antara 9 provinsi di kawasan Jabalnusra, posisinya sama dengan tahun sebelumnya.



## **BAB 5**

### **PDRB MENURUT PENGELUARAN**

A. Struktur PDRB Pengeluaran

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran





## BAB V

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai PDRB dari sisi pengeluaran (*expenditure*). PDRB menurut pengeluaran menjelaskan alokasi pengeluaran nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*). Komponen yang dihitung dalam PDRB menurut pengeluaran meliputi pengeluaran untuk konsumsi akhir baik rumah tangga, pemerintah, maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri, ekspor antardaerah, dan impor antardaerah, serta perubahan inventori. Sesuai kebutuhan, ekspor-impor kadang disajikan menjadi satu yaitu ekspor neto baik ekspor-impor luar negeri maupun ekspor-impor antardaerah.

### A. Struktur PDRB Pengeluaran

#### 1. Konsumsi Rumah Tangga

Perkembangan ekonomi secara umum sangat dipengaruhi oleh besaran serta pola dari setiap komponen permintaan akhir. Setiap komponen memiliki sifat yang khas mengikuti kondisi perekonomian yang terjadi serta kebijakan ekonomi yang diambil. Secara umum dan mencari ciri khas perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama roda perekonomian dari sisi pengeluaran. Demikian pula dengan perekonomian DIY, sebagian besar pendapatan yang diperoleh masih digunakan untuk memenuhi permintaan akhir konsumsi rumah tangga.

Kinerja perekonomian DIY tahun 2019 mengalami percepatan positif. Secara nominal PDRB DIY dari tahun ke tahun terus meningkat. Ditinjau atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB Provinsi DIY meningkat dari sekitar 101,4 triliun di tahun 2015 menjadi 141,4 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 92,5 triliun dari total nilai PDRB DIY yang sebesar Rp 141,4 triliun atau mencapai sekitar 65,39 persen. Pangsa konsumsi rumah tangga ini sedikit lebih rendah dibanding dengan pangsa 2018 yang sebesar 66,8 persen. Sisi positif yang menguntungkan dari kondisi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam struktur pengeluaran PDRB adalah mencerminkan aktivitas ekonomi yang bergairah dan permintaan domestik yang lebih stabil. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi DIY, sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk DIY. Perekonomian yang ditopang oleh konsumsi domestik merupakan aset yang bisa untuk menjaga pertumbuhan di

tengah gejolak perekonomian global. Namun, di sisi lain perlu disadari bahwa komponen ini bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal. Oleh karena itu harus ada kesesuaian dengan komponen lainnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dari sisi pengeluaran, yaitu perlunya dorongan dari investasi dan kinerja ekspor yang lebih optimal.

**Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2015–2019**

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	68.730.528	74.429.796	81.335.810	86.753.197	92.459.989
a. Makanan dan Minuman	28.969.375	31.379.792	33.878.342	36.043.724	38.532.497
b. Bukan Makanan	39.761.153	43.050.003	47.457.468	50.709.473	53.927.491
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	3.171.193	3.225.070	3.756.395	4.095.046	4.613.732
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	17.214.154	18.321.761	19.508.072	21.346.113	22.458.454
4. Pembentukan modal tetap bruto	30.798.881	33.428.978	37.111.436	43.173.678	49.519.128
5. Perubahan Inventori	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126
6. Ekspor Luar Negeri	6.266.264	6.495.282	7.436.959	8.749.632	8.970.892
7. Impor Luar Negeri	5.066.145	5.922.732	6.530.719	7.206.068	6.934.236
8. Net Ekspor Antardaerah	(20.826.153)	(21.311.589)	(24.857.418)	(28.472.751)	(31.188.901)
<b>P D R B</b>	<b>101.440.518</b>	<b>109.962.354</b>	<b>119.128.719</b>	<b>129.874.338</b>	<b>141.400.183</b>

Keterangan: \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sementara  
 Sumber : BPS Provinsi DIY

Selain dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, yaitu produk barang dan jasa dinilai dengan harga pada tahun dasar, yaitu tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB ADH Konstan di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

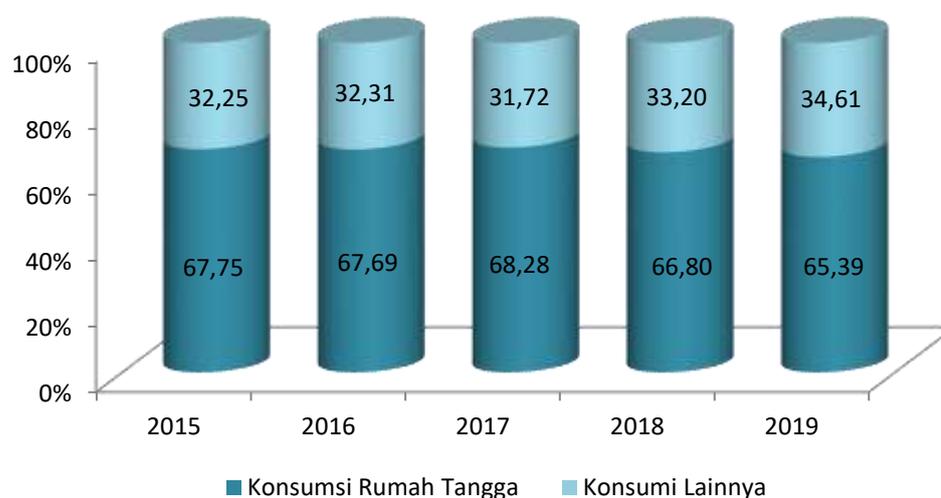
Tabel 5.2 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi DIY selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik pada PDRB ADHB maupun ADHK komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi pengeluaran.

Tabel 5.2. Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran di DIY (juta rupiah), 2015–2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	50.193.386	52.619.164	55.364.064	57.552.317	59.745.355
a. Makanan dan Minuman	19.195.190	19.920.604	20.834.663	21.570.908	22.372.280
b. Bukan Makanan	30.998.196	32.698.560	34.529.401	35.981.409	37.373.076
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2.384.374	2.362.344	2.589.250	2.657.427	2.911.995
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	12.719.134	12.949.746	13.104.559	13.559.566	13.983.252
4. Pembentukan modal tetap bruto	22.286.615	23.616.948	24.791.862	27.313.862	29.973.484
5. Perubahan Inventori	974.645	1.045.164	1.066.314	1.104.088	1.137.665
6. Ekspor Luar Negeri	4.416.252	4.400.889	4.808.527	5.424.803	5.420.877
7. Impor Luar Negeri	3.728.749	4.492.511	4.905.222	5.210.391	4.740.934
8. Net Ekspor Antardaerah	(5.771.205)	(4.815.934)	(4.519.110)	(4.377.409)	(3.941.988)
<b>P D R B</b>	<b>83.474.452</b>	<b>87.685.810</b>	<b>92.300.244</b>	<b>98.024.264</b>	<b>104.489.706</b>

Keterangan : \* angka sementara; \*\* angka sangat sementara  
 Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2015-2019



Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Bila dilihat lebih jauh menurut jenis barang yang dikonsumsi rumah tangga, selama periode 2015-2019 persentase konsumsi bukan makanan selalu lebih besar dibandingkan

konsumsi makanan (Tabel 5.3). Pada tahun 2019, porsi konsumsi makanan dan bukan makanan sebesar 27,25 persen dan 38,14 persen terhadap total PDRB. Pengaruh pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi terhadap PDRB mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat tidak terdominasi untuk makanan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 5.3. Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015 – 2019**

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	67,75	67,69	68,28	66,80	65,39
a. Makanan dan Minuman	28,56	28,54	28,44	27,75	27,25
b. Bukan Makanan	39,20	39,15	39,84	39,05	38,14
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	3,13	2,93	3,15	3,15	3,26
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	16,97	16,66	16,38	16,44	15,88
4. Pembentukan modal tetap bruto	30,36	30,40	31,15	33,24	35,02
5. Perubahan Inventori	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
6. Ekspor Luar Negeri	6,18	5,91	6,24	6,74	6,34
7. Impor Luar Negeri	4,99	5,39	5,48	5,55	4,90
8. Net Ekspor Antardaerah	-20,53	-19,38	-20,87	-21,92	-22,06
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY

Tabel 5.3 menunjukkan besarnya kontribusi seluruh komponen terhadap total PDRB. PDRB DIY masih dominan ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kecenderungan menurunnya ekspor dan impor luar negeri di satu sisi mengurangi atau menambah cadangan devisa yang tersedia, namun di sisi lain mencerminkan adanya geliat peningkatan produksi dalam negeri. Net ekspor antardaerah cenderung menurun, artinya nilai arus barang dan jasa yang masuk lebih besar dibandingkan dengan yang keluar. Sisi positifnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk konsumsi akhir maupun konsumsi antara meningkat karena menggeliatnya ekonomi DIY. Namun menurunnya porsi net ekspor antardaerah juga bisa bermakna terbatasnya penyediaan untuk memenuhi konsumsi internal daerah. Oleh karena itu kondisi ini dapat menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya untuk menyiapkan berbagai insentif investasi yang mudah dalam birokrasinya. Sasaran lebih jauh dari kebijakan tersebut adalah untuk dapat mendorong

pembangunan industri berorientasi ekspor dan pabrikan yang menghasilkan produk kebutuhan di wilayah domestik.

## 2. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Di Provinsi DIY, konsumsi akhir LNPRT memiliki besaran dan kontribusi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan komponen lainnya pada PDRB menurut pengeluaran. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, diharapkan peranan LNPRT bagi perekonomian DIY semakin meningkat. Tabel berikut menunjukkan peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB DIY selama lima tahun terakhir.

**Tabel 5.4 Perkembangan dan Struktur Konsumsi LNPRT DIY, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi LNPRT (Miliar Rupiah)</b>					
a. ADHB	3.171	3.225	3.756	4.095	4.614
b. ADHK 2010	2.384	2.362	2.589	2.657	2.912
<b>Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)</b>	<b>3,13</b>	<b>2,93</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,26</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>2,90</b>	<b>-0,92</b>	<b>9,61</b>	<b>2,63</b>	<b>9,58</b>

Secara nominal, dalam lima tahun terakhir total konsumsi LNPRT baik ADHB maupun ADHK cenderung mengalami peningkatan. Kontribusi LNPRT terhadap PDRB DIY relatif sama, pada kisaran 3 persen terhadap total PDRB DIY.

Dari sisi pertumbuhannya, selama lima tahun terakhir komponen LNPRT cukup berfluktuasi. Pertumbuhan komponen ini berturut-turut 2,90 persen, -0,92 persen, 9,61 persen 2,63 persen dan 9,58 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2019, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,61 persen dan 9,58 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut merupakan dampak adanya momentum pelaksanaan pelaksanaan pilkada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 serta Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada tahun 2019.

## 3. Konsumsi Pemerintah

Dalam tatanan kehidupan bernegara, lembaga eksekutif pemerintah bukan hanya sebagai penyusun regulasi atau pembuat kebijakan dalam mengatur kehidupan bernegara, namun juga sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, yakni sebagai konsumen akhir melalui instrumen belanja pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat masih sangat dibutuhkan, seperti sebagai penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah juga bisa hadir dalam bentuk intervensi program yang diperuntukkan membantu penduduk yang berpenghasilan rendah berupa subsidi atau dalam bentuk hibah. Kegiatan-kegiatan tersebut selain membutuhkan anggaran yang tertuang dalam RAPBN/RAPBD, juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

**Tabel 5.5 Perkembangan dan Struktur Konsumsi Pemerintah DIY, 2015-2019**

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018<sup>*)</sup></b>	<b>2019<sup>**)</sup></b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rupiah)</b>					
a. ADHB	17.214	18.322	19.508	21.346	22.458
b. ADHK 2010	12.719	12.950	13.105	13.560	13.983
<b>Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)</b>	<b>16,97</b>	<b>16,66</b>	<b>16,38</b>	<b>16,44</b>	<b>15,88</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>5,50</b>	<b>1,81</b>	<b>1,20</b>	<b>3,47</b>	<b>3,12</b>

Secara total komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 17.214 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga mencapai 22.458 miliar rupiah pada tahun 2019. Selama periode 2015-2019, kontribusi konsumsi pemerintah cenderung berfluktuasi meskipun relatif stabil, dengan kisaran nilai 15,88 persen sampai dengan 16,97 persen (Tabel 5.5). Indikasi ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian DIY cukup stabil, baik melalui kebijakan perencanaan maupun dalam tahapan implementasi pembangunan tahun demi tahun. Konsumsi pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, nilai tambah belanja modal, output Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

#### **4. Investasi**

Kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memerlukan penanaman modal atau investasi untuk menggerakkannya. Investasi dipenuhi dari penanaman modal domestik maupun asing. Investasi digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya peningkatan investasi baru sudah seharusnya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi

selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dalam buku *A System of National Accounts (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, berbentuk barang setengah jadi, barang input yang belum digunakan, atau juga berbentuk barang jadi yang belum terjual. **Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori.**

Pada tahun 2019 nilai PMTB di DIY mencapai Rp 49,5 triliun atau naik sekitar Rp 6,3 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 43,2 triliun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp 6,1 triliun. Sementara secara total investasi fisik 2019 sebesar Rp 51 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat, nilai investasi meningkat lebih dari 60 persen. Naiknya investasi tersebut selain sebagai dampak dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan, pengangkutan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, yang utamanya disebabkan adanya mega proyek *Yogyakarta International Airport (YIA)*. Pertumbuhan komponen PMTB tahun 2019 mencapai sebesar 9,74 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi selama satu dekade terakhir.

Peran investasi terhadap perekonomian daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sumbangan investasi fisik terhadap PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 sebesar 31,50 persen naik menjadi 36,08 persen di tahun 2019 (Tabel 5.6). Peningkatan kontribusi tersebut didominasi oleh komponen PMTB yang naik dari 33,24 persen menjadi 35,02 persen.

Dalam menggerakkan roda perekonomian, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya investasi yang masuk namun perlu dilihat seberapa efektif investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam pembahasan ini, ICOR yang digunakan adalah konsep ICOR yang dihitung dengan *time-lag* 0. Artinya, investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Dilihat dari angka sementara ICVAR DIY dalam periode tahun 2015–2019, dapat dimaknai bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan sudah mulai menunjukkan kemajuan, meskipun masih sedikit kurang efisien. Pada tahun 2015 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,90 persen. Di tahun 2019 pertumbuhan kebutuhan investasi yang diperlukan menunjukkan penurunan, yaitu 4,81 persen. Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen pertumbuhan investasi yang diperlukan menjadi sebesar 4,81 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa ICVAR (ICOR) ini hasil penghitungan dengan *time-lag 0*, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang. Sehingga, manfaat investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru akan dirasakan pada tahun-tahun mendatang. Pembahasan lebih rinci tentang ICOR selanjutnya akan diuraikan pada publikasi Analisis ICOR DIY.

**Tabel 5.6. Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2015–2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PMTB (juta rupiah)	30.798.881	33.428.978	37.111.436	43.173.678	49.519.128
Share thd. PDRB (persen)	30,36	30,40	31,15	33,24	35,02
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126
Share thd. PDRB (persen)	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
3. PMTB + Perubahan Inventori (juta rp)	31.950.678	34.724.766	38.479.620	44.609.170	51.020.254
(persen)	31,50	31,58	32,30	34,35	36,08
4. ICOR, Investasi = PMTB (lag 0)	5,66	5,61	5,37	4,77	4,64
5. ICOR, Investasi = PMTB + Perubahan Inventori (lag 0)	5,90	5,84	5,60	4,96	4,81

Keterangan : \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY, data diolah

## 5. Ekspor dan Impor

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri atas produk barang maupun jasa. Demikian halnya dalam aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah), maupun PMTB dan inventori di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor.

Terjadinya aktivitas ekspor-impor tidak selalu berawal dari komunikasi formal pemerintah namun bisa bermula dari komunikasi atau transaksi perdagangan yang terjadi antara wisatawan dan pedagang, atau antarpenduduk di perbatasan wilayah. Aktivitas ekonomi lebih lanjut dari proses tersebut dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik lebih luas bahkan juga ke daerah-daerah lain. Produk sektor industri mempunyai pangsa transaksi komoditas yang cukup dominan dalam kegiatan ekspor antarprovinsi, sedangkan jasa hotel, restoran, jasa angkutan, dan jasa informasi dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan merupakan bentuk transaksi ekspor jasa.

Sebagai kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya, DIY memiliki potensi yang besar dalam komponen ekspor dan impor ini, baik ekspor/impor barang maupun jasa. Kinerja pemerintah dalam mendorong pembangunan kepariwisataan serta industri kreatif dan inovatif ditunjukkan dengan makin berkembangnya industri kerajinan khas DIY baik industri makanan/minuman maupun industri barang dan jasa lain. Sebagian produk industri tersebut menjadi komoditas ekspor. Sebaliknya, oleh karena Yogyakarta menjadi destinasi utama kegiatan wisata dan pendidikan, dampak kegiatan ekonomi yang timbul adalah DIY menjadi pusat pemasaran bagi produk-produk dari daerah lain atau impor dari luar negeri.

Aktivitas ekspor dan impor adalah indikator penerapan perekonomian terbuka di suatu wilayah. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya ekspor impor, antara lain disebabkan karena kelebihan atau kekurangan produk barang dan jasa di suatu wilayah/negara, motivasi untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan, perbedaan kekayaan sumber daya antar wilayah/negara, serta perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik (residen) tetapi diperuntukkan bagi konsumsi oleh pihak luar negeri (*nonresiden*). Berbeda dengan ekspor, komponen impor mencatat tambahan penyediaan (*supply*) produk barang dan jasa di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari luar negeri atau non residen.

Nilai ekspor luar negeri Provinsi DIY tahun 2019 tercatat sebesar 8,97 triliun rupiah. Pada periode 2015-2019, DIY mengalami surplus perdagangan luar negeri dengan nilai tertinggi dicapai pada periode tahun 2019 yaitu sebesar 2 triliun rupiah. Dibandingkan tahun 2018 surplus perdagangan luar negeri DIY tahun 2019 meningkat sebesar 493 milyar rupiah.

Sementara itu, komponen impor luar negeri DIY selama tahun 2015-2019 juga tumbuh berfluktuasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, impor tertinggi terjadi di tahun 2019. Tingginya nilai impor dan lebih kecilnya nilai ekspor mengakibatkan net ekspornya tumbuh negatif.

Selama kurun waktu 2015-2019 nilai komponen ekspor neto antarprovinsi DIY bernilai negatif. Artinya, nilai impor barang dan jasa yang masuk DIY melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan barang dan jasa dari luar provinsi jauh lebih besar. Barang dan jasa impor tersebut dapat berkaitan dengan kegiatan sektor pertanian maupun sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan yang tercatat pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu daerah terhadap produk dari daerah lain.

Tingginya konsumsi impor ini, untuk DIY lebih banyak bernilai positif karena menggerakkan sektor produksi yang ada dan menunjukkan geliat ekonomi di DIY. Namun perkembangan ekspor antarprovinsi perlu dipantau karena menjadi beban bagi perencanaan bila hanya menjadi pasar ekspor barang/jasa dari luar DIY. Kekurangan pasokan kebutuhan barang dan jasa seharusnya menjadi peluang bagi produsen/penyedia dari lokal DIY dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada dan menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya untuk menyiapkan berbagai insentif investasi yang mudah dalam birokrasinya untuk dapat mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor dan pabrikan yang menghasilkan produk kebutuhan di wilayah domestik.

Dalam kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan ekspor luar negeri sebesar 5,26 persen sedangkan impor 6,19 persen. Kecenderungan meningkatnya impor luar negeri di satu sisi mengurangi cadangan devisa yang tersedia, namun di sisi lain peningkatan impor berupa barang modal mencerminkan adanya geliat peningkatan permintaan produksi. Rata-rata pertumbuhan ekspor antardaerah tahun 2019 mencapai -9,09 persen yang dipicu diantaranya oleh terjadinya kontraksi sebesar 16,55 persen di tahun 2016. Pada tahun 2019 net ekspor antardaerah mengalami kontraksi sebesar 9,95 persen.

## **B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran**

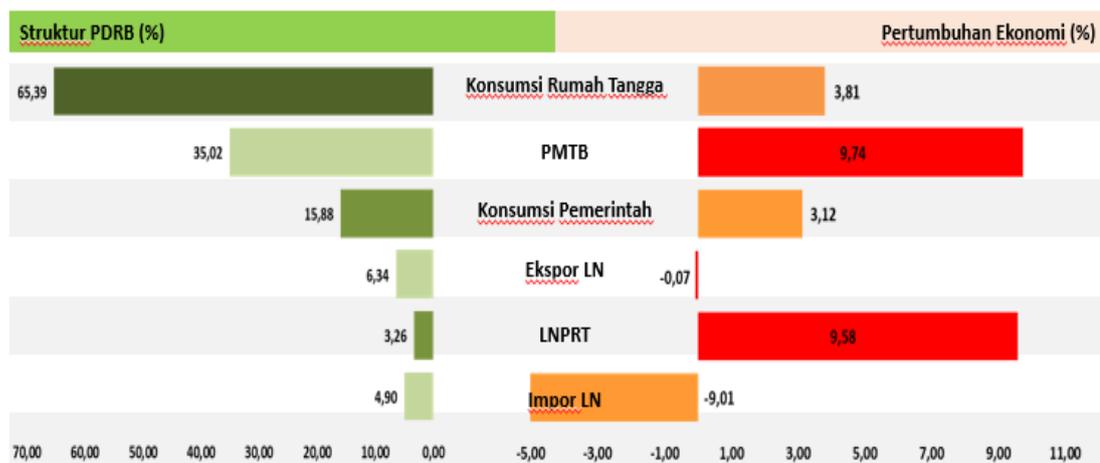
Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan juga menjadi asumsi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam setiap perumusan kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, selain upaya untuk menekan laju inflasi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, maupun untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2003). Sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian di suatu negara atau daerah dalam periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin

dicapai oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Kondisi perekonomian DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang positif. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Selama kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi DIY tercatat pada kisaran 4,95 – 6,60 persen. Pertumbuhan ekonomi DIY selama kurun waktu tersebut secara rata-rata mencapai 5,77 persen per tahun, dengan angka pertumbuhan di masing-masing tahun sebesar 4,95 persen (2015); 5,05 persen (2016); 5,26 persen (2017); 6,20 persen (2018); dan 6,60 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (6,60 persen), sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 (4,95 persen).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi LNPR (PK-LNPR), pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sementara komponen lainnya yaitu ekspor dan impor luar negeri dan net ekspor antardaerah mengalami kontraksi. Komponen PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan mencapai 9,74 persen; diikuti PK-LNPR sebesar 9,58 persen. Sementara itu komponen pengeluaran lainnya tumbuh di bawah 4 persen. Capaian pertumbuhan PMTB didorong oleh megaprojek bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang juga mulai mendorong investasi di sektor yang lain.

Gambar 5.2. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di DIY. 2019



Meskipun struktur pengeluaran di DIY didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, namun komponen ini hanya mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,81 persen di tahun 2019. Menurut jenis komponen pengeluaran rumah tangga, antara kelompok

makanan dan bukan makanan tumbuh cukup baik, yaitu masing-masing sebesar 3,72 persen dan 3,87 persen. Pertumbuhan kelompok makanan lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,53 persen. Sebaliknya, pertumbuhan kelompok bukan makanan tahun 2019 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir (Tabel 5.7).

**Tabel 5.7. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015–2019**

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	4,74	4,83	5,22	3,95	3,81	4,45
a. Makanan dan Minuman	3,80	3,78	4,59	3,53	3,72	3,90
b. Bukan Makanan	5,32	5,49	5,60	4,21	3,87	4,79
2. Pengeluaran konsumsi LNPR	2,90	-0,92	9,61	2,63	9,58	5,12
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	5,50	1,81	1,20	3,47	3,12	2,40
4. Pembentukan modal tetap bruto	4,34	5,97	4,97	10,17	9,74	7,69
5. Perubahan Inventori	4,73	7,24	2,02	3,54	3,04	3,94
6. Ekspor Luar Negeri	3,23	-0,35	9,26	12,82	-0,07	5,26
7. Impor Luar Negeri	15,49	20,48	9,19	6,22	-9,01	6,19
8. Net Ekspor Antardaerah	-5,39	-16,55	-6,16	-3,14	-9,95	-9,09
<b>P D R B</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>	<b>5,77</b>

Keterangan: \*) angka sementara; \*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

## **BAB 6**

### **ANALISIS INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DIY**

- A. Pertumbuhan Ekonomi
- B. Stabilitas Harga
- C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran
- D. Kemiskinan dan Ketimpangan
- E. Potensi dan Disparitas Ekonomi Kewilayahan
- F. Pembangunan Manusia





## BAB VI

### ANALISIS INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DIY

Pembangunan merupakan proses multidimensional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Untuk mengukur capaian pembangunan tersebut indikator pembangunan yang digunakan tidak hanya indikator ekonomi, namun ada indikator sosial dan juga indikator lintas sektor.

Saat ini indikator strategis yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dan menjadi tolok ukur dalam perencanaan pembangunan mendatang di antaranya adalah inflasi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, gini ratio (rasio gini), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator strategis, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan adalah pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran serta membuka kesempatan kerja yang luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi sasaran target dalam perencanaan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup bila ternyata belum mampu menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi seharusnya juga diperhatikan, yaitu: pertumbuhan yang diiringi oleh pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

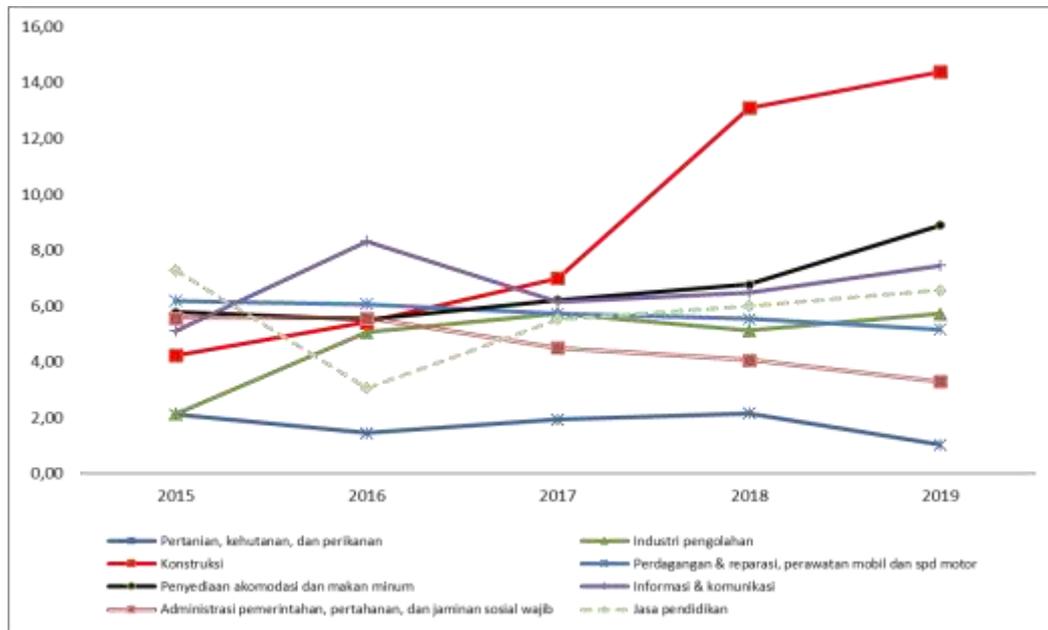
##### 1. Pertumbuhan Ekonomi

###### a. Tren Pertumbuhan Kategori

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk merepresentasikan fenomena ekonomi makro suatu negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bermakna perkembangan kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang tercermin pada peningkatan output per kapita sehingga mendorong atau memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, atau dalam bahasa lain meningkatkan daya beli masyarakat.

Kinerja perekonomian DIY tahun 2019 mengalami percepatan. Selama kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi DIY sudah pada kondisi tren yang menggembirakan. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,77 persen per tahun, tetapi pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan akselerasi pada lima tahun terakhir.

Gambar 6.1. Pertumbuhan Kategori-Kategori dengan Pangsa Terbesar dalam PDRB DIY (persen), 2015-2019



DIY berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup gemilang pada tahun 2019, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60 persen. Kondisi ekonomi DIY dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi cukup membanggakan. Dalam dua tahun terakhir terakhir ekonomi DIY tumbuh ditopang sektor domestik, utamanya investasi bangunan konstruksi proyek strategis nasional Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Pada gambar 6.1 terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir konstruksi mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat menonjol. Selain itu pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB DIY, antara lain yaitu industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan. Dilihat tren pertumbuhan, kategori konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum mempunyai prospek semakin membaik.

Keberadaan bandara YIA akan mendorong *multiplier effect* cukup besar, baik dari sisi akselerasi perekonomian sekitar, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan. Investasi bangunan akan tumbuh seiring berkembangnya Kawasan *Aeotropolis*, pembangunan infrastruktur akses jalur kereta api, hingga perhotelan.

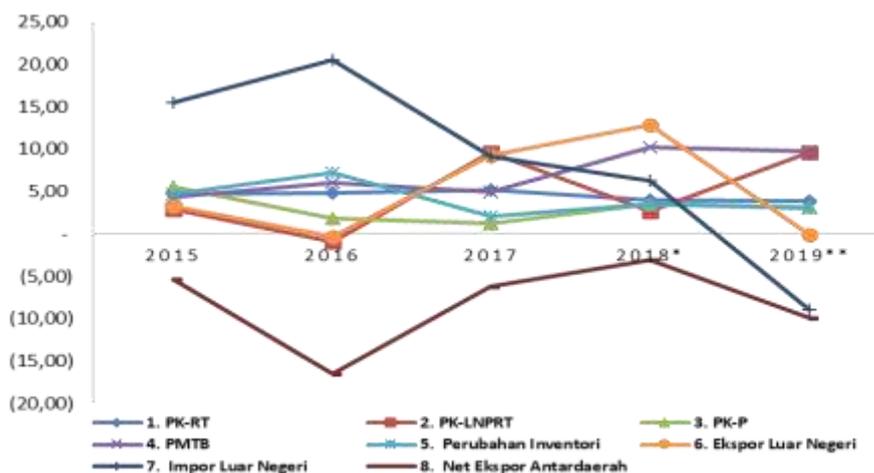
**b. Tren Pertumbuhan Konsumsi**

Pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran dibangun oleh 8 (delapan) komponen utama, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap

bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan ekspor antardaerah netto. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Oleh karena itu dalam pembahasan ini pengamatan tren pertumbuhan PDRB sisi pengeluaran difokuskan pada empat komponen tersebut.

Pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2015-2019 terlihat menunjukkan arah perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2019 pertumbuhan lebih banyak dikendalikan oleh kegiatan pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumsi LNPRT, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun tidak demikian dengan ekspor dan impor luar negeri yang menunjukkan kontraksi. Demikian pula dengan komponen ekspor neto antarprovinsi yang bernilai negatif, yang berarti nilai impor barang dan jasa yang masuk DIY melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan barang dan jasa dari luar provinsi jauh lebih besar. Pertumbuhan yang tercatat pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu daerah terhadap produk dari daerah lain. Impor luar negeri merupakan faktor pengurang dalam PDRB. Bila impor luar negeri tidak dikondisikan dengan baik dalam jangka panjang akan mempengaruhi cadangan devisa DIY.

**Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran (persen), 2015-2019**



Dengan demikian, dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi DIY digerakkan oleh semua komponen. Selama kurun waktu 2015-2019 pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka 4,95 hingga 6,60 persen per tahun. Meskipun pertumbuhannya tidak tinggi namun relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,77 persen. Rata-rata pertumbuhan ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan periode 2014-2018 yang sebesar 5,36 persen.

Dari sisi pengeluaran, tren pertumbuhan ekonomi juga mencatatkan bahwa DIY masih menjadi ladang pemasaran produk luar provinsi baik dari hasil produk pertanian maupun industri pengolahan. Hal ini menyangkut kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang harus disuplai dari luar provinsi karena produksi lokal tidak mencukupi. Sementara dari industri pengolahan penyebab tingginya impor ditengarai dari bahan baku industri besar-sedang dan juga industri mikro-kecil DIY yang didatangkan dari luar provinsi bahkan harus impor dari luar negeri.

### 2. Sebaran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada level provinsi pada hakikatnya merupakan agregasi atau gabungan dari pertumbuhan semua wilayah kabupaten/kota yang berada di bawahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki andil atau kontribusi pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan ukuran ekonomi maupun tingkat perubahannya. Besarnya andil pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh arah kebijakan pembangunan yang dijalankan apakah terpusat di suatu wilayah tertentu atau tersebar secara merata di seluruh wilayah.

Kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap struktur perekonomian DIY 2015-2019 cukup bervariasi. Secara umum, Kabupaten Sleman memiliki kontribusi nilai tambah terbesar dengan proporsi mencapai 33,64 persen terhadap total PDRB DIY 2019 dan diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 25,88 persen. Kedua wilayah ini memiliki ukuran ekonomi yang paling besar, karena aktivitas perekonomian DIY terpusat di kedua wilayah ini. Sementara, Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki ukuran ekonomi paling kecil dengan kontribusi sebesar 8,50 persen terhadap perekonomian DIY tahun 2019.

Sebaran pertumbuhan yang dicapai oleh seluruh kabupaten/kota memiliki pola yang cukup bervariasi. Kabupaten Sleman tercatat menjadi wilayah yang selalu memiliki pertumbuhan ekonomi di atas level DIY. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul selalu menjadi wilayah yang pertumbuhannya di bawah level DIY. Perubahan pola pertumbuhan ekonomi terjadi mulai tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama periode tiga tahun terakhir mampu melejit di atas level pertumbuhan DIY. Bahkan, pertumbuhan selama periode tersebut tercatat paling tinggi di DIY dan mampu menembus angka dua digit yakni 13,49 persen di tahun 2019. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya aktivitas investasi terutama pembangunan bandar udara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Aktivitas pembangunan ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi DIY hingga mencapai level paling tinggi selama lebih dari dua dekade terakhir. Secara statistik, dampak lanjutan dari aktivitas pembangunan YIA adalah akan meningkatnya PDRB per kapita Kulon Progo baik nominal maupun riil. Namun, seberapa besar manfaat yang mampu dinikmati oleh penduduk Kulon Progo sangat tergantung dari seberapa besar keterlibatan mereka dalam aktivitas pembangunan tersebut. Apakah posisinya hanya sebagai penonton atau mampu menjadi bagian dari proses.

Tabel 6.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2019 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
	Pertum- buhan	Andil								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulonprogo	4,62	0,34	4,76	0,35	5,97	0,45	10,84	0,82	13,49	1,07
Bantul	4,97	0,91	5,05	0,94	5,10	0,95	5,47	1,03	5,53	1,03
Gunungkidul	4,82	0,63	4,88	0,65	5,01	0,67	5,16	0,69	5,33	0,71
Sleman	5,18	1,72	5,22	1,75	5,34	1,80	6,42	2,18	6,49	2,20
Yogyakarta	5,09	1,34	5,11	1,36	5,24	1,40	5,49	1,48	5,96	1,59
<b>DIY</b>	<b>4,95</b>		<b>5,05</b>		<b>5,26</b>		<b>6,20</b>		<b>6,60</b>	

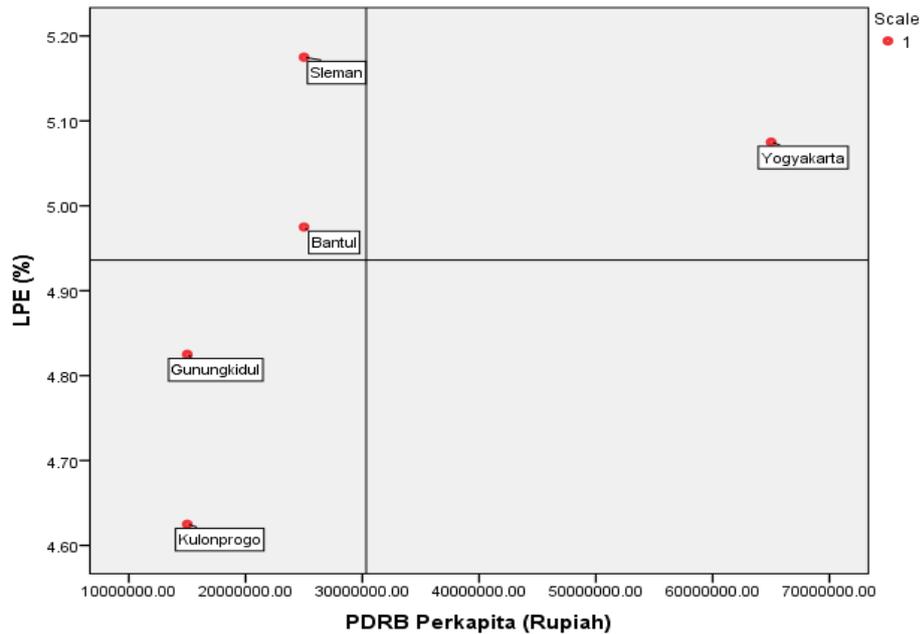
Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data PDRB 2014-2018

Andil pertumbuhan yang disumbang oleh kabupaten/kota selama periode 2015-2019 juga cukup bervariasi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi dua wilayah yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Andil kedua wilayah masing-masing tercatat sebesar 2,20 dan 1,59 poin persen terhadap pertumbuhan DIY 2019 (Tabel 6.1). Andil pertumbuhan terbesar berikutnya disumbang oleh Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya memiliki andil pertumbuhan paling rendah, mulai tahun 2018 mampu melampaui Kabupaten Bantul. Peningkatan andil ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang mampu tumbuh dua digit.

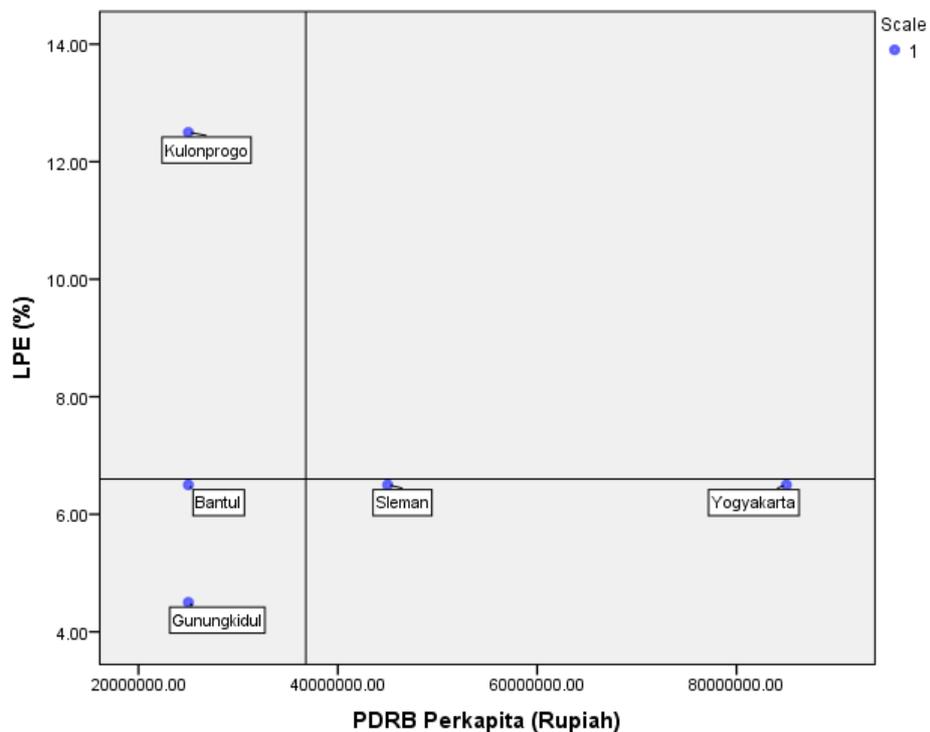
Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran wilayahnya. Perlu ditinjau lebih jauh sebaran dan tingkat kesenjangan sebaran pertumbuhannya. Salah satu ciri disebut mempunyai pertumbuhan ekonomi berkualitas bila sebaran pertumbuhan relatif merata di wilayah cakupannya dan tidak ada perbedaan yang mencolok tingkat pendapatan penduduknya. Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah pada periode 2015–2019 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap DIY pada **bidang pencaran (*scattered plot*)** yang semula diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan **Tipologi Klassen**. Berdasar pada metode Tipologi Klassen ini, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita kabupaten/kota dapat dipetakan dan hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 6.3 dan Gambar 6.4.

Pada tahun 2015, Kota Yogyakarta pada kuadran I, yang berarti menjadi daerah maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata DIY. Sementara Kabupaten Sleman dan Bantul berada pada kuadran III yang berarti menjadi daerah yang berkembang pesat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat PDRB per kapitanya lebih rendah dari rata-rata DIY. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo berada pada kuadran IV yang merupakan daerah relatif tertinggal dalam lingkup perbandingan lokal DIY, yaitu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih rendah dari rata-rata DIY (Gambar 6.3).

Gambar 6.3. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY. 2015



Gambar 6.4. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2019



Pada tahun 2019 Kulon Progo melesat naik di kuadran III yaitu menjadi daerah yang berkembang pesat karena laju pertumbuhannya meloncat melampaui rata-rata provinsi meskipun PDRB per kapita Kulon Progo masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta posisinya bergeser di Kuadran II yaitu daerah yang maju tetapi tertekan, artinya daerah dengan PDRB per kapita lebih tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata provinsi DIY. Posisi Gunungkidul dan Bantul tahun 2019 pada kategori daerah tertinggal meskipun level pertumbuhan ekonominya bergerak ke atas mendekati rata-rata provinsi (Gambar 6.4). Gambar 6.4 juga memberi makna bahwa di tahun 2019 hanya Kulon Progo yang melesat pertumbuhannya sehingga rata-rata pertumbuhan kelima kabupaten/kota terangkat di atas pertumbuhan semua kabupaten/kota selain Kulon Progo. Keempat kabupaten/kota selain Kulon Progo menjadi daerah dengan pertumbuhan tertekan.

Skema Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Beberapa mega proyek sudah berjalan, seperti pembangunan bandara baru di Kulon Progo, dan sebagian lagi pada tahap proses dan menunggu pelaksanaan. Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo melesat di atas pertumbuhan semua kabupaten/kota di DIY. Pergerakan dari tahun 2015 ke 2019 tersebut mengindikasikan kesenjangan antarwilayah mulai dapat ditekan, dengan menggerakkan sumber pertumbuhan untuk Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Hanya saja, untuk PDRB per kapita masih terdapat ketimpangan yang lebar terutama dengan Kota Yogyakarta. Dengan demikian hingga tahun 2019 ini pembangunan sudah dapat berhasil meningkatkan level ekonomi karena laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota makin tinggi namun masih menyisakan kesenjangan pendapatan penduduk antarwilayah.

### **B. Stabilitas Harga**

Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di DIY pada khususnya, dan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya. Apabila terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan kenaikan harga tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, maka hal ini dikatakan terjadi inflasi. Pertumbuhan ekonomi DIY masih ditopang dengan inflasi yang cenderung rendah dan stabil.

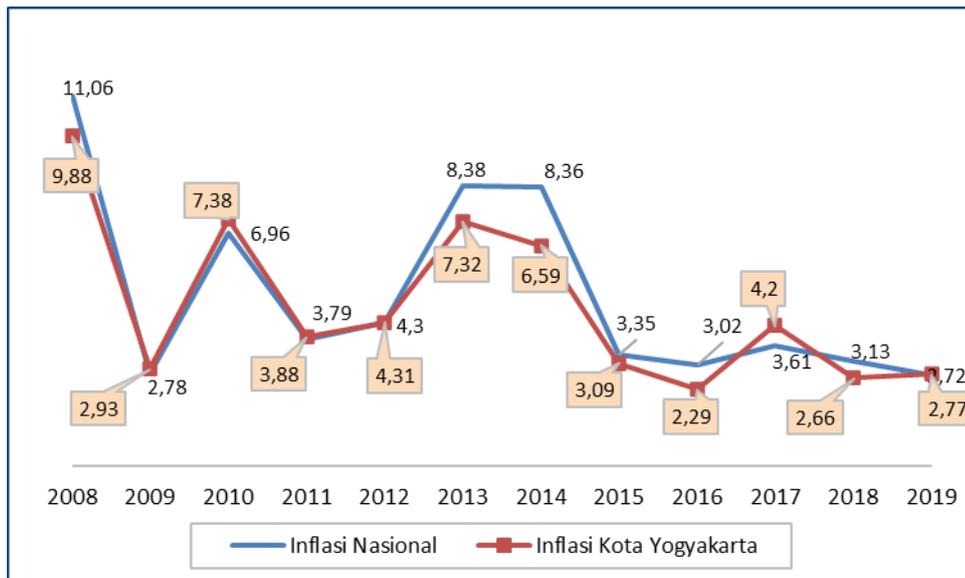
Terjadinya inflasi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bagi masyarakat umum inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Bagi pelaku usaha laju inflasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu keputusan. Dan bagi pemerintah laju inflasi menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **1. Perbandingan Laju Inflasi Yogyakarta dan Nasional**

Kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat pada dasarnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di daerah. Sehingga, perkembangan IHK dan inflasi secara

nasional tidak terlepas dari perkembangan IHK dan inflasi di daerah. Berikutnya, pada bab ini akan dibahas perkembangan inflasi dengan mengulas secara deskriptif perkembangan inflasi nasional dan analisis tentang perkembangan inflasi Kota Yogyakarta secara umum. Adapun perkembangan inflasi Yogyakarta dan Indonesia selama kurun waktu tahun 2008-2019 dapat dilihat pada Gambar 6.5.

**Gambar 6.5. Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional, 2008 – 2019 (persen)**



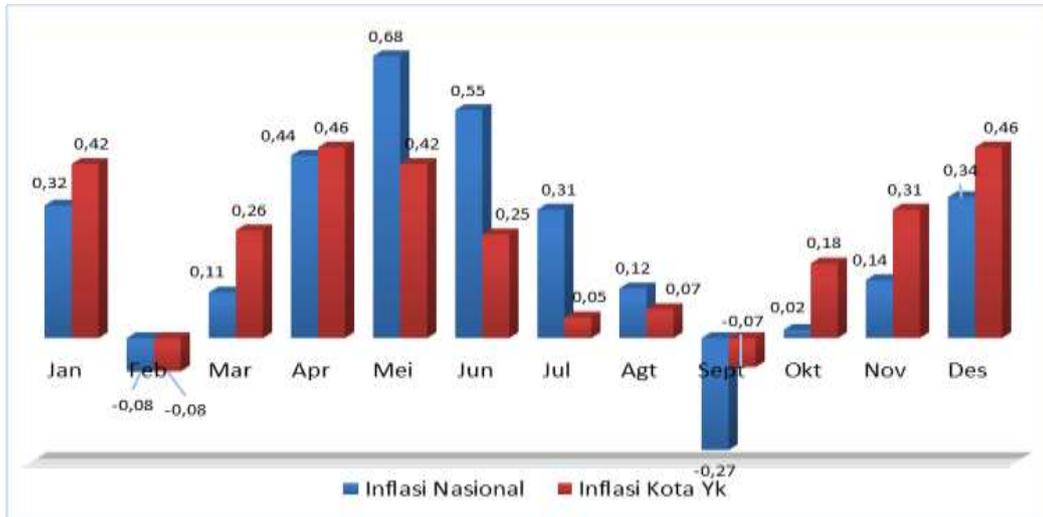
Jika dilihat series inflasi tahunan sepanjang tahun 2008-2019, inflasi nasional selama tiga tahun terakhir relatif rendah dan stabil. Inflasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bergerak pada kisaran 3,02 persen hingga 3,61 persen, dan menurun di 2,72 persen di tahun 2019. Demikian pula dengan inflasi Yogyakarta, fluktuasi inflasi tahunan Yogyakarta sedikit lebih rendah, namun menunjukkan pergerakan yang seirama.

Pada tingkat nasional, sepanjang tahun 2019 terjadi inflasi sebanyak sepuluh kali, dan deflasi sebanyak dua kali (Gambar 6.6). Inflasi tertinggi tercatat pada bulan Mei dan Juni dengan laju inflasi masing-masing sebesar 0,68 persen dan 0,55 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada bulan tersebut antara lain: kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, sandang, serta transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara itu deflasi tertinggi selama tahun 2019 terjadi pada bulan September, sebesar -0,27 persen. Deflasi tersebut terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yang didominasi oleh penurunan harga bahan makanan.

Pada tingkat Yogyakarta, selama kurun waktu 12 bulan di tahun 2019, terjadi inflasi sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan deflasi sebanyak 2 (dua) kali. Inflasi tertinggi tercatat terjadi pada bulan April dan Desember dengan tingkat inflasi sebesar 0,46 persen. Kelompok

komoditas yang yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan transport, komunikasi, dan jasa keuangan.

Gambar 6.6. Inflasi Kota Yogyakarta dan Inflasi Nasional 2019 (persen)



Inflasi Indonesia menurut kelompok pengeluaran selama tahun 2019 menunjukkan bahwa seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 3,76 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,08 persen; kelompok sandang sebesar 5,51 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,40 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,92 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen.

Tabel 6.2. Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019 (Persen)

Kelompok Pengeluaran (1)	Inflasi (%)	
	Yogyakarta (2)	Nasional (3)
<b>Umum</b>	<b>2,77</b>	<b>2,72</b>
Bahan Makanan	3,76	4,28
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	2,67	3,97
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	2,08	1,75
Sandang	5,51	4,93
Kesehatan	5,40	3,46
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	3,92	3,25
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,37	0,17

Kelompok komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Yogyakarta selama tahun 2019 antara lain : sandang; kesehatan; dan Pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sedangkan komoditas yang berperan memberikan sumbangan deflasi di DIY selama tahun 2019 adalah bahan makanan berupa lemak dan minyak, serta sayur-sayuran, dan rekreasi.

Terkendalnya inflasi di Kota Yogyakarta dikarenakan terjaganya stabilitas perubahan harga di 7 komponen inflasi. Hal ini didukung oleh koordinasi yang semakin baik dan langkah-langkah yang cermat dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY dalam menjaga stabilitas inflasi sepanjang tahun, sehingga inflasi DIY tetap terkendali dan berada pada kisaran target yang ditetapkan.

**2. Andil Inflasi dan Subkelompok Konsumsi**

Tahun 2019 seluruh kelompok pengeluaran barang dan jasa mengalami inflasi di Kota Yogyakarta. Kelompok sandang tercatat mengalami inflasi paling tinggi yaitu sebesar 5,51 persen. Pada urutan kedua yaitu kelompok pengeluaran kesehatan yang sebesar 5,40 persen, yang kemudian disusul oleh kelompok pengeluaran Pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 3,92 persen.

Bila dilihat dari sumbangan atau andil masing-masing kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019, kelompok bahan makanan tercatat memberikan sumbangan inflasi terbesar yaitu 0,73 persen. Tingginya andil kelompok pengeluaran bahan makanan disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas padi-padian dan umbi-umbian. Namun demikian tidak semua komoditas mengalami peningkatan harga, ada beberapa yang mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi.

Kelompok pengeluaran yang turut memberikan sumbangan inflasi terbesar kedua adalah perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dengan andil inflasi sebesar 0,53 persen. Tingginya andil kelompok ini disebabkan oleh tingginya biaya perumahan di DIY. DIY sebagai kota pelajar dan pariwisata menjadi salah satu magnet yang menarik untuk tinggal baik sementara ataupun menetap, sehingga permintaan perumahan terus meningkat.

**Tabel 6.3. IHK, Inflasi, dan Andil Per Kelompok dan Subkelompok Kota Yogyakarta (2012=100), tahun 2019**

Kelompok dan Sub Kelompok		IHK Des 2019	Inflasi 2019	Andil 2019
(1)		(2)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>UMUM</b>	<b>135,46</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>
<b>B</b>	<b>BAHAN MAKANAN</b>	<b>152,96</b>	<b>3,76</b>	<b>0,73</b>
1	Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	137,30	2,54	0,11
2	Daging dan Hasil-hasilnya	156,13	-0,24	-0,01
3	Ikan Segar	163,52	1,03	0,01
4	Ikan Diawetkan	189,98	-1,52	-0,01

5	Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	142,63	2,79	0,08
6	Sayur-sayuran	175,42	5,44	0,08
7	Kacang - kacang	127,49	-2,75	-0,02
8	Buah - buah	171,58	4,25	0,09
9	Bumbu - bumbu	200,45	19,69	0,31
10	Lemak dan Minyak	125,79	6,11	0,08
11	Bahan Makanan Lainnya	160,34	4,36	0,01
<b>C</b>	<b>MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK &amp; TEMBAKAU</b>	<b>135,64</b>	<b>2,67</b>	<b>0,48</b>
1	Makanan Jadi	134,73	2,29	0,27
2	Minuman yang Tidak Beralkohol	128,88	4,39	0,12
3	Tembakau dan Minuman Beralkohol	145,14	2,59	0,09
<b>D</b>	<b>PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS &amp; BAHAN BAKAR</b>	<b>136,52</b>	<b>2,08</b>	<b>0,53</b>
1	Biaya Tempat Tinggal	129,10	2,93	0,36
2	Bahan Bakar, Penerangan dan Air	155,75	0,40	0,03
3	Perlengkapan Rumahtangga	116,48	1,82	0,03
4	Penyelenggaraan Rumahtangga	132,45	3,30	0,12
<b>E</b>	<b>SANDANG</b>	<b>132,30</b>	<b>5,51</b>	<b>0,29</b>
1	Sandang Laki-laki	132,63	2,01	0,03
2	Sandang Wanita	126,91	5,37	0,08
3	Sandang Anak-anak	137,89	4,48	0,06
4	Barang Pribadi dan Sandang Lain	132,72	10,78	0,13
<b>F</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>131,02</b>	<b>5,40</b>	<b>0,34</b>
1	Jasa Kesehatan	130,14	7,72	0,20
2	Obat-obatan	123,61	3,74	0,05
3	Jasa Perawatan Jasmani	127,40	2,43	0,01
4	Perawatan Jasmani dan Kosmetika	137,79	4,02	0,08
<b>G</b>	<b>PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA</b>	<b>121,07</b>	<b>3,92</b>	<b>0,34</b>
1	Pendidikan	126,82	6,03	0,30
2	Kursus-kursus / Pelatihan	130,82	0,21	0,00
3	Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	105,84	1,93	0,03
4	Rekreasi	113,73	0,85	0,01
5	Olahraga	122,09	-0,29	0,00
<b>H</b>	<b>TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN</b>	<b>127,31</b>	<b>0,37</b>	<b>0,06</b>
1	Transpor	131,78	0,31	0,03
2	Komunikasi Dan Pengiriman	108,47	-0,69	-0,03
3	Sarana dan Penunjang Transpor	147,05	2,63	0,05
4	Jasa Keuangan	122,22	0,00	0,00

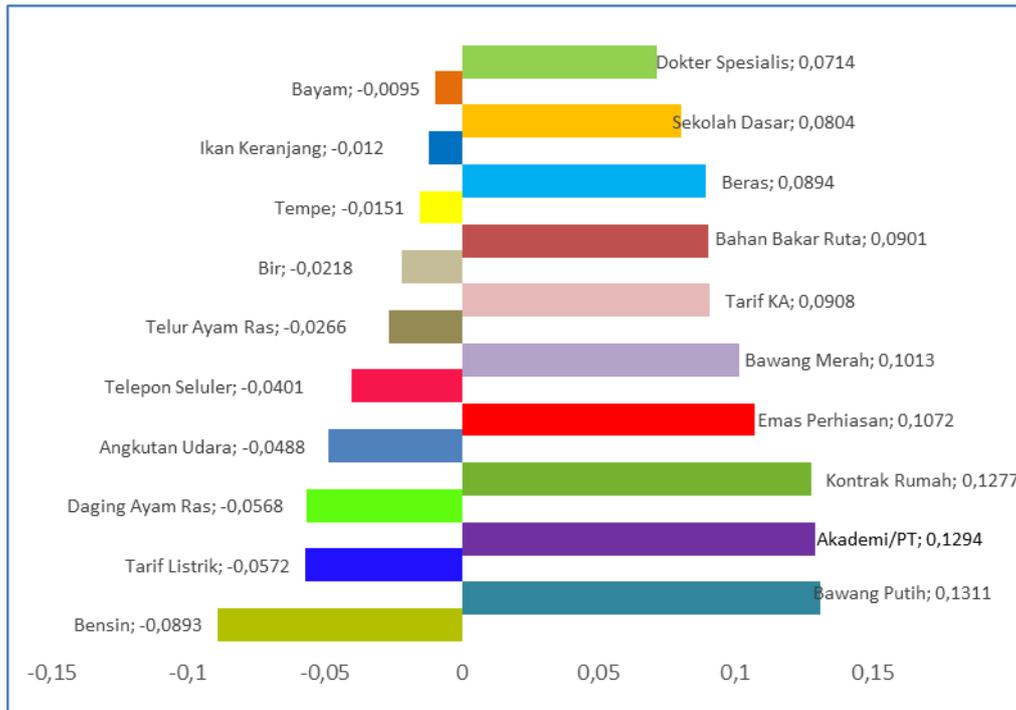
### 3. Perubahan Harga dan Andil Inflasi Terbesar Beberapa Komoditas terhadap Inflasi Yogyakarta

Besarnya nilai perubahan indeks inflasi maupun deflasi yang terjadi setiap bulan ataupun tahun adalah merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan atau tahun yang bersangkutan. Setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga dapat diketahui besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi, baik di daerah maupun secara nasional.

Gambar 6.7 menyajikan 10 besar barang-barang yang memberikan andil positif (menyumbang inflasi) dan andil negatif (penahan inflasi) terbesar terhadap inflasi sepanjang tahun 2019. Konsumsi barang-barang yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi

tahun 2019 antara lain komoditas bawang putih, Akademi/Perguruan Tinggi, kontrak rumah, emas perhiasan, bawang merah, tarif KA, bahan bakar rumah tangga, beras, sekolah dasar, dan dokter spesialis. Sedangkan konsumsi barang-barang yang memberikan andil negatif terhadap inflasi sepanjang tahun 2019 antara lain konsumsi bensin, tarif listrik, daging ayam ras, angkutan udara, telepon seluler, telur ayam ras, bir, tempe, ikan keranjang, dan bayam.

**Gambar 6.7. Komoditas Utama Penyumbang dan Penahan Inflasi Kota Yogyakarta 2019**



Tabel 6.4 menyajikan persentase perubahan harga 10 barang dan jasa yang dominan menyumbang inflasi dan dominan menahan inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019 terhadap tahun 2018. Perubahan harga 10 barang/jasa paling dominan tersebut cukup bervariasi. Rata-rata barang penyumbang inflasi mengalami kenaikan harga antara 2 hingga 42 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah bawang putih, yaitu 42,6 persen. Sedangkan komoditas barang yang mengalami kenaikan harga terendah adalah pengeluaran beras, sebesar 2,43 persen.

Sementara barang-barang penahan inflasi tahun 2019 rata-rata mengalami penurunan harga sekitar 1 sampai dengan 10 persen. Barang dengan penurunan harga tertinggi adalah telepon seluler, dengan penurunan sebesar 10,27 persen. Sedangkan barang dengan penurunan harga terkecil adalah tarif listrik yang hanya turun sebesar 1,12 persen dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 6.4. Perubahan Harga dan Andil 10 Besar Barang Terhadap Inflasi Kota Yogyakarta 2019

NO	Jenis Barang	Persentase Perubahan Harga Terhadap tahun 2019	Andil Terhadap Inflasi selama Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sepuluh besar yang mempunyai andil positif</b>			
1	Bensin	42,6152	0,1311
2	Tukang Bukan Mandor	6,1946	0,1294
3	Sekolah Dasar	4,3984	0,1277
4	Daging ayam ras	14,7689	0,1072
5	Jeruk	24,2778	0,1013
6	Rokok kretek filter	26,2876	0,0908
7	Upah Pembantu RT	3,0402	0,0901
8	Akademi/Perguruan Tinggi	2,4357	0,0894
9	Pasir	8,5743	0,0804
10	Bawang Merah	19,0681	0,0714
<b>Sepuluh besar yang mempunyai andil negatif</b>			
1	Minyak Goreng	-2,5506	-0,0893
2	Kelapa	-1,1240	-0,0572
3	Bayam	-5,8588	-0,0568
4	Gula Pasir	-3,2402	-0,0488
5	Kangkung	-10,2696	-0,0401
6	Terong Panjang	-3,7700	-0,0266
7	Brokoli	-2,8546	-0,0218
8	Kentang	-3,6674	-0,0151
9	Parfum	-5,4223	-0,0120
10	Daun Melinjo	-5,7016	-0,0095

### C. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

#### 1. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)

Pada periode tahun 2010-2019, angka beban tanggungan penduduk DIY menunjukkan penurunan secara perlahan hingga tahun 2017. Selama sembilan tahun, angka beban tanggungan DIY turun sekitar 0,64 poin. Angka beban tanggungan sebesar 45,87 di tahun 2010, dihitung berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010). Angka ini berangsur-angsur menurun hingga 45,05 di tahun 2015, yang dihitung dari data hasil Survei Penduduk antar Sensus tahun 2015 (SUPAS 2015). Angka ini masih menurun hingga 45,02 di tahun 2017. Sehingga selama 2010-2017, rata-rata penurunan angka ketergantungan mencapai 0,27 poin per tahun. Di tahun 2018, angka ini mulai naik 0,07 poin, dan naik lagi 0,14 poin menjadi 45,23 di tahun 2019. Deskripsi di atas menyimpulkan bahwa

angka beban tanggungan DIY selama satu dasawarsa terakhir masih berada pada kisaran 45-46.

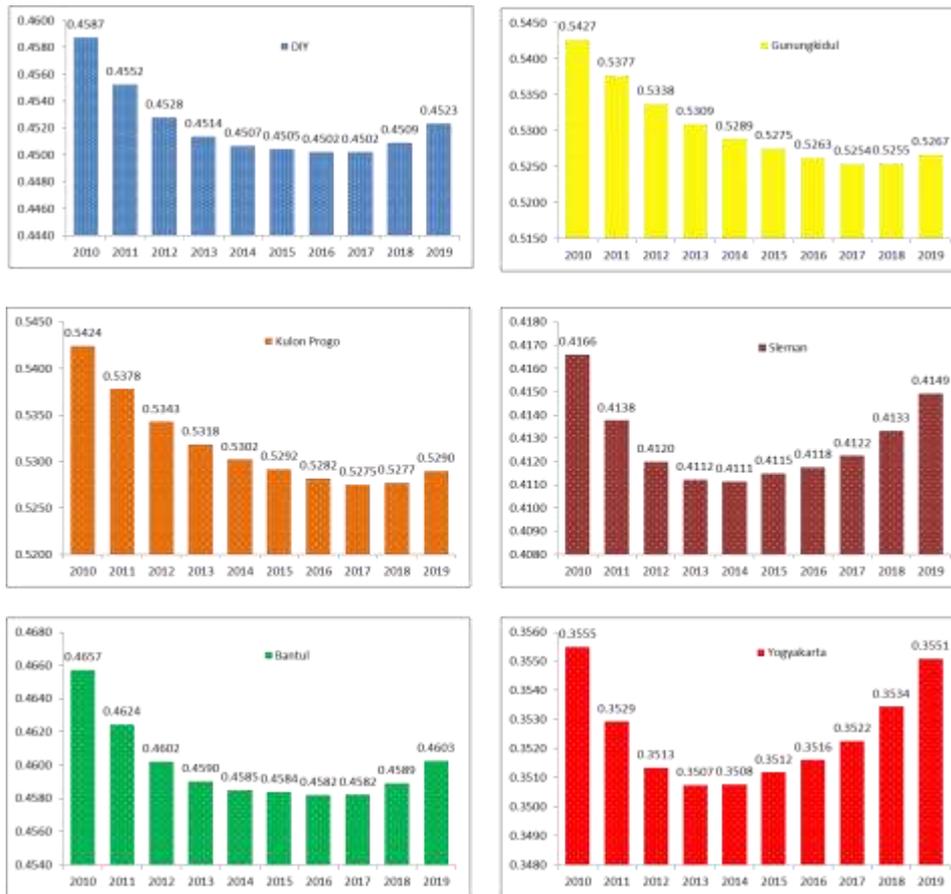
Secara absolut memang belum terlihat adanya pengurangan yang signifikan terhadap beban yang harus ditanggung oleh setiap seratus penduduk usia produktif. Namun secara ekonomi, hal ini menunjukkan kondisi yang sedikit membaik. Secara tidak langsung, kesejahteraan penduduk akan naik dengan berkurangnya penduduk usia non produktif yang menikmati pendapatan penduduk usia produktif. Jika pendapatan penduduk usia produktif tetap atau meningkat setara dengan angka inflasi harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, berarti belum ada peningkatan kesejahteraan yang dirasakan penduduk DIY.

Angka beban tanggungan DIY yang berada pada kisaran 45 termasuk dalam kategori tinggi. Sekitar 45 penduduk usia non produktif harus ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif. Tingginya angka beban tanggungan DIY tersebut menjadi salah satu penghambat ekonomi DIY karena banyak usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif.

Pada periode 2010-2019, angka beban tanggungan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki pola yang mirip dengan DIY, yaitu menurun hingga tahun 2017 dan naik perlahan di tahun 2018 dan 2019. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mempunyai pola yang mirip, namun berbeda dengan DIY. Angka ketergantungan di Kabupaten Sleman berangsur-angsur menurun hingga tahun 2014, kemudian naik lagi di 2015 hingga 2019. Angka ketergantungan Kota Yogyakarta turun hingga 2013, kemudian naik lagi di 2014 hingga 2019. Meskipun angka ketergantungan menunjukkan perbedaan level di setiap kabupaten/kota, namun seluruhnya menunjukkan kecenderungan menurun selama sembilan tahun terakhir.

Berdasarkan penghitungan data hasil SP 2010, diperoleh angka ketegantungan tertinggi di Gunungkidul, sebesar 54,27, Selanjutnya adalah Kulon Progo dan Bantul masing-masing sebesar 54,24 dan 46,57 dan terendah adalah Kota Yogyakarta, sebesar 35,55. Namun bila dilihat dari laju penurunannya, ternyata yang tertinggi juga Gunungkidul, yaitu sebesar 1,61 poin periode 2010-2019. Berikutnya adalah Kulon Progo dan Bantul, masing-masing 1,35 dan 0,55 poin. Sedangkan kota Yogyakarta hanya turun 0,04 poin, Paling rendah. Hal ini menjelaskan bahwa dalam periode 2010 hingga 2018 angka beban ketergantungan penduduk penduduk tidak produktif terhadap produktif semakin berkurang. Komposisi penduduk produktif dan tidak produktif di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Kota Yogyakarta mempunyai angka beban tanggungan yang selalu lebih rendah dibanding kabupaten lainnya di DIY karena kehidupan sosial dan ekonominya lebih maju.

Gambar 6.8. Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten/Kota dan DIY, 2010-2019



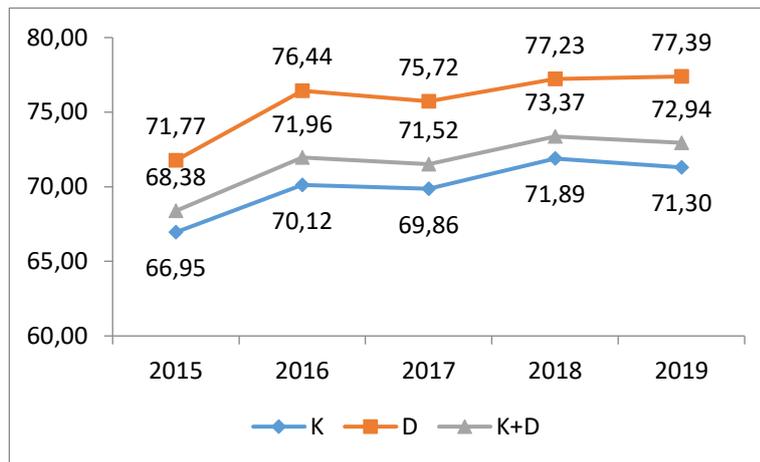
## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka TPAK DIY periode tahun 2015-2019 berfluktuasi namun cenderung meningkat. Angka ini meningkat dari 68,38 persen di tahun 2015 menjadi 72,94 persen di tahun 2019. Peningkatan yang cukup tajam terlihat di tahun 2016, yaitu sebesar 3,57 poin persen, dan di tahun 2019 turun 0,43 poin persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau memperoleh kesempatan kerja tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Persentase kenaikan jumlah penduduk usia kerja lebih tinggi dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja, sehingga persentase penduduk yang terserap pada lapangan kerja dan yang siap masuk ke bursa kerja mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari klasifikasi daerah, penurunan TPAK di tahun 2019 hanya terjadi di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah perdesaan mengalami peningkatan.

Nilai TPAK di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan. Artinya, proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. TPAK perdesaan mencapai 71,77 persen di tahun 2015 dan berfluktuasi namun cenderung naik menjadi 77,39 persen di tahun 2019. Sama halnya di daerah perkotaan, TPAK total juga mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat selama periode 2015-2019. TPAK daerah perkotaan sebesar 66,95 meningkat menjadi 71,30. Ada

dua hal yang dapat ditafsirkan dari kondisi ini. Pertama, ada kemungkinan bahwa etos kerja masyarakat perdesaan lebih tinggi dibanding masyarakat perkotaan sehingga lebih banyak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kedua, mungkin karena desakan ekonomi yang kuat, memaksa mereka untuk terlibat dalam dunia kerja, semata-mata untuk bertahan hidup.

**Gambar 6.9. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah (persen), 2015-2019**



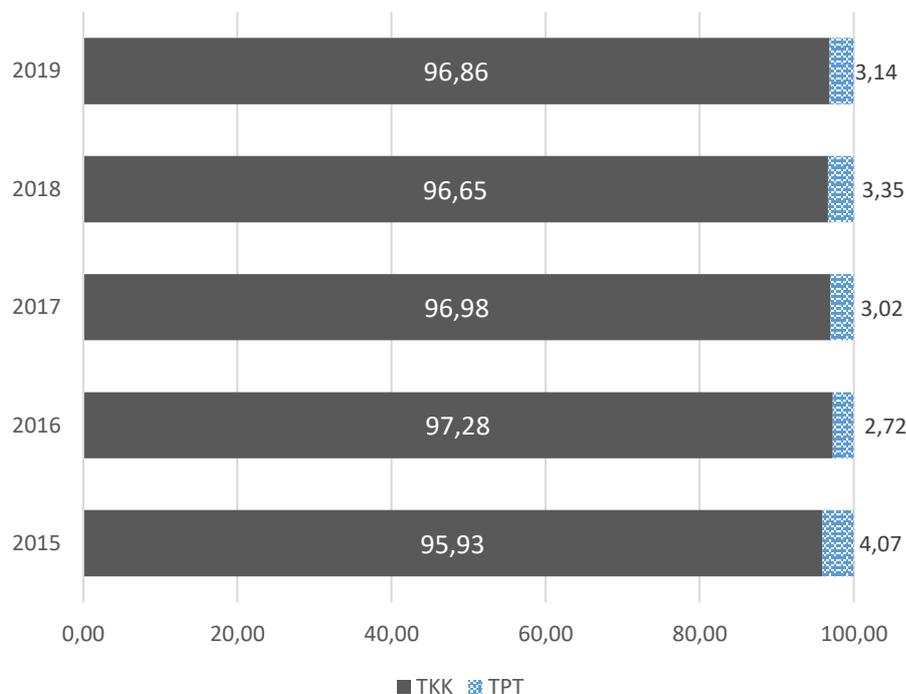
Celah TPAK daerah perdesaan dan perkotaan di tahun 2015 sebesar 4,82 poin persen dan cenderung melebar di tahun 2019 menjadi 6,09 poin persen, atau semakin senjang. Hal ini terjadi karena perbedaan komposisi penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, penduduk berusia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih banyak, tetapi sebagian besar tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Kegiatan mereka diantaranya sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan yang merasa sudah cukup dan tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi, serta lain-lain yang tidak melakukan kegiatan apapun yang bernilai ekonomi. Berbeda dengan penduduk di daerah perdesaan, walaupun sudah tua, mereka masih bekerja. Secara kondisi mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengerjakan lahan pertanian. Biasanya mereka dibantu oleh pekerja keluarga yang tidak dibayar, meliputi anggota keluarga atau famili lain. Pekerja keluarga yang merupakan anggota rumah tangga, biasanya mempunyai kegiatan utama sebagai ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih sekolah. Penentuan kegiatan utama tersebut sesuai dengan konsep ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan waktu terbanyak yang digunakan. Komposisi penduduk juga mempengaruhi angka TPAK. Di daerah perdesaan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah tamat pendidikannya biasanya cenderung lebih memilih merantau ke kota sehingga proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah.

**3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di DIY pada Agustus 2019 mencapai 3,02 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 1,14 persen dibanding keadaan pada Agustus 2018 yang sebanyak 2,99 juta orang atau bertambah 34.317 orang. Bertambahnya penduduk usia bekerja tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, yaitu bertambah sebanyak 12.178 orang, atau meningkat 0,56 persen, jauh lebih rendah dibanding peningkatan sebelumnya yang mencapai 3,52 persen atau sebanyak 74.555 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di DIY pada Agustus 2019 juga meningkat sedikit, yaitu 0,77 persen, dari 2,12 juta orang menjadi 2,13 juta orang, atau bertambah sekitar 16.358 orang.

Profil tenaga kerja dapat juga diamati dari penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sampai dengan Agustus 2019, sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah pertanian sebesar 19,01 persen, perdagangan sebesar 18,96 persen, dan industri pengolahan 17,05 persen (BPS, Sakernas Agustus 2019).

Tingkat kesempatan kerja (TKK) mengalami sedikit peningkatan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2019. TKK meningkat dari 96,65 persen di tahun 2018 menjadi 96,86 persen di tahun 2019. Meskipun TKK dan TPT bisa dikatakan relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil turun dari 3,35 persen menjadi 3,14 persen.

**Gambar 6.10. TKK dan TPT Penduduk DIY (persen), 2015-2019**

Berdasarkan klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. TPT perdesaan dan perkotaan tahun 2019 masing-masing sebesar 1,52 persen dan 3,78 persen. Artinya persentase angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jumlah pengangguran lebih banyak di perkotaan daripada di perdesaan, terutama untuk yang berpendidikan SMA ke atas. Lapangan usaha di daerah perdesaan didominasi oleh pertanian, sehingga penyerapan tenaga kerja relatif lebih tinggi. Selain itu, penduduk desa yang telah selesai sekolah dan merasa cukup pendidikannya sebagian besar memilih merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Bahkan, sebagian angkatan kerja di perdesaan sudah terbiasa menjadi pekerja keluarga dalam rumah tangga meskipun belum mempunyai pekerjaan tetap.

Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan SMA ke atas dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada tahun 2019, TPT tertinggi tercatat pada kelompok berpendidikan Sarjana, yaitu sebesar 4,56 persen, disusul kelompok berpendidikan SMK Kejuruan sebesar 4,20 persen. Sementara untuk kelompok pendidikan SMP ke bawah, nilai TPTnya kurang dari 3 persen.

Dilihat menurut jenis kelamin, secara umum TPT penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, masing-masing sebesar 3,18 persen dan 3,09 persen. Untuk jenjang pendidikan hingga SMP dan SMA Umum TPT penduduk laki-laki lebih tinggi. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA Kejuruan hingga Sarjana, TPT penduduk perempuan lebih tinggi.

**Tabel 6.5. TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2019 \*)**

Pendidikan	Kota	Desa	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. < SD	1,38	0,30	1.80	0.20	0.85
2. SD	2,29	0,73	2.09	0.91	1.56
3.SMP	3,59	1,05	2.97	2.46	2.75
4.SMA Umum	4,57	1,08	4.31	3.38	3.94
5. SMA Kejuruan	4,35	3,65	3.22	5.85	4.20
6. D I/II/III	2,47	12,36	2.48	4.80	3.87
7. Universitas	4,96	2.00	4.22	4.92	4.56
<b>Total</b>	<b>3.78</b>	<b>1.52</b>	<b>3.18</b>	<b>3.09</b>	<b>3.14</b>

Keterangan: \* Kondisi Agustus 2018  
 Sumber : BPS Provinsi DIY

4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Secara umum kesempatan kerja juga bersifat *inelastis*, yaitu hanya 0,57. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, disertai peningkatan kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*). Angka EKK yang *inelastis* dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut lebih bersifat padat modal (*capital Intensive*) dan masih kurang bisa menyerap peluang kerja. Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi lebih berbasis pada industri dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga kesempatan kerja yang tersedia semakin sedikit. Namun angka EKK pada periode 2015-2019 lebih tinggi dibanding dengan hasil penghitungan periode kajian 2014-2018 yang sebesar 0,38.

Tabel 6.6. Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY (persen), 2015-2019

Kategori/Lapangan Usaha	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	Elastisitas Kesempatan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
				2015	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-4,13	1,64	-2,16	25,41	19,01
2. Pertambangan dan penggalian	4,83	4,29	1,36	0,70	0,74
3. Industri pengolahan	7,29	5,41	1,62	14,52	17,05
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	14,43	6,65	2,48	0,11	0,17
5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi	3,68	4,93	1,06	0,19	0,19
6. Konstruksi	0,33	9,91	0,04	7,50	6,73
7. Perdagangan & reparasi, perawatan mobil dan spd motor	1,93	5,62	0,33	19,82	18,96
8. Pengangkutan & pergudangan	13,73	4,87	2,79	2,68	3,98
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	11,43	6,84	1,88	6,90	9,43
10. Informasi & komunikasi	10,46	7,09	1,61	0,74	0,98
11. Jasa keuangan dan asuransi	1,81	5,60	0,33	1,61	1,54
12. Real estat	-24,61	5,38	-4,55	0,23	0,07
13. Jasa perusahaan	7,23	5,41	1,30	2,09	2,45
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	5,42	4,36	1,10	3,29	3,60
15. Jasa pendidikan	6,91	5,28	1,27	5,97	6,91
16. Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	11,27	5,75	1,92	1,60	2,18
17. Jasa lainnya	0,63	5,98	0,10	6,63	6,02
<b>Total</b>	<b>3,07</b>	<b>5,77</b>	<b>0,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY, diolah dari data hasil Sakernas bulan Agustus

Selama periode tersebut, terlihat ada 10 lapangan usaha yang memiliki kesempatan kerja bersifat *elastis*. Sedangkan 7 lapangan usaha lainnya bersifat *inelastis*. Perekonomian DIY 2019 telah mulai tumbuh lebih cepat namun belum banyak menciptakan kesempatan

pekerjaan. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ternyata juga mempengaruhi tingkat elastisitas kesempatan kerja, bahkan *inelastis* bernilai negatif. Selain itu, masih ada lapangan usaha yang mempunyai nilai *inelastis* negatif, yaitu real estat dan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor pengangkutan dan pergudangan mempunyai EKK yang tertinggi, yaitu sebesar 2,79. Selanjutnya pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin sebesar 2,48. Jika dilihat pertumbuhan kesempatan kerja, keduanya memang mempunyai angka pertumbuhan tertinggi, masing-masing 13,73 persen dan 14,43 persen.

**5. Produktivitas Tenaga Kerja**

Secara umum, produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mampu tumbuh sebesar 5,41 persen per tahun, menurun dibanding periode 2014-2018 yang mencapai 6,69 persen per tahun. Hal ini berbeda dengan pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi, yang naik dari sebesar 5,36 persen per tahun pada periode sebelumnya, menjadi 5,77 persen per tahun pada periode 2015-2019. Selama periode 2015-2019, ada dua lapangan usaha mengalami rata-rata pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) mencapai dua digit per tahun, yaitu: real estat sebesar 44,03 persen, dan konstruksi sebesar 13,04 persen, Empat lapangan usaha lain mengalami rata-rata pertumbuhan PTK di atas rata-rata pertumbuhan PTK DIY, diantaranya: pertanian 9,81 persen, jasa lainnya 8,35 persen, perdagangan 7,40 persen, dan jasa keuangan dan asuransi 6,93 persen (Tabel 6.7).

**Tabel 6.7. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2015–2019**

Kategori/Lapangan Usaha	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Org./Th.)		Rata-rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)		Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas TK 2015-2019 (%)
	2015	2019	Ekonomi	Kesempatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	22,46	32,66	1,64	-4,13	9,81
2. Pertambangan dan penggalian	43,59	45,50	4,29	4,83	1,08
3. Industri pengolahan	48,44	49,93	5,41	7,29	0,76
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	54,94	54,92	6,65	14,43	-0,01
5. Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi	31,02	34,18	4,93	3,68	2,45
6. Konstruksi	67,01	109,40	9,91	0,33	13,04
7. Perdagangan & reparasi, perawatan mobil dan spd motor	22,25	29,61	5,62	1,93	7,40
8. Pengangkutan & pergudangan	113,62	93,99	4,87	13,73	-4,64
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	79,55	72,73	6,84	11,43	-2,22
10. Informasi & komunikasi	585,28	538,07	7,09	10,46	-2,08
11. Jasa keuangan dan asuransi	131,74	172,21	5,60	1,81	6,89
12. Real estat	1642,47	7067,91	5,38	-24,61	44,03
13. Jasa perusahaan	26,52	27,50	5,41	7,23	0,92

## Bab 6 Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY

14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	134,64	151,33	4,36	5,42	2,97
15. Jasa pendidikan	76,16	78,03	5,28	6,91	0,61
16. Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	84,22	76,06	5,75	11,27	-2,52
17. Jasa lainnya	20,65	28,46	5,98	0,63	8,35
<b>Total</b>	<b>53,64</b>	<b>66,24</b>	<b>5,77</b>	<b>3,07</b>	<b>5,41</b>

Sumber : BPS Provinsi DIY

Produktivitas tenaga kerja di awal periode 2015 produktivitas tenaga kerja DIY sebesar Rp53,64 juta per pekerja selama satu tahun, atau sekitar Rp147 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau Rp169 ribu per orang per hari untuk 6 hari kerja seminggu. Produktivitas tenaga kerja tahun 2019 naik mencapai Rp66,24 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp181 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau sekitar Rp209 ribu per orang per hari bila dihitung untuk 6 hari kerja seminggu.

Menurut lapangan usaha, produktivitas tertinggi adalah sektor real estat yang memiliki produktivitas per pekerja setahun mencapai Rp1.642 juta di tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp7.068 juta di tahun 2019. Selanjutnya adalah sektor informasi dan komunikasi dengan produktivitas per pekerja setahun sebesar Rp585 juta di tahun 2015 namun menurun menjadi Rp538 di tahun 2019. Nilai produktivitas kedua sektor tersebut jauh melampaui sektor-sektor yang lain dan secara konsisten memimpin, baik di awal maupun di akhir periode kajian.

Gambar 6.11 dan 6.12 merupakan hasil analisis Tipologi Klassen dengan periode kajian tahun 2015 dan 2019. Dalam waktu lima tahun telah terjadi perubahan capaian pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi pertumbuhan ekonomi level makro yang mengalami percepatan dari tahun 2015 hingga 2019, dan memiliki dampak kinerja produktivitas yang berbeda.

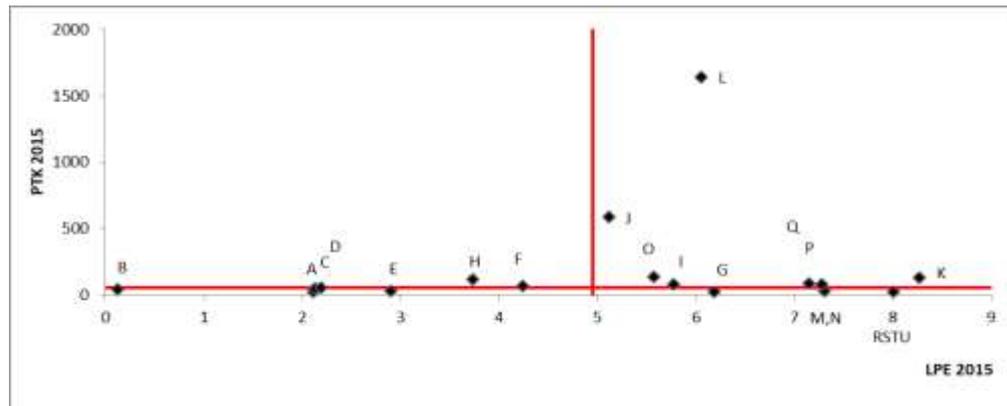
Pada tahun 2015 dan 2019 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I), informasi dan komunikasi (kategori J), jasa keuangan dan asuransi (K), dan jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial (Q) mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja DIY. Menurut analisis Tipologi Klassen ketiga kategori tersebut dikatakan sebagai “sektor yang produktif dan tumbuh cepat”.

Lapangan usaha pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi (kategori E) dan konstruksi (kategori F), pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaganya mampu tumbuh di atas rata-rata di tahun 2019, padahal pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata di tahun 2015. Hal ini berarti pada kedua sektor lapangan usaha tersebut termasuk kategori sektor yang “produktif dan tumbuh pesat”. Melambungnya harga tanah di wilayah DIY, telah merubah tren investasi *landed* menjadi *high rise* atau hunian *vertical* atau apartemen. Menjamurnya bisnis ini di DIY, mendorong pesat laju pertumbuhan output konstruksi. Hal ini memberikan indikasi bahwa

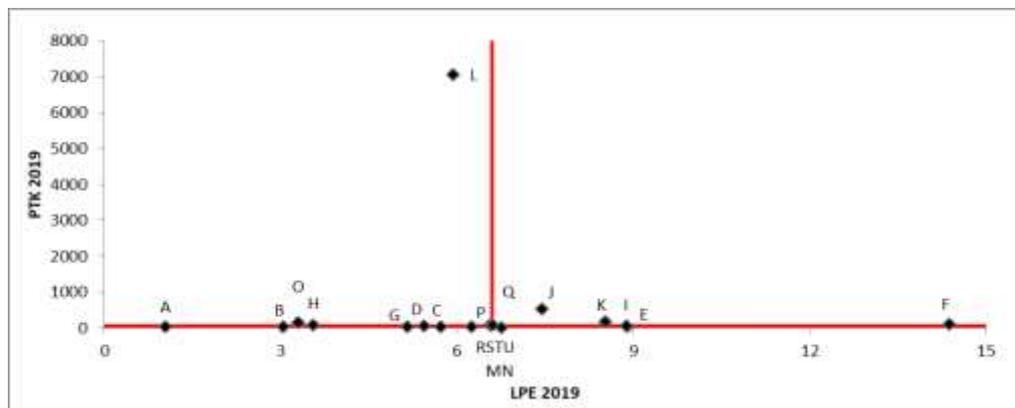
## Bab 6 Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY

arah penguatan ekonomi D.I.Yogyakarta bertumpu pada kelompok sektor sekunder. Sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan karena pangsa distribusinya cukup besar masih perlu dipacu kinerja ekonominya. Inovasi produksi, perluasan kualitas dan kuantitas pemasaran, dan promosi perlu diintensifkan lagi untuk mendatangkan pemodal besar sehingga tertarik mengembangkan usahanya di D.I. Yogyakarta.

Gambar 6.11. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2015



Gambar 6.12. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2019



Kondisi sebaliknya terjadi untuk lapangan usaha real estat (L), administrasi pemerintahan (O) dan jasa pendidikan (kategori P)). Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja empat lapangan usaha ini bertahan di atas rata-rata namun pertumbuhan ekonominya turun dari di atas rata-rata menjadi di bawah rata-rata. Dengan demikian kategori L, O, dan P di tahun 2019 turun dari kelompok “sektor yang produktif dan tumbuh cepat” menjadi “sektor yang maju tetapi tertekan (kurang produktif)”. Tingginya produktivitas real estate tidak lepas dari icon DIY sebagai Kota Pelajar. Memiliki lebih dari 100 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, jumlah mahasiswa di DIY meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi peluang bagi investor untuk menyediakan tempat tinggal bagi para mahasiswa pendatang.

Dilihat secara parsial dari dimensi pencapaian produktivitas, secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kategori real estate (L) dan konstruksi (F) memiliki rata-rata produktivitas tertinggi selama 2015-2019. Nilai keduanya masing-masing mencapai 44,03 persen dan 13,04 persen. Nilai produktivitas kedua juga di atas rata-rata, baik di tahun 2015 maupun 2019 (Tabel 6.7). Sementara itu, kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin merupakan yang tertinggi rata-rata pertumbuhan kesempatan kerjanya, yaitu 14,43 persen per tahun. Selain itu, masih ada 4 kategori yang rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja per tahunnya mencapai 2 digit, diantaranya: pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial, dan infokom.

Dengan demikian sektor yang dapat diandalkan dari sisi pertumbuhan dan produktivitasnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (kategori I), dan informasi dan komunikasi (kategori J), jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial (Q). Sesuai dengan namanya, Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai magnet tersendiri bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Potensi wisata yang cukup beragam, dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata khusus, didukung oleh berbagai fasilitas seperti: hotel dan penginapan, usaha perjalanan wisata, sarana pendukung maupun penyediaan makanan dan minuman serta cinderamata. Pertumbuhan pariwisata DIY akan membuka peluang tumbuhnya pasar wisata, perkembangan teknologi informasi dan sosial media, pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional, dan pembangunan infrastruktur regional seperti bandara, jalan tol, maupun jalur kereta api.

### 6. Pengurangan Angka Pengangguran

Pada tahun 2015 di DIY masih terdapat sekitar 80,2 ribu orang yang menganggur dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bukan karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Mereka yang menganggur ini adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran 2015 sebesar 4,07 persen. Meskipun tergolong rendah namun pemerintah mempunyai komitmen program untuk mengurangi angka pengangguran tersebut. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional, berbagai upaya dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pengangguran. Pada tahun 2019 angka pengangguran tercatat di kisaran 3,14 persen, dengan jumlah pengangguran sekitar 69,17 ribu orang.

### 7. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 6.13 memperlihatkan hubungan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) DIY untuk tahun 2015 hingga 2019. Ada kecenderungan yang dapat dijelaskan bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka persentase tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, bila pertumbuhan

ekonomi melambat maka akan diiringi meningkatnya persentase tingkat pengangguran, seperti kondisi tahun 2016 dan 2019. Tetapi pada 2017 dan 2018 terjadi anomali, pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan dampak pada penurunan angka pengangguran.

**Gambar 6.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY (persen), 2015-2019**



Sisi lain untuk melihat hubungan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran adalah menggunakan elastisitas dari laju penurunan pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Tabel 6.8 menunjukkan laju dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi DIY dan laju pertumbuhan dan rata-rata laju pertumbuhan tingkat pengangguran. Berdasarkan dua indikator ini maka dihitung elastisitas pengurangan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi (EPP).

EPP dihitung berdasarkan rata-rata penurunan persentase pengangguran dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2015-2019. Makna EPP dalam Tabel 6.8 adalah seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan diikuti oleh pengurangan persentase pengangguran sebesar 1,09 persen. Pada kurun waktu ini pertumbuhan ekonomi elastis dengan pengurangan persentase pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut mampu mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 69,2 ribu orang, maka angka EPP tersebut dapat diartikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen pada periode 2015-2019 akan mengurangi jumlah pengangguran rata-rata sebanyak 1.090 orang, atau dengan kata lain setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menarik kesempatan kerja sebanyak 1.090 orang penganggur. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang dipacu cukup efektif untuk menekan jumlah pengangguran di DIY.

Tabel 6.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di DIY (persen), 2015-2019

Rincian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan/ Penurunan	Elastisitas Pertumbuhan Pengangguran (EPP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4.95	5.05	5.26	6.20	6.60	5.77	
Laju Pertumbuhan Jumlah Pengangguran	22.23	-33.26	11.30	10.68	-6.22	-6.29	-1.0898

Sumber: BPS Provinsi DIY, data diolah.

#### D. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan adalah permasalahan kompleks yang terjadi di seluruh wilayah di dunia, tidak terkecuali di DIY. Persoalan kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan antarpenduduk, tingkat pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, serta permasalahan sosial yang lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipahami pada aspek ketidakmampuan secara ekonomi. Namun, kemiskinan juga bisa dimaknai sebagai bentuk kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal/kewirausahaan.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi atau moneter, kemiskinan dapat diukur menggunakan dua pendekatan, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Sementara, kemiskinan relatif mencakup kondisi seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang atau sekelompok orang disebut hampir miskin, bila sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Analisis kemiskinan yang disajikan dalam pembahasan merupakan kemiskinan yang diukur dengan pendekatan absolut. Angka kemiskinan ini sudah dirilis secara berkala oleh BPS dan digunakan secara resmi oleh pemerintah. Indikator kemiskinan dengan pendekatan ini bersifat makro. Artinya, menggambarkan kondisi kemiskinan secara agregat dalam suatu wilayah.

### 1. Perkembangan Kemiskinan

Perhitungan kemiskinan absolut yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk nominal uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nilai kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan menggunakan data dasar hasil survei pengeluaran rumah tangga Susenas yang dilakukan secara berkala. Seseorang dianggap miskin jika memiliki pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan.

Perkembangan garis kemiskinan (GK) yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan jumlah penduduk miskin di DIY menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan DIY pada kondisi September 2015 ditetapkan sebesar Rp356.378,- perkapita sebulan. Nilai ini meningkat menjadi Rp449.485,- perkapita sebulan pada kondisi September 2019. Artinya, garis kemiskinan secara nominal meningkat sebesar 29,27 persen selama lima tahun terakhir. Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh faktor kenaikan harga (inflasi) komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perubahan jenis komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi. Secara umum, garis kemiskinan di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dari garis kemiskinan perdesaan. Demikian pula, komposisi garis kemiskinan makanan juga masih lebih dominan dari garis kemiskinan non makanan. Proporsi garis kemiskinan makanan mencapai 71,86 persen, sementara non makanan hanya 28,14 persen dari garis kemiskinan DIY pada kondisi September 2019.

Perkembangan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) terlihat semakin menurun, meskipun polanya sedikit berfluktuasi. Pada kondisi Maret 2015, proporsi penduduk miskin DIY tercatat sebesar 14,91 persen. Angka ini secara bertahap menurun menjadi 11,44 persen pada kondisi September

2019. Angka 11,44 persen ini mengandung arti dari setiap 100 penduduk DIY terdapat 11 orang yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan di bawah garis kemiskinan atau berstatus miskin. Selama periode 2015-2019 terjadi penurunan proporsi penduduk miskin sebesar 3,47 poin persen. Sementara, jumlah penduduk miskin DIY secara absolut pada kondisi Maret 2015 tercatat sebanyak 550,23 ribu jiwa dan semakin berkurang menjadi 440,89 ribu jiwa pada kondisi September 2019. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin di DIY turun 5,39 persen per tahun. Perkembangan tingkat kemiskinan di DIY memiliki pola yang hampir sama dengan kemiskinan pada level nasional. Namun demikian, secara persentase tingkat kemiskinan di DIY masih berada di atas level nasional. Pada kondisi September 2019 persentase penduduk miskin secara nasional sudah berada di bawah level 10 persen yakni 9,22 persen (Gambar 6.14). Hal ini menyiratkan bahwa dengan pendekatan ekonomi atau moneter tingkat kemiskinan DIY lebih tinggi dari nasional.

**Gambar 6.14. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2015 – 2019**



Sumber: BPS DIY

Keadaan geografis, potensi sumber daya alam dan manusia, kualitas infrastruktur, serta kondisi sosial budaya di wilayah perdesaan sangat berbeda dengan perkotaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perbedaan corak perekonomian di masing-masing wilayah, termasuk pola hidup masyarakat, mata pencaharian penduduk, tingkat konsumsi, maupun dimensi kehidupan sosial ekonomi yang lainnya. Pada umumnya, wilayah perkotaan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga jenis lapangan usaha yang tersedia juga lebih beragam. Sementara, daerah perdesaan lebih didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berbasis pertanian, sehingga kesempatan kerja yang tersedia lebih terbatas dan lebih seragam pada aktivitas yang terkait dengan pertanian. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan antar wilayah beserta perkembangannya. Sampai dengan kondisi September 2019, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Namun demikian, tren penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan berjalan lebih cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di kawasan perdesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan pada

kondisi Maret 2015 sebesar 17,85 persen dan turun menjadi 13,67 persen pada kondisi September 2019. Sementara, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 13,43 persen pada Maret 2015 menjadi 10,62 persen pada September 2019.

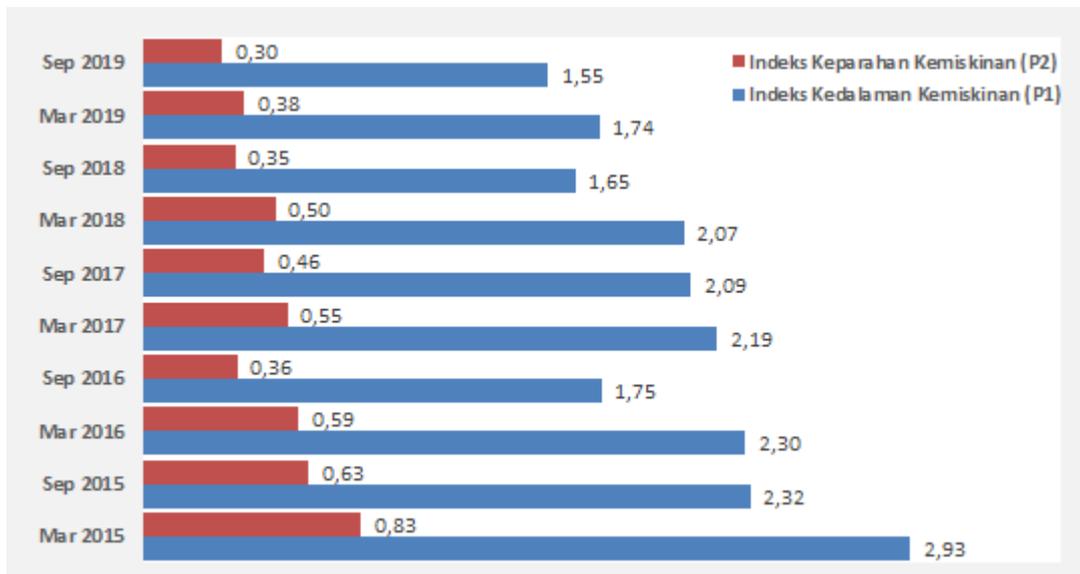
Penurunan jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan mampu berjalan lebih cepat dari perkotaan. Jumlah penduduk miskin (jiwa) di kawasan perdesaan sejak Maret 2015 hingga September 2019 berkurang hingga 78,4 ribu jiwa, sehingga rata-rata berkurang sebesar 10,40 persen setiap tahun. Sementara, di kawasan perkotaan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 30,91 ribu jiwa, sehingga rata-rata turun sebesar 2,43 persen per tahun. Selama kurun waktu yang sama, kesenjangan persentase kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tampak tidak mengalami perbedaan yang berarti. Meskipun hal ini dapat dimaknai sebagai adanya keselarasan program pengentasan kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan, namun rasanya lebih penting untuk mengevaluasi programnya karena angka kemiskinan DIY secara posisi masih relatif tinggi baik secara nasional maupun bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut aspek jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ )** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ )**. Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran  $P_1$  dan  $P_2$  dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Perkembangan Indeks kedalaman ( $P_1$ ) dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) selama periode 2015 hingga 2019 secara umum menunjukkan arah penurunan, meskipun polanya cukup berfluktuasi. Kondisi  $P_1$  dan  $P_2$  terburuk terjadi pada bulan Maret 2015. Kedua indeks terlihat berada pada level paling tinggi dan cenderung meningkat dari periode sebelumnya, akibat pengaruh kondisi perekonomian makro yang sedikit melambat, nilai tukar mata uang yang melemah, serta pengurangan subsidi energi. Hal ini berimbas pada kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga maupun distribusinya. Kondisi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada kelas menengah ke bawah menerima dampak yang paling parah, sehingga kedua indeks tersebut tercatat meningkat. Namun demikian, dalam empat tahun terakhir nilai kedua indeks terlihat semakin menurun. Indeks  $P_1$  menurun hingga 1,55 pada kondisi September 2019. Penurunan ini menggambarkan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang. Sementara, Indeks  $P_2$  menurun hingga level 0,30 di Bulan September 2019. Penurunan indeks  $P_2$  ini menggambarkan derajat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin berkurang. Gambaran pola

perkembangan kedua indeks tersebut cukup selaras dengan perkembangan indeks  $P_0$  maupun jumlah penduduk miskin.

**Gambar 6.15. Indeks Kedalaman ( $P_1$ ) dan Keparahan ( $P_2$ ) Kemiskinan DIY, 2015 – 2019**



Sumber: BPS DIY

Selama hampir dua dekade terakhir level indeks  $P_1$  dan  $P_2$  di daerah perdesaan tercatat lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini menyiratkan bahwa persoalan kemiskinan perdesaan lebih kompleks dari sisi ukuran maupun penanganannya dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan. Namun demikian, gap kedua indeks di daerah perkotaan dan perdesaan secara bertahap semakin mengecil, bahkan nilai indeks  $P_2$  di perkotaan pada kondisi 2019 sudah lebih tinggi dari perdesaan. Melalui dua ukuran ini ( $P_1$  dan  $P_2$ ) juga bisa dilihat keberhasilan dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

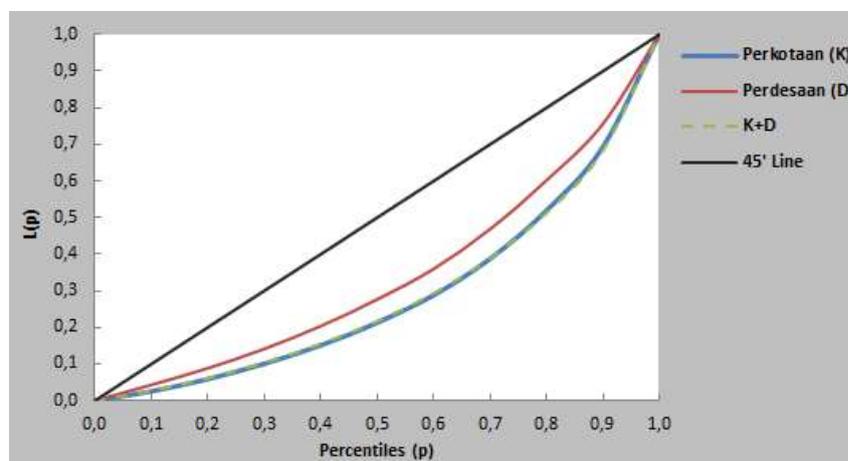
## 2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pemerataan distribusi pendapatan antarpenduduk di suatu wilayah. Beberapa ukuran yang cukup populer dan digunakan dalam kajian ini mencakup Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia. Ketiga ukuran ini cukup mampu menjelaskan besaran ketimpangan secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2019, kondisi distribusi pendapatan antarpenduduk yang diproksi menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita menunjukkan adanya gejala ketimpangan atau ketidakmerataan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk Kurva Lorenz dalam Gambar 6.16. Kurva Lorenz DIY pada kondisi Maret 2019 masih jauh dari garis diagonal utama. Kondisi ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY

masih timpang atau belum merata. Artinya, total pengeluaran penduduk pada kelompok berpendapatan tinggi masih mendominasi total pengeluaran penduduk DIY. Sebaliknya, andil pengeluaran penduduk pada kelompok berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran masih rendah. Sebagai catatan, Kurva Lorenz hanya mampu menyimpulkan kondisi distribusi menggunakan pendekatan grafis dan belum mampu memberi kesimpulan kondisi distribusi secara kuantitatif. Secara relatif, kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran di wilayah perkotaan cenderung lebih timpang dibandingkan dengan kondisi distribusi pendapatan di wilayah perdesaan. Atau dengan kata lain distribusi pendapatan perdesaan lebih merata. Hal ini terlihat dari posisi kurva Lorenz masing-masing wilayah.

Gambar 6.16. Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas Maret 2019

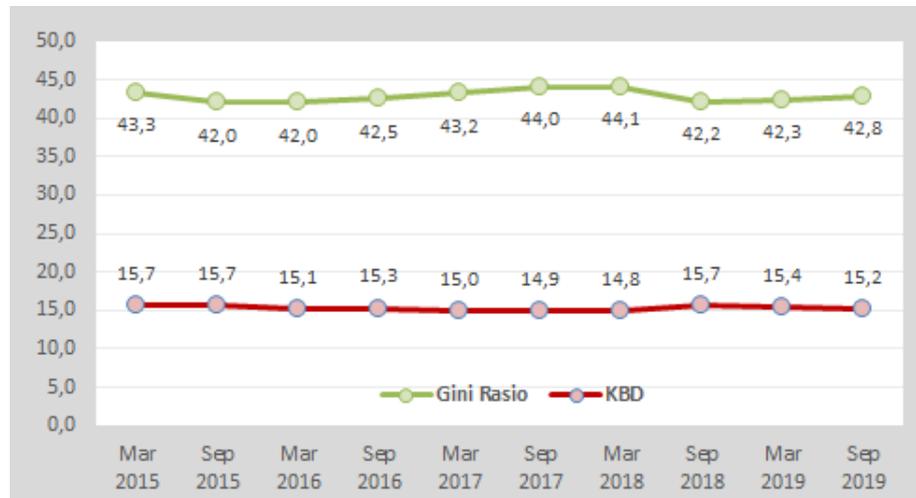


Sumber: BPS DIY

Untuk melihat level ketimpangan/ketidakmerataan dalam distribusi secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan pendekatan ukuran Rasio Gini. Gambar 6.17 menyajikan tingkat pemerataan pendapatan yang diukur menggunakan Rasio Gini selama periode 2015-2019 dalam satuan persen. Perkembangan Rasio Gini selama periode 2015-2019 masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan, yakni selalu di atas level 0,4. Artinya, kondisi distribusi pendapatan antarpenduduk masih belum merata dan tercatat dalam kategori ketimpangan moderat. Namun demikian, posisinya sudah dekat dengan batas kategori timpang. Rasio Gini DIY pada kondisi September 2019 menembus angka 0,43. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai level 0,42. Secara umum, besarnya nilai Rasio Gini ini menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar. Kenaikan Rasio Gini menggambarkan ketimpangan yang semakin melebar, sebaliknya penurunan Rasio Gini menggambarkan ketimpangan pendapatan yang makin mengecil. Secara umum, ketimpangan pendapatan antarpenduduk di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau dengan kata lain distribusi pendapatan di perdesaan lebih merata. Hal ini terkait dengan

karakteristik sosial ekonomi terutama lapangan usaha serta tingkat upah di wilayah perkotaan yang lebih heterogen mulai dari sektor formal sampai sektor informal.

**Gambar 6.17. Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (persen) 2015–2019**



Sumber: BPS DIY

Indikator lain untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan adalah ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD). Hasil hitungan ukuran ketimpangan KBD menjelaskan kondisi yang hampir sama dengan Rasio Gini. Persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah terlihat semakin menurun dari 17,7 persen pada tahun 2015 menjadi hanya 15,2 persen pada tahun 2019. Demikian pula dengan 40 persen penduduk berpendapatan menengah, porsi distribusi pendapatannya juga relatif stabil dan bahkan cenderung menurun. Sebaliknya, pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memiliki porsi distribusi total pendapatan yang semakin meningkat.

Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan andil persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa kondisi distribusi pendapatan penduduk di DIY masih  **timpang**  atau belum merata. Meskipun demikian, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima ketimpangan pendapatan antarpenduduk di DIY masih dalam skala ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Berdasarkan skala ukuran kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk DIY juga masuk di skala moderat (*range* 12-17 persen).

Selama periode 2015–2019, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah berkurang sebesar 0,29 poin persen. Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah menerima tambahan sebesar 1,69 poin. Sementara, andil kelompok 20 persen penduduk yang berpendapatan tertinggi juga turun sebesar 1,40 poin persen. Dengan kondisi ini seharusnya ketimpangan akan sedikit menurun. Namun, indikator Rasio Gini justru sedikit meningkat di bulan Maret 2019. Penyebabnya adalah kelompok penduduk yang berpendapatan menengah menerima tambahan porsi yang

lebih besar dibanding kelompok yang berpendapatan tertinggi. Secara umum, rasio antara proporsi pendapatan dari 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi dengan 40 persen penduduk berpendapatan terendah tercatat sebesar 3,2 kali lipat.

**Tabel 6.9. Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2015 - 2019**

Indikator	Mar 2015	Mar 2016	Mar 2017	Mar 2018	Mar 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Andil Pendapatan					
a. 40% Penduduk Pendapatan Terendah (%)	15,65	15,08	14,96	14,83	15,36
b. 40% Penduduk Pendapatan Menengah (%)	34,07	37,13	34,94	34,38	35,76
c. 20% Penduduk Pendapatan Tertinggi (%)	50,28	47,79	50,12	50,79	48,88
2. Rasio Kuznet (c/a)	3,21	3,17	3,35	3,42	3,18
3. Rasio Gini	0,42	0,43	0,44	0,42	0,42

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS bulan Maret

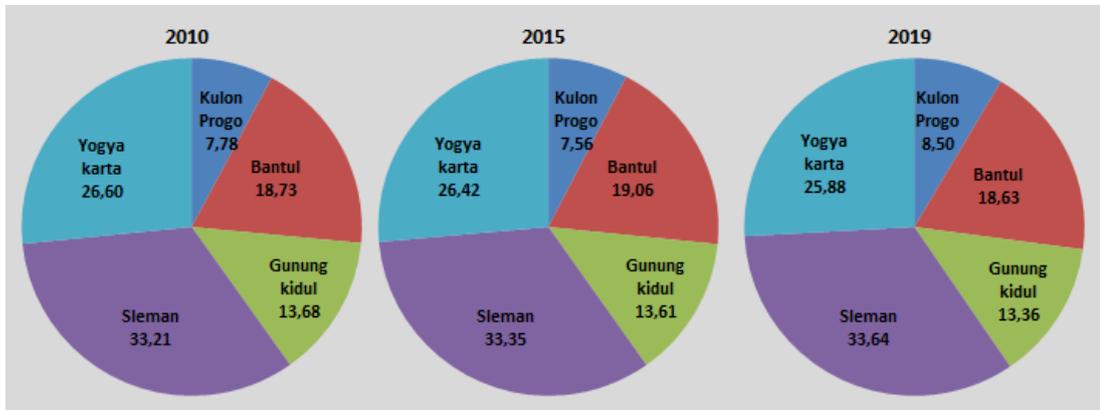
**E. Pertumbuhan dan Disparitas Ekonomi Kabupaten/Kota**

**1. Sebaran Pertumbuhan**

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada level provinsi pada hakikatnya merupakan agregasi atau gabungan dari pertumbuhan semua wilayah kabupaten/kota yang berada di bawahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki andil atau kontribusi pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan ukuran ekonomi maupun tingkat perubahannya. Besarnya andil pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh arah kebijakan pembangunan yang dijalankan apakah terpusat di suatu wilayah tertentu atau tersebar secara merata di seluruh wilayah.

Kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap struktur perekonomian DIY 2010-2019 cukup bervariasi, meskipun secara urutan masih tetap. Kabupaten Sleman memiliki kontribusi nilai tambah yang terbesar. Proporsi mencapai 33,64 persen terhadap total PDRB DIY pada tahun 2019. Kontribusi ini relatif stabil dalam satu dekade terakhir. Andil terbesar berikutnya adalah Kota Yogyakarta dengan proporsi sebesar 25,88 persen. Proporsi ini cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Ukuran ekonomi di kedua wilayah paling besar, karena aktivitas perekonomian DIY terpusat di kedua wilayah. Sementara, Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki ukuran ekonomi paling kecil dengan kontribusi sebesar 8,50 persen terhadap perekonomian DIY pada tahun 2019. Besarnya kontribusi ini meningkat secara nyata dalam satu dekade terakhir akibat aktivitas investasi yang cukup masif, terutama pembangunan bandar udara *Yogyakarta International Airport* (YIA) mulai tahun 2017.

Gambar 6.18. Perbandingan Distribusi Andil PDRB Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2019



Sumber: diolah dari data PDRB Kabupaten/Kota DIY, BPS Provinsi DIY

Sebaran pertumbuhan yang dicapai oleh seluruh kabupaten/kota juga memiliki pola yang cukup bervariasi. Kabupaten Sleman tercatat menjadi wilayah yang selalu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas level DIY. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul selalu menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya di bawah level DIY. Perubahan pola pertumbuhan ekonomi terjadi selama periode 2017-2019. Kabupaten Kulon Progo selama periode 2015-2016 selalu memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari level DIY. Mulai tahun 2017 sampai 2019 laju pertumbuhan ekonominya mampu melejit di atas level pertumbuhan DIY. Bahkan, pertumbuhan selama periode tersebut tercatat paling tinggi di DIY dan mampu menembus angka dua digit yakni 10,62 persen di tahun 2018 dan 13,49 persen di tahun 2019. Dari sisi permintaan, pertumbuhan yang sangat tinggi ini didorong oleh meningkatnya aktivitas investasi terutama pembangunan bandar udara YIA.

Aktivitas pembangunan Bandar udara YIA juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi DIY hingga mencapai level paling tinggi selama lebih dari dua dekade terakhir. Secara statistik, dampak lanjutan dari aktivitas pembangunan YIA adalah akan meningkatkan level PDRB perkapita Kabupaten Kulon Progo baik secara nominal maupun riil. Namun, seberapa besar manfaat yang mampu dinikmati oleh penduduk Kulon Progo sangat tergantung dari seberapa besar keterlibatan mereka dalam aktivitas pembangunan tersebut. Apakah posisinya hanya sebagai penonton atau mampu menjadi bagian dari proses. Keberlanjutan capaian pertumbuhan yang sangat tinggi ini akan mampu dipertahankan atau tidak juga sangat tergantung dari aktivitas perekonomian di sisi penawaran pasca operasional kegiatan bandar udara YIA. Dengan kata lain, setelah bandara beroperasi apakah mampu mendorong tumbuhnya perekonomian sektoral yang menghasilkan kesempatan kerja baru pada lapangan usaha terkait seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estat, jasa perusahaan, dan lainnya.

**Tabel 6.10. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2019 (Persen)**

Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
	Pertumbuhan	Andil								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulonprogo	4,62	0,34	4,76	0,35	5,97	0,45	10,84	0,83	13,49	1,07
Bantul	4,97	0,91	5,06	0,94	5,10	0,95	5,46	1,03	5,53	1,03
Gunungkidul	4,82	0,63	4,89	0,65	5,00	0,66	5,15	0,69	5,33	0,70
Sleman	5,18	1,72	5,25	1,75	5,35	1,80	6,37	2,17	6,49	2,20
Yogyakarta	5,09	1,34	5,11	1,36	5,24	1,40	5,48	1,48	5,96	1,59
<b>DIY</b>	<b>4,95</b>		<b>5,05</b>		<b>5,26</b>		<b>6,20</b>		<b>6,60</b>	

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data PDRB 2015-2019

Andil pertumbuhan yang disumbang oleh semua kabupaten/Kota selama periode 2015-2019 juga cukup bervariasi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi dua wilayah yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Andil kedua wilayah masing-masing tercatat sebesar 2,20 dan 1,59 poin persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2019. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya disumbang oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 1,07 poin persen. Posisi Kulon Progo di tahun 2019 ini sudah melampaui dua kabupaten lain yakni Gunungkidul dan Bantul. Padahal, pada periode sebelumnya andil pertumbuhan Kulon Progo selalu selalu lebih rendah dari Bantul dan Gunungkidul.

**2. Sektor Ekonomi Potensial di Kabupaten/Kota**

Setiap wilayah memiliki potensi lapangan usaha unggulan yang berbeda-beda yang akan diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih efisien dan memiliki daya saing. Identifikasi potensi lapangan usaha potensial atau unggulan di setiap wilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur potensi ekonomi suatu wilayah adalah metode *Economic Base Approach*. Metode ini mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan setiap lapangan usaha serta mengelompokkannya menjadi lapangan usaha unggulan dan non unggulan. Pendekatan metode yang cukup populer digunakan adalah indeks *Location Quotient* atau LQ, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis kuadran. Indeks LQ mengkaji potensi setiap kategori usaha dari sisi andil atau kontribusi, sementara MRP mengkaji potensi dari sisi pertumbuhan setiap kategori usaha.

Identifikasi potensi lapangan usaha unggulan di semua kabupaten/kota menggunakan indeks LQ pada tahun 2019 disajikan dalam Tabel 6.11. Lapangan usaha akan menjadi unggulan atau sektor basis di suatu wilayah jika memiliki nilai indeks LQ>1. Sebaliknya, jika nilai indeks LQ ≤ 1 maka lapangan usaha tersebut tidak menjadi sektor basis

## Bab 6 Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY

atau kurang potensial. Berdasarkan Tabel 6.11, kategori usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pertambangan dan penggalian (sektor primer) pada tahun 2018 menjadi sektor basis atau potensial di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Sementara, sebagian besar kategori usaha yang berbasis jasa (sektor tersier) menjadi sektor basis atau potensial di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kategori usaha industri manufaktur menjadi sektor basis di Kabuapten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sementara, kategori usaha konstruksi menjadi sektor basis di Kulon Progo dan Sleman.

**Tabel 6.11. Indeks LQ Tahun 2019 dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Analisis (RP<sub>a</sub>) 2015-2019 menurut Kabupaten/Kota di DIY**

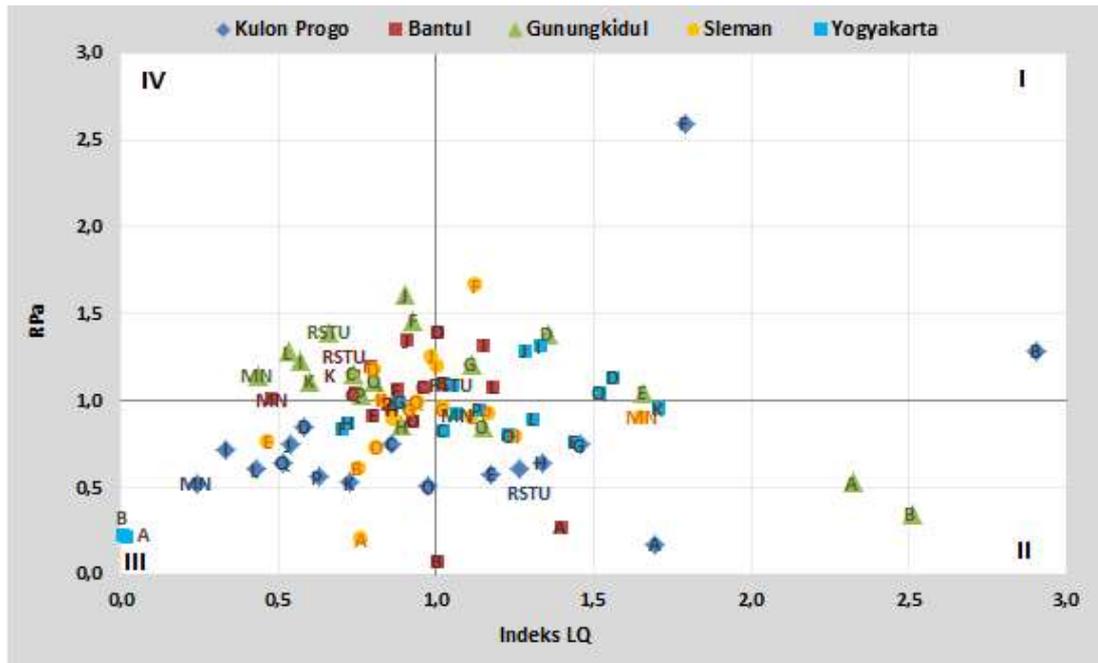
Kat	Uraian	Indeks LQ 2019					Rasio Pertumbuhan 2015-2019				
		KP	BTL	GK	SLM	YK	KP	BTL	GK	SLM	YK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian	1,69	1,40	2,51	0,76	0,02	0,17	0,27	0,35	0,20	0,21
B	Pertambangan dan Penggalian	2,91	1,00	2,32	0,76	0,01	1,29	0,07	0,53	0,61	0,22
C	Industri Pengolahan	0,86	1,18	0,74	1,02	1,02	0,75	1,08	1,15	0,95	0,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,58	1,01	0,66	0,80	1,56	0,85	1,40	1,39	1,18	1,13
E	Pengadaan Air	1,18	0,80	1,66	0,47	1,44	0,58	0,92	1,05	0,76	0,76
F	Konstruksi	1,79	0,87	0,93	1,13	0,70	5,60	1,06	1,46	1,66	0,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran	1,46	1,02	1,11	0,92	0,88	0,75	1,10	1,21	0,95	0,99
H	Transportasi dan Pergudangan	1,34	0,86	0,89	1,25	0,72	0,65	0,95	0,86	0,79	0,87
I	Akomodasi dan Makan Minum	0,33	1,15	0,57	1,00	1,33	0,72	1,32	1,23	1,19	1,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,91	0,90	0,99	1,28	0,75	1,34	1,61	1,25	1,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,74	0,60	0,83	1,71	0,53	1,14	1,11	1,00	0,95
L	Real Estate	0,43	0,96	0,53	1,12	1,31	0,61	1,08	1,28	0,90	0,89
MN	Jasa Perusahaan	0,24	0,48	0,43	1,65	1,07	0,52	1,01	1,14	0,91	0,92
O	Administrasi Pemerintahan	0,97	0,93	1,15	0,81	1,23	0,51	0,88	0,85	0,73	0,80
P	Jasa Pendidikan	0,63	0,85	0,76	1,17	1,14	0,56	0,98	1,04	0,93	0,94
Q	Jasa Kesehatan	0,52	0,74	0,81	0,94	1,52	0,64	1,04	1,11	0,99	1,04
RSTU	Jasa lainnya	1,27	0,79	1,35	0,87	1,05	0,61	1,19	1,39	0,89	1,09
<b>PDRB</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data PDRB 2015-2019

Dalam analisis MRP, nilai rasio pertumbuhan daerah analisis (RP<sub>a</sub>) > 1 menggambarkan bahwa kategori usaha tersebut memiliki potensi pada level regional. Sebaliknya, jika RP<sub>a</sub> ≤ 1 menggambarkan kategori usaha tersebut tidak potensial pada level regional. Nilai penghitungan RP<sub>a</sub> 2015-2019 menunjukkan hasil yang sangat bervariasi antarwilayah (Tabel 6.11). Secara umum, lapangan usaha pertanian; pertambangan dan penggalian; pengadaan air; transportasi dan pergudangan; dan administrasi pemerintahan tidak menjadi potensi di hampir semua kabupaten/kota di DIY. Kategori industri manufaktur menjadi potensi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Kategori konstruksi potensi di semua kabupaten, kecuali Kota Yogyakarta. Sementara, kategori yang berbasis jasa menjadi potensi di semua kabupaten/kota kecuali Kulon Progo.

Berdasarkan nilai indeks LQ dan  $RP_a$  dapat disusun sebuah *scatterplot* yang menggambarkan sebaran potensi setiap kategori usaha menurut wilayah kabupaten/kota dari sisi *share* secara ekonomi maupun dari sisi pertumbuhan terhadap wilayah acuan yakni DIY. Lapangan usaha yang potensial akan memiliki nilai Indeks LQ  $>1$  dan nilai  $RP_a > 1$  atau terletak di kuadran I. Sebaliknya, lapangan usaha yang tidak potensial akan memiliki nilai Indeks LQ  $\leq 1$  dan nilai  $RP_a \leq 1$  atau terletak di kuadran III.

**Gambar 6.19.** *Scatterplot* Indeks LQ 2019 dan Rasio Pertumbuhan 2015-2019 menurut Kategori Usaha dan Kabupaten/Kota di DIY



Sumber: diolah dari data PDRB 2015-2019, BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

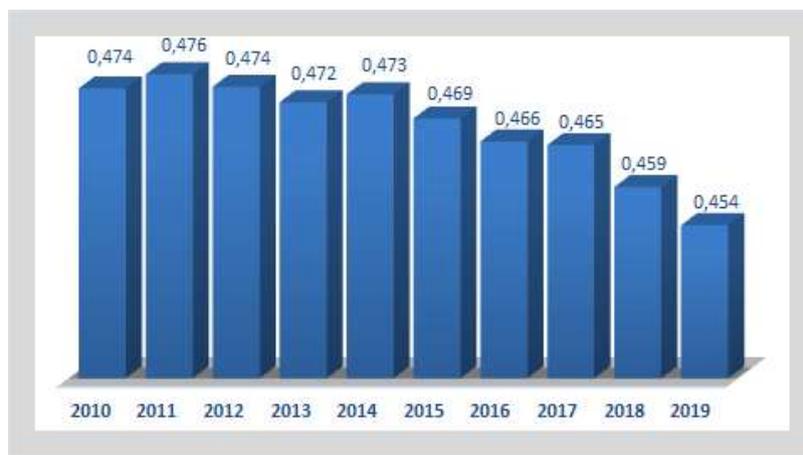
Berdasarkan *scatterplot* 6.19, kategori usaha konstruksi (F) dan pertambangan penggalian (B) menjadi lapangan usaha yang potensial di Kulon Progo karena menjadi sektor basis dan memiliki rasio pertumbuhannya tinggi. Hasil ini sangat terkait dengan aktivitas pembangunan YIA yang mendorong pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dan pertambangan penggalian. Sementara, lapangan usaha industri pengolahan dan sebagian besar kategori yang berbasis jasa berada dalam kelompok yang tidak potensial dari sisi andil maupun pertumbuhan. Lapangan usaha yang potensial di Bantul adalah industri pengolahan, listrik, serta perdagangan besar dan eceran. Sebaliknya, lapangan usaha yang tidak potensial di Bantul adalah pengadaan air, transportasi, jasa pemerintahan, serta jasa pendidikan. Lapangan usaha yang potensial di Sleman adalah konstruksi dan pengadaan akomodasi dan makan minum. Sementara, lapangan usaha yang potensial di Kota Yogyakarta sebagian besar merupakan kategori yang berbasis jasa seperti penyediaan akomodasi dan makan minum; infokom; jasa kesehatan; dan pengadaan listrik. Sebaliknya, lapangan usaha yang tidak potensial di Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kategori usaha yang berbasis pertanian; pertambangan dan penggalian; konstruksi, perdagangan, dan transportasi.

Disparitas pendapatan antarindividu penduduk yang diukur menggunakan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas pendapatan antar wilayah juga perlu dicermati sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

### 3. Indeks Ketimpangan Regional

Berdasarkan data PDRB perkapita menurut kabupaten/kota dan provinsi serta data jumlah penduduk dapat diukur indikator ketimpangan antarwilayah dalam suatu provinsi. Salah satu indikator untuk mengukurnya adalah Indeks Williamson. Indeks ini dimaknai sebagai tingkat ketimpangan antarkabupaten/kota. Ketimpangan pendapatan regional di wilayah DIY yang diindikasikan oleh Indeks Williamson selama periode 2015-2019 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Indeks Williamson pada tahun 2015 sebesar 0,469 dan menurun menjadi 0,454 pada tahun 2019 (Gambar 6.20). Penurunan indeks ini menggambarkan ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di DIY yang semakin berkurang. Namun demikian, level ketimpangan regionalnya tercatat masih cukup tinggi yakni di batas atas kriteria moderat. Penurunan indeks ketimpangan yang cukup tinggi terjadi selama periode 2018-2019. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas investasi di wilayah pinggiran DIY terutama di Kulon Progo dan Gunungkidul. Investasi pembangunan bandara yang cukup masif di Kulon Progo mampu mendorong pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita, sehingga gap ketimpangan dengan kabupaten/kota lain semakin mengecil.

**Gambar 6.20. Indeks Williamson DIY, 2010-2019**



Sumber: diolah dari data PDRB 2010-2019, BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

### 4. Disparitas Sektoral (*Shift Share Analysis*)

Berdasarkan kategori lapangan usaha, perekonomian suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik antara yang satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah dan bila perbedaan tersebut mencolok timpang maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan yang signifikan dari pendapatan masing-masing sektor ekonomi. Kesenjangan output antarkategori dalam perekonomian dikenal dengan istilah disparitas sektoral dan dikaji dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*). Analisis *shift share* juga berguna untuk mengkaji pergeseran serta peranan perekonomian di suatu daerah. Model ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Di samping itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Implementasi analisis *shift share* perekonomian dalam provinsi, disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuannya, dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam kabupaten/kota itu sendiri. Berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi, maka dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektor atau kategori. Suatu kabupaten/kota atau kategori lapangan usaha di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuannya, karena tergantung pada peran atau *sharenya* terhadap provinsi.

### a. Analisis Pangsa Regional (PR)

Pemilihan periode waktu dalam analisis *shift share* sangat menentukan hasil atau output dari analisis. Artinya, untuk suatu periode yang dipilih dengan periode yang lain memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan. Oleh karena itu, analisis *shift share* yang digunakan untuk mengkaji struktur perekonomian beserta perubahannya menggunakan referensi waktu selama periode 2010-2019. Pertimbangan dipilihnya periode tersebut adalah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dalam periode satu dasa warsa terakhir. Bila periode yang diamati terlalu pendek, maka pergeserannya struktur ekonomi tidak terlihat begitu nyata.

Pangsa Regional (PR) merupakan komponen andil pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi nasional atau regional yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penghitungan dalam analisis *Shift Share* periode 2010-2019, nilai komponen PR yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman. Besarnya komponen PR di Kabupaten Sleman mencapai Rp13,23 triliun dan memiliki kontribusi sebesar 33,21 persen terhadap total perekonomian DIY. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2010-2019. Dengan kata lain, Kabupaten Sleman menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Hasil ini masih sama dengan hasil analisis pada periode kajian sebelumnya. Pangsa terbesar berikutnya dicapai oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kontribusi 26,60 persen dan 18,73 persen. Sementara, Kabupaten Gunungkidul dan

Kulon Progo masih tetap berada di urutan keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,68 persen dan 7,78 persen.

Tabel 6.12. Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010-2019

Kategori Lapangan Usaha	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	636.933	1.136.619	1.467.702	1.202.946	21.655	4.465.855
2. Pertambangan & Penggalian	46.324	56.153	86.104	61.367	487	250.436
3. Industri Pengolahan	398.657	1.211.505	541.366	1.955.657	1.567.347	5.674.532
4. Pengadaan Listrik, Gas	2.844	10.889	4.926	15.908	23.764	58.331
5. Pengadaan Air	4.825	6.984	9.856	7.247	17.954	46.866
6. Konstruksi	256.613	720.431	501.669	1.471.049	857.749	3.807.512
7. Perdagangan	387.561	586.464	471.671	974.973	748.316	3.168.986
8. Pengangkutan & Pergudangan	293.711	390.875	304.350	786.518	473.120	2.248.574
9. Akomodasi & Makan Minum	109.514	726.131	284.139	1.231.381	1.183.361	3.534.527
10. Informasi dan Komunikasi	173.922	652.656	410.420	1.208.574	1.362.597	3.808.168
11. Jasa Keuangan	77.270	165.490	92.285	340.280	579.205	1.254.531
12. Real Estat	106.307	469.052	177.817	1.039.684	977.019	2.769.879
13. Jasa Perusahaan	9.931	39.453	24.978	243.723	126.796	444.882
14. Administrasi Pemerintahan	240.514	493.407	462.386	797.506	948.081	2.941.893
15. Jasa Pendidikan	183.277	510.701	329.860	1.297.112	1.021.427	3.342.376
16. Jasa Kesehatan	42.546	128.860	100.138	289.803	386.989	948.335
17. Jasa-jasa	128.414	153.678	178.594	303.798	296.523	1.061.008
<b>PDRB</b>	<b>3.099.163</b>	<b>7.459.347</b>	<b>5.448.264</b>	<b>13.227.527</b>	<b>10.592.390</b>	<b>39.826.692</b>

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Dengan mencermati nilai pangsa masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Sleman maka nilai komponen PR tertinggi tercatat pada kategori usaha industri pengolahan (C) dan diikuti oleh konstruksi (F). Kategori lain yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sleman adalah kategori jasa pendidikan (P); penyediaan akomodasi dan makan minum (I); informasi dan komunikasi (J); pertanian (A); dan real estat (L). Di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta nilai PR kategori industri pengolahan (C) tercatat tertinggi. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul nilai PR kategori industri pengolahan berada pada urutan kedua setelah kategori pertanian (A). Secara umum, gambaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di seluruh kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta masih menjadi *leading sector* untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena pangasanya sangat besar.

**b. Analisis Pergeseran (Shift Analysis)**

Analisis pergeseran (*shift analysis*) dalam analisis *shift share* dapat digunakan untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi selama periode 2010-2019. Komponen dalam analisis pergeseran terdiri dari nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Different Shift* (DS). Hasil perhitungan menggunakan data PDRB provinsi dan

kabupaten/kota, nilai PS dengan arah positif tertinggi di D.I. Yogyakarta dimiliki oleh kategori informasi dan komunikasi (J), konstruksi (F), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Nilai PS positif urutan terbesar berikutnya adalah jasa keuangan (K), jasa pendidikan (P), dan perdagangan (G). Sementara, kategori industri pengolahan (C), pertanian (A), dan pengangkutan dan pergudangan (H) memiliki nilai PS dengan arah negatif terbesar. Secara eksplisit, hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode 2010-2019 struktur ekonomi D.I. Yogyakarta secara makro lebih bertumpu pada kelompok sektor tersier yang sifat output dari aktivitasnya berbasis jasa. Pangsa kategori pertanian dalam perekonomian D.I. Yogyakarta semakin menurun dan tergeser oleh kategori usaha lain yang semakin menguat, meskipun lapangan usaha pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk terutama di wilayah perdesaan. Menguatnya lapangan usaha yang berbasis jasa juga menunjukkan pangsa ekonomi dari wilayah perkotaan semakin mendominasi, karena aktivitas yang berbasis jasa menjadi lapangan usaha utama sebagian besar penduduk wilayah perkotaan.

**Tabel 6.13. *Proportional Shift (PS)* menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010–2019**

Kategori Lapangan Usaha	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	-503.213	-897.993	-1.159.567	-950.395	-17.109	-3.528.277
2. Pertambangan & Penggalian	-18.411	-22.318	-34.222	-24.390	-194	-99.534
3. Industri Pengolahan	-118.831	-361.124	-161.370	-582.940	-467.193	-1.691.458
4. Pengadaan Listrik, Gas	593	2.269	1.027	3.315	4.952	12.156
5. Pengadaan Air	-2.048	-2.964	-4.183	-3.076	-7.620	-19.890
6. Konstruksi	98.108	275.435	191.798	562.410	327.934	1.455.684
7. Perdagangan	41.028	62.084	49.932	103.211	79.217	335.472
8. Pengangkutan & Pergudangan	-53.313	-70.949	-55.244	-142.765	-85.878	-408.149
9. Akomodasi & Makan Minum	29.177	193.460	75.702	328.071	315.278	941.688
10. Informasi dan Komunikasi	77.767	291.827	183.515	540.400	609.269	1.702.778
11. Jasa Keuangan	31.346	67.134	37.437	138.041	234.965	508.924
12. Real Estat	8.508	37.539	14.231	83.208	78.192	221.678
13. Jasa Perusahaan	1.232	4.896	3.100	30.246	15.736	55.211
14. Administrasi Pemerintahan	-18.783	-38.532	-36.110	-62.281	-74.040	-229.745
15. Jasa Pendidikan	20.315	56.608	36.563	143.777	113.219	370.483
16. Jasa Kesehatan	12.112	36.684	28.508	82.502	110.169	269.975
17. Jasa-jasa	12.467	14.919	17.338	29.493	28.787	103.005
<b>PDRB</b>	<b>-381.945</b>	<b>-351.024</b>	<b>-811.546</b>	<b>278.829</b>	<b>1.265.686</b>	<b>0</b>

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Hasil penghitungan komponen PS pada level kabupaten/kota menunjukkan bahwa nilai PS yang tertinggi selama periode 2010-2019 dicapai oleh Kota Yogyakarta. Hal ini masih sama seperti periode kajian sebelumnya. Nilai PS Kota Yogyakarta mencapai Rp1,27 triliun dan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Wilayah lain yang memiliki nilai PS positif adalah kabupaten Sleman. Secara umum, nilai PS positif di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman ini menggambarkan bahwa kedua wilayah memiliki

keuntungan lokasi (*location advantage*). Sementara, ketiga kabupaten lain justru memiliki nilai PS dengan arah negatif dan yang paling besar tercatat di Kabupaten Gunungkidul. Penyebab nilai PS memiliki arah negatif untuk masing-masing kabupaten berbeda-beda. Secara umum arah negatif nilai PS dipengaruhi oleh besarnya nilai negatif PS pada empat kategori, yaitu: pertanian; industri pengolahan; pengangkutan dan pergudangan; jasa pemerintahan; serta pertambangan dan penggalan.

Pendorong tingginya nilai PS di Kota Yogyakarta dan Sleman adalah kategori informasi dan komunikasi (J); penyediaan akomodasi dan makan minum (I); jasa keuangan (K); konstruksi (F); jasa pendidikan (P); dan jasa kesehatan (Q). Keenam kategori tersebut juga memiliki nilai PS positif di tiga kabupaten yang lain, namun nilainya tidak mampu mengkompensasi tingginya nilai PS negatif pada kategori pertanian (A) dan industri pengolahan (C). Akibatnya nilai agregat PS di ketiga kabupaten tetap bernilai negatif. Tabel 6.13 juga menjelaskan bahwa hasil penghitungan PS negatif terbesar di semua kabupaten/kota di DIY adalah kategori pertanian (A) dan industri pengolahan (C). Spesialisasi Kota Yogyakarta terletak pada kategori yang berbasis perdagangan dan jasa, karena posisinya sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian D.I. Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai struktur ekonomi yang lebih menguntungkan (*favourable economic structure*) untuk kategori-kategori tersebut.

Kondisi perkembangan output kategori pertanian dan industri pengolahan secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Kategori pertanian terlihat semakin melambat pertumbuhannya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman. Kategori industri pengolahan juga mengalami hal yang sama, meskipun perlambatannya tidak secepat kategori pertanian. Oleh karena pangsa kedua kategori tersebut dalam struktur ekonomi tergolong yang tertinggi, perkembangan ekonomi kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan pertumbuhan kategori pertanian dan industri pengolahan.

Hasil perhitungan nilai *Different Shift* (DS) menunjukkan bahwa tiga kabupaten memiliki nilai DS dengan arah positif, yakni Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman. Nilai DS positif memiliki makna bahwa daerah tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sementara, Kota Yogyakarta dan Bantul menjadi daerah yang memiliki nilai DS dengan arah negatif atau memiliki daya saing yang relatif lebih rendah. Nilai DS tertinggi selama periode 2010-2019 dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1,02 triliun dan diikuti Kabupaten Sleman. Nilai DS terbesar ini menjelaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo dan Sleman memiliki daya saing regional yang lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan daya saing perekonomian regional Kulon Progo lebih didorong oleh aktivitas kategori usaha konstruksi (F). Sementara, daya saing regional Sleman terutama ditopang oleh kategori usaha pengangkutan dan pergudangan (H) serta informasi dan komunikasi (J). Kondisi ini relatif sama dengan hasil kajian pada periode sebelumnya. Daya saing regional di Kabupaten Gunungkidul terutama ditopang oleh kategori

informasi dan komunikasi (J), pertanian (A), industri pengolahan (C), dan jasa-jasa (RSTU). Hasil ini juga relatif sama dengan kondisi hasil kajian pada periode sebelumnya.

Daya saing regional Bantul yang memiliki arah negatif dipengaruhi oleh kategori lapangan usaha konstruksi (F) yang tidak mampu dikompensasi oleh kategori usaha yang lainnya. Hasil ini berbeda dengan analisis pada periode sebelumnya yang menghasilkan nilai DS positif. Sementara, nilai DS negatif di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh semua kategori karena memiliki arah negatif terutama pada kategori konstruksi (F); informasi komunikasi (J); real estat (L); serta pengangkutan dan pergudangan (H).

**Tabel 6.14. Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2010–2019**

Kategori Lapangan Usaha	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	49.106	-8.883	61.814	-100.167	-1.870
2. Pertambangan & Penggalian	35.802	-20.856	-11.646	-3.111	-189
3. Industri Pengolahan	88.476	30.641	38.484	-93.469	-64.130
4. Pengadaan Listrik Gas	249	1.155	457	-236	-1.625
5. Pengadaan Air	-142	387	395	134	-774
6. Konstruksi	937.408	-293.008	-138.319	8.309	-514.390
7. Perdagangan	42.221	46.761	27.499	-12.225	-104.257
8. Pengangkutan & Pergudangan	-50.138	-9.048	-51.085	215.502	-105.230
9. Akomodasi & Makan Minum	-19.741	45.618	-14.508	14.402	-25.770
10. Informasi dan Komunikasi	-17.416	4.490	108.125	129.643	-224.843
11. Jasa Keuangan	-4.517	26.437	18.553	30.955	-71.428
12. Real Estat	-6.095	49.967	23.017	62.345	-129.234
13. Jasa Perusahaan	-2.069	-1.162	2.275	10.592	-9.637
14. Administrasi Pemerintahan	4.197	21.075	-3.845	-11.753	-9.674
15. Jasa Pendidikan	-5.798	20.911	12.207	31.620	-58.941
16. Jasa Kesehatan	-1.415	178	7.161	23.528	-29.452
17. Jasa-jasa	-27.836	17.722	38.036	-4.260	-23.662
<b>PDRB</b>	<b>1.022.291</b>	<b>-67.613</b>	<b>118.619</b>	<b>301.808</b>	<b>-1.375.105</b>

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Nilai pergeseran neto positif (*upward different shift*) tertinggi diperoleh Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Pergeseran netto di Kulon Progo terutama dipengaruhi oleh aktivitas pada kategori konstruksi dan industri pengolahan. Sementara, pergeseran netto di Sleman dipengaruhi oleh tujuh kategori yang bernilai positif, terutama pengangkutan dan pergudangan; informasi dan komunikasi, konstruksi, dan real estat. Artinya, Kabupaten Kulon Progo dan Sleman merupakan lokasi yang sangat menguntungkan (*locational advantage*) bagi perkembangan lapangan usaha tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya (Tabel 6.14). Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul dan Bantul memiliki nilai pergeseran neto negatif (*downward different shift*) tertinggi. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kategori pertanian dan industri pengolahan yang berjalan lebih lambat dari pertumbuhan

ekonomi Gunungkidul secara agregat, padahal dari sisi andil atau *share* kedua kategori masih sangat dominan. Nilai pergeseran neto di Kota Yogyakarta tercatat negatif, tapi levelnya sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena Kota Yogyakarta yang menjadi pusat perkotaan sudah mulai jenuh perkembangan ekonominya. Semua kategori memiliki nilai DS negatif, terutama pada lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, dan real estat bernilai negatif terbesar di Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena pertumbuhan lapangan usaha ini sudah melewati masa puncak, sementara di kabupaten-kabupaten lain masih berkembang dan tumbuh.

**Tabel 6.15. Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2010-2019**

Kab/Kota	Perub. PDRB	Pangsa Regional	Nilai Pergeseran		Komponen Pergeseran		
			Netto	%	PS	DS	PS+DS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulon Progo	3.739.509	3.099.163	640.346	17,12	-381.945	1.022.291	640.346
Bantul	7.040.710	7.459.347	-418.638	-5,95	-351.024	-67.613	-418.638
Gunungkidul	4.755.337	5.448.264	-692.927	-14,57	-811.546	118.619	-692.927
Sleman	13.808.164	13.227.527	580.637	4,21	278.829	301.808	580.637
Yogyakarta	10.482.972	10.592.390	-109.419	-1,04	1.265.686	-1.375.105	-109.419

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan nilai PS dan DS selama periode 2010-2019, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori seperti yang disajikan pada Tabel 6.16. Hasil ini sedikit berbeda dengan analisis pada periode sebelumnya yang terdiri dari tiga kelompok. Kelompok pertama (Kuadran I) merepresentasikan daerah yang perekonomiannya maju pesat. Kuadran I ditandai oleh nilai PS serta DS bertanda positif dan terdapat satu kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ini yakni Kabupaten Sleman.

Kelompok kedua (Kuadran II) mencakup daerah yang memiliki nilai PS bertanda negatif dan nilai DS bertanda positif. Kuadran II ini merepresentasikan daerah yang perekonomiannya sedang berkembang. Berdasarkan Tabel 6.15 terdapat dua daerah yang tercakup dalam Kuadran II yakni Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Kelompok ketiga (Kuadran III) mencakup daerah yang memiliki nilai PS positif dan DS negatif dan merepresentasikan daerah yang perekonomiannya berpotensi tapi tertekan. Daerah yang termasuk dalam kuadran III adalah Kota Yogyakarta. Kelompok keempat (Kuadran IV) merepresentasikan daerah yang tertinggal dan memiliki daya saing lemah yakni memiliki nilai PS dan DS dengan arah negatif. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* 2010-2019, Kabupaten Bantul termasuk dalam kuadran ini. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil kajian pada periode sebelumnya. Kabupaten Bantul pada periode sebelumnya termasuk dalam kuadran II atau daerah yang sedang berkembang, tetapi pada tahun 2019 berubah ke kuadran IV atau perekonomiannya tertinggal (Tabel 6.16).

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan suatu situasi pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber daya berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

**Tabel 6.16. Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015-2019**

Kategori	Komponen Pertumbuhan		
	PS	DS	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab/Kota yang pertumbuhan ekonominya pesat (I):			
1. Kabupaten Sleman	278.829	301.808	5,67
Kab/Kota sedang berkembang (II):			
1. Kabupaten Kulon Progo	-381.945	1.022.291	6,37
2. Kabupaten Gunungkidul	-811.546	118.619	4,90
Kab/Kota yang cenderung berpotensi (IV):			
1. Kota Yogyakarta	1.265.686	-1.375.105	5,43
Kab/Kota yang memiliki daya saing lemah (IV):			
1. Kabupaten Bantul	-351.024	-67.613	5,22

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

**F. Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia dimaknai sebagai proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan salah satu indikator komposit untuk mengukur capaian atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas kehidupan manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ukuran IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi yang terakhir dilakukan pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* mulai tahun 2010.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan

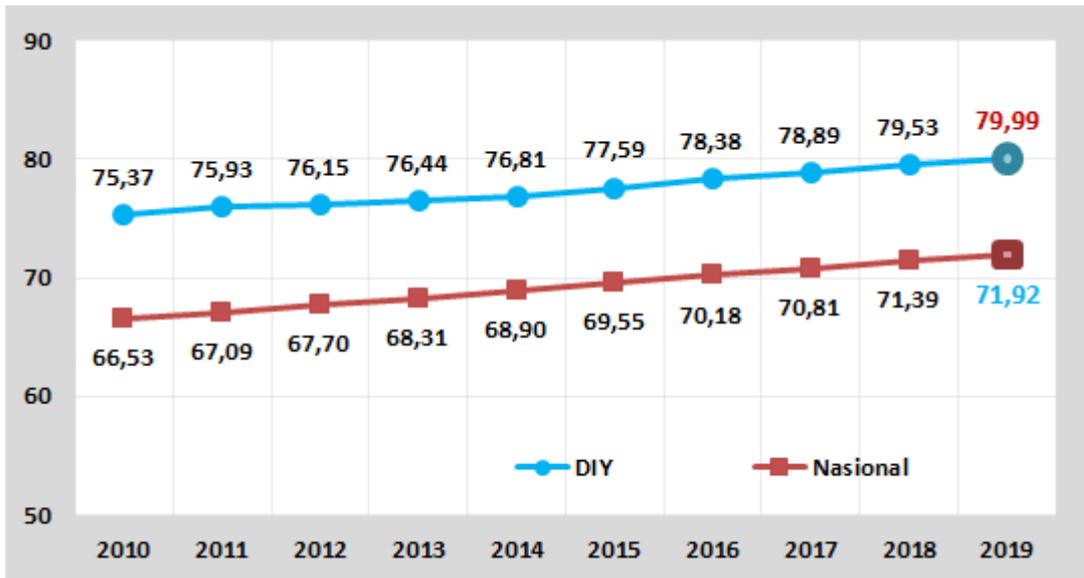
standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

### 1. Perkembangan dan Posisi Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta

Capaian pembangunan manusia di wilayah DIY sampai dengan tahun 2019 berada pada posisi 79,99. Secara umum, capaian ini terus mengalami kemajuan dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,99 pada tahun 2019. Artinya, setiap tahun IPM DIY rata-rata tumbuh sebesar 0,66 persen. Perkembangan posisi IPM ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia di DIY yang semakin membaik. Level IPM DIY selama periode 2010-2019 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Dibandingkan dengan IPM pada level nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi. Capaian IPM nasional juga semakin meningkat dan berubah status dari IPM sedang menjadi IPM tinggi pada tahun 2016. Posisi capaian IPM DIY sejak tahun 2010 sampai 2019 tidak mengalami perubahan, yakni selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta.

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga komponen penyusunnya, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak sebagai proksi indikator yang menggambarkan dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun (Tabel 6.17).

Gambar 6.21. Perkembangan Capaian IPM DIY dan Indonesia, 2010-2019



Sumber : Data IPM, BPS Provinsi DIY

Tabel 6.17. Indeks Pembangunan Manusia DIY menurut Komponen, 2015-2019

Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,68	74,71	74,74	74,82	74,92
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,00	9,12	9,19	9,32	9,38
Pengeluaran Riil perkapita Setahun	Rp 000	12 684	13 229	13 521	13 946	14 394
<b>IPM</b>		<b>77,59</b>	<b>78,38</b>	<b>78,89</b>	<b>79,53</b>	<b>79,99</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>	<b>%</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>	<b>0,65</b>	<b>0,82</b>	<b>0,58</b>

Sumber : IPM Kabupaten/Kota DIY, BPS Provinsi DIY

## 2. Kualitas Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk pada saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Perkembangan indikator ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2015-2019, UHH penduduk DIY telah meningkat dari 74,68 tahun menjadi 74,92 tahun. Artinya, terjadi peningkatan usia harapan hidup pada saat lahir sebesar 0,24 tahun atau tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. UHH sebesar 74,92 tahun menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2019 hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dibandingkan dengan rata-rata secara nasional, level UHH penduduk DIY tercatat lebih tinggi dan menempati peringkat tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Tingginya capaian UHH DIY maupun peningkatannya dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kebijakan penyediaan

infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk; peningkatan usia perkawinan pertama bagi wanita; peningkatan pendidikan wanita usia subur; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan tata cara perawatan selama kehamilan; serta penanganan selama proses persalinan dan pasca kelahiran. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kasus kematian bayi dan balita di seluruh wilayah DIY dalam beberapa dekade terakhir dan berimbas pada peningkatan usia harapan hidup.

### 3. Kualitas Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dalam IPM dibentuk oleh dua indikator pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk. Kedua indikator tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan kualitas pendidikan penduduk DIY yang semakin membaik.

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk DIY meningkat secara nyata dari 14,85 tahun di tahun 2010 menjadi 15,58 tahun di tahun 2019. Artinya, terjadi kenaikan lama sekolah sebesar 0,73 tahun dalam satu dekade terakhir. HLS sebesar 15,56 tahun ini menggambarkan perkiraan lamanya tahun sekolah yang akan dijalani oleh anak-anak usia 7 tahun di wilayah DIY yang sudah setara dengan jenjang pendidikan D3 atau D4/S1. Secara level, harapan lama sekolah penduduk D.I. Yogyakarta tercatat paling tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya capaian dan peningkatan harapan lama sekolah penduduk didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk serta level kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membiayai sekolah.

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merepresentasikan variabel stok atau akumulasi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas). Capaian indikator RLS penduduk DIY pada tahun 2019 telah mencapai 9,38 tahun. Angka ini menggambarkan rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk DIY berusia 25 tahun ke atas sudah setara dengan lulus pada jenjang SMP. RLS penduduk ini meningkat cukup nyata jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 yang mencapai 9,00 tahun. Artinya, ada peningkatan level sebesar 0,38 tahun selama periode 2015-2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia DIY yang lebih baik. Secara nasional, RLS penduduk DIY termasuk dalam kelompok enam provinsi yang memiliki level RLS tertinggi.

### 4. Standar Hidup yang Layak

Dimensi ketiga yang terangkum dalam ukuran IPM adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang

disesuaikan dengan daya beli penduduk (harga konstan 2012). Pengeluaran per kapita riil penduduk DIY yang disesuaikan mencapai level Rp14,39 juta selama tahun 2019. Angka ini semakin meningkat selama periode 2015-2019 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,2 persen. Peningkatan ini menggambarkan standar kehidupan penduduk yang semakin membaik, artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat. Secara level, pengeluaran riil perkapita penduduk DIY tercatat berada di peringkat ketiga tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya level pengeluaran riil per kapita ini dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk DIY yang lebih bervariasi, distribusi komoditas yang lancar, serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga komoditas yang sama di provinsi lain. Dengan kata lain, daya beli penduduk DIY lebih tinggi dari penduduk di provinsi yang lainnya.

### 5. Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY

Pencapaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di DIY sampai tahun 2019 terlihat cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 69,96 hingga 86,65. Capaian IPM Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di DY, bahkan di Indonesia. Level IPM Kota Yogyakarta mencapai 86,85. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 83,85 dan termasuk dalam lima besar IPM tertinggi secara nasional. IPM Kota Yogyakarta dan Sleman termasuk dalam kategori “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ). Capaian IPM Kabupaten Bantul sebesar 80,01 dan meningkat statusnya dari IPM “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Capaian IPM Kulon Progo mencapai 74,44 termasuk dalam kategori “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ). Sementara, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,96 dan masih berada dalam kategori “sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ).

Indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat cukup bervariasi. Pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator usia harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,77 tahun yakni Kabupaten Bantul hingga level tertinggi 75,20 tahun yakni Kulon Progo. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,96 tahun (Gunungkidul) hingga 17,28 tahun (Kota Yogyakarta). Harapan lama sekolah Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi secara nasional. Rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,13 tahun (Gunungkidul) hingga 11,45 tahun (Kota Yogyakarta). Sementara, pengeluaran per kapita riil pada tingkat kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta berkisar antara Rp9,61 juta per tahun (Gunungkidul) hingga Rp19,12 juta per tahun (Kota Yogyakarta).

Kemajuan pembangunan manusia sampai tahun 2019 dapat terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecepatan pertumbuhannya. Kulon Progo sejak tahun 2013 naik level dari status “sedang” menjadi “tinggi”. Sleman sejak tahun 2011 sudah naik level dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi” dan Bantul naik level dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2019. Sementara itu, dua wilayah lain tidak mengalami perubahan status. Gunungkidul masih tetap berada

## Bab 6 Analisis Indikator Utama Pembangunan di DIY

dalam status “sedang”, dan Kota Yogyakarta sejak 2010 sudah masuk status “sangat tinggi”. Selama periode 2010-2019, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Meskipun dari sisi level capaian paling rendah, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo tercatat memiliki pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode 2010-2019 di kedua daerah masing-masing tercatat sebesar 0,96 persen dan 0,87 persen. Sebaliknya, meskipun secara level IPM paling tinggi tingkat kemajuan/pertumbuhan IPM di Kota Yogyakarta dan Sleman tercatat lebih lambat masing-masing sebesar 0,57 persen dan 0,52 persen per tahun.

**Tabel 6.18. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018-2019**

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	75,12	75,20	14,24	14,25	8,65	8,66	9 698	10 275	73,76	74,44
Bantul	73,66	73,77	15,03	15,15	9,35	9,54	15 386	15 636	79,45	80,01
Gunungkidul	73,92	74,03	12,95	12,96	7,00	7,13	9 163	9 612	69,24	69,96
Sleman	74,69	74,77	16,71	16,72	10,66	10,67	15 844	16 434	83,42	83,85
Yogyakarta	74,45	74,56	17,05	17,28	11,44	11,45	18 629	19 125	86,11	86,65
<b>DIY</b>	<b>74,82</b>	<b>74,92</b>	<b>15,56</b>	<b>15,58</b>	<b>9,32</b>	<b>9,38</b>	<b>13 946</b>	<b>14 394</b>	<b>79,53</b>	<b>79,99</b>

Sumber : IPM Kabupaten/Kota DIY, BPS Provinsi DIY



## **BAB 7**

### **PEREKONOMIAN DIY DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

- A. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Triwulan I dan II 2020
- B. Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Triwulan I dan II 2020
- C. Pertumbuhan Ekonomi Semester I 2020
- D. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Saat Covid-19 dan Saat Kondisi Normal
- E. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Saat Covid-19 dan Saat Kondisi Normal





## BAB VII

### PEREKONOMIAN DIY DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan dalam rangka HUT Ke-75 RI, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan semua negara sedang menghadapi masalah sulit akibat pandemi *corona virus disease* CoVID-19). Namun, pandemi juga menjadi momentum untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju pada 25 tahun mendatang.

Adanya pandemi memang mengubah segala perencanaan oleh siapapun, dari perencanaan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga kehidupan dalam rumah tangga dan bahkan pribadi seseorang. Kondisi pandemi ini juga berbeda dengan krisis-krisis ekonomi masa lalu yang juga melumpuhkan perekonomian negara. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi perekonomian. Untuk mengatasi dampak pandemi dan memulihkan perekonomian pemerintah harus mengambil kebijakan dan bertindak cepat. Pemerintah harus cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, dan kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

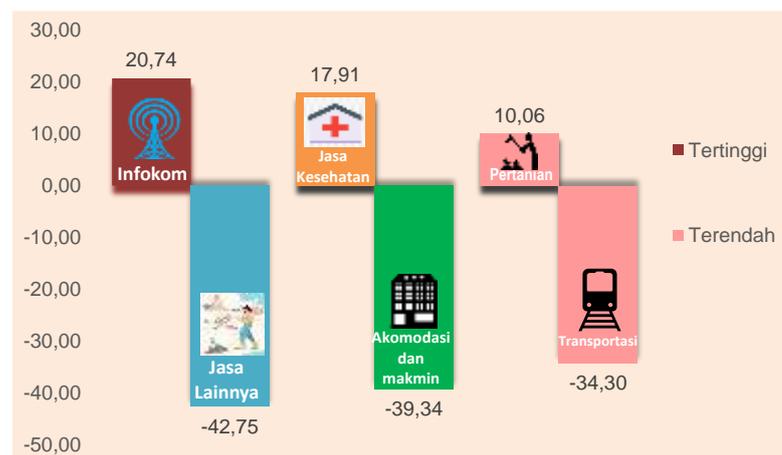
Dalam pantauan pencapaian kinerja pembangunan, indikator makro pembangunan telah mencatat kondisi yang sangat berbeda antara saat sebelum pandemi dengan kondisi saat pandemi. Dalam bab ini akan ditinjau perkembangan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan pengangguran selama masa pandemi di semester I 2020.

#### A. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Triwulan I dan II 2020 (*y-on-y*)

Triwulan I-2020 merupakan akumulasi kondisi Januari hingga Maret 2020. Semua sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi mulai merasakan dampak dari pandemi COVID-19 meskipun baru tahap awal. Kinerja perekonomian DIY triwulan I-2020 dibanding triwulan I-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi sebesar 0,17 persen. Kondisi ini berbeda arah bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh cukup tinggi, yaitu 7,51 persen. Memang, kontraksi yang terjadi bukan semata disebabkan oleh pandemi, tetapi dipicu oleh terjadinya penurunan kinerja di 11 kategori.

Kontraksi tertinggi terjadi pada kategori konstruksi yaitu sebesar 9,75 persen, disusul kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 8,92 persen. Kontraksi pada konstruksi disebabkan oleh selesainya pembangunan mega proyek bandara YIA di akhir tahun 2019 sehingga di awal 2020 nilai tambah yang tercipta dari konstruksi jauh lebih rendah dibanding kondisi awal 2019 semasa masih intensifnya pembangunan sarana dan prasarana bandara YIA. Kontraksi di lapangan usaha pertanian disebabkan oleh pergeseran musim, yaitu curah hujan yang tidak menentu menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah di DIY dan juga mundurnya musim tanam padi sehingga panen raya belum terjadi di triwulan I-2020. Selain itu kemarau yang panjang telah menyebabkan banyak komoditas pertanian yang menurun produksinya, terutama komoditas padi dan palawija, serta beberapa komoditas hortikultura. Sementara kontraksi kategori yang lain selain berkaitan selesainya mega proyek juga mulai merasakan dampak pandemi. Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar 7,48 persen; pertambangan dan penggalan sebesar 6,91 persen, dan transportasi dan pergudangann 3,23 persen.

**Gambar 7.1. Pertumbuhan Tertinggi/Terendah Lapangan Usaha, Triwulan I-2020 (persen)**

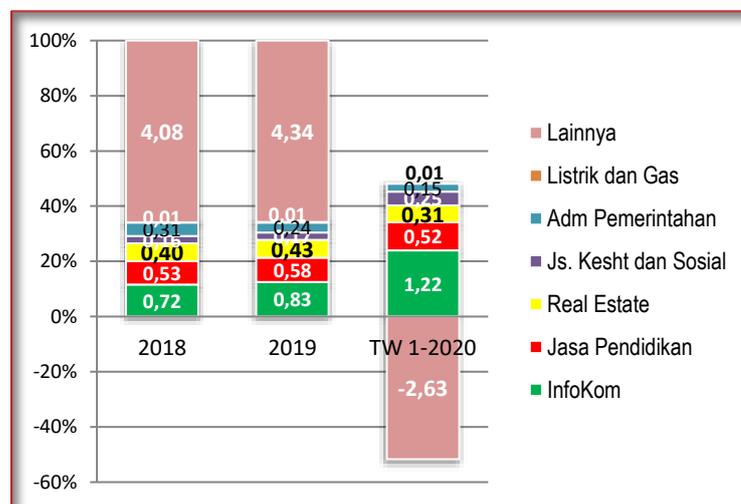


Pangsa terbesar struktur ekonomi DIY 2019 adalah kategori industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, dan perdagangan. Oleh karena itu terjadinya kontraksi pada kelima kategori tersebut relatif berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi DIY. Andil terbesar terjadinya kontraksi perekonomian DIY triwulan I 2020 adalah konstruksi, yaitu minus 0,98 persen, kemudian diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar minus 0,91, dan industri pengolahan yaitu sebesar minus 0,19 persen. Sementara itu, ada beberapa kategori yang mempunyai pangsa distribusi yang relatif besar juga dan pada triwulan I-2020 tumbuh cukup tinggi sehingga kontraksi ekonomi yang terjadi tidak jatuh lebih dalam. Peran kategori-kategori tersebut dalam menghambat kontraksi ditunjukkan oleh andil pertumbuhannya yang cukup besar, di antaranya kategori informasi dan komunikasi yang mempunyai andil pertumbuhan sebesar 1,22 persen, jasa pendidikan 0,52 persen, real estat 0,31 persen, dan jasa kesehatan 0,25 persen (Gambar 7.2).

## Bab 7 | Perekonomian DIY di Tengah Pandemi COVID-19

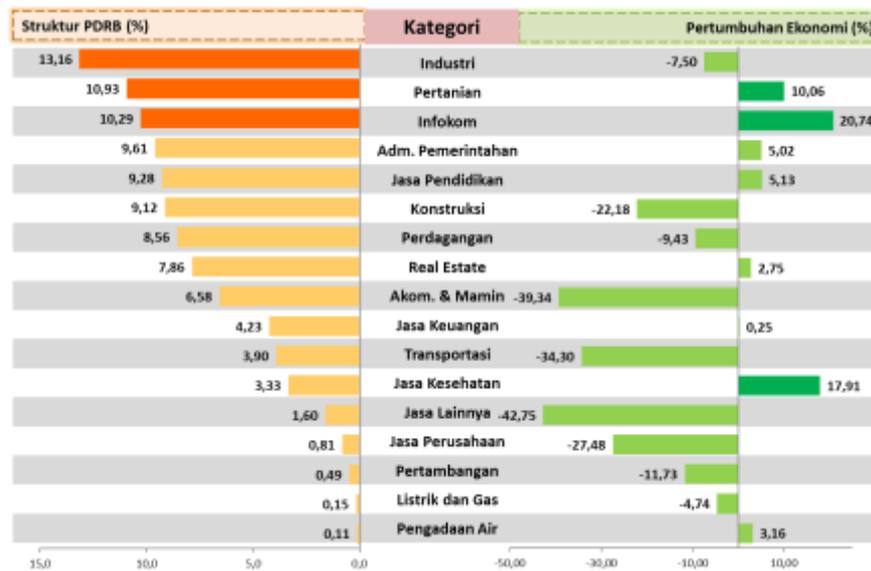
Kategori konstruksi dan pertanian mempunyai andil terbesar terjadinya kontraksi pada triwulan I-2020 tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi yang bukan normal, yaitu karena selesainya mega proyek di lapangan usaha konstruksi dan adanya pergeseran musim panen dari kondisi biasanya. Untuk lapangan usaha pertanian diharapkan di triwulan II-2020 akan memperoleh “berkah pertumbuhan” dari adanya pergeseran musim, tetapi untuk konstruksi tidaklah demikian. Untuk itu pertumbuhan PDRB triwulan I-2020 bisa dilihat juga pertumbuhan ekonomi yang tanpa menyertakan lapangan usaha konstruksi. Hasil penghitungan menyatakan bahwa PDRB tanpa konstruksi masih tumbuh sebesar 0,90 persen (*y-on-y*). Bila dihitung tanpa pertanian dan konstruksi tumbuh sebesar 2,16 persen. Artinya, masih tumbuh positif meskipun melambat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 7.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2020 Menurut Lapangan Usaha (Persen)



Seiring dengan masa pandemi yang belum mereda dan bahkan belum jelas kapan akan berakhir, perekonomian DIY pun merasakan dampak yang cukup berat. Hal ini dilandasi oleh perekonomian DIY yang salah satu penyumbang terbesarnya adalah sektor pariwisata. Dunia pariwisata dengan aktivitas ekonomi pendukungnya berupa jasa hiburan, rekreasi, budaya, wisata alam, industri kerajinan, angkutan wisata, dan lain-lainnya, benar-benar terpuruk pada masa pandemi COVID-19. BPS memotret perekonomian DIY triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar 6,74 persen, berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,77 persen. Kontraksi tersebut dipicu oleh penurunan kinerja di 9 kategori. Kontraksi tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, sebesar 39,34 persen, disusul kategori transportasi dan konstruksi, masing-masing sebesar 34,30 persen dan 22,18 persen. Pandemi COVID-19 dan selesainya pembangunan bandara YIA masih menjadi sumber utama penyebab kontraksi. Di triwulan II-2020 ini, pertumbuhan PDRB tanpa konstruksi terjadi kontraksi sebesar 4,88 persen. Artinya, konstruksi masih memberikan andil pertumbuhan kontraksi yang signifikan.

Gambar 7.3. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2020

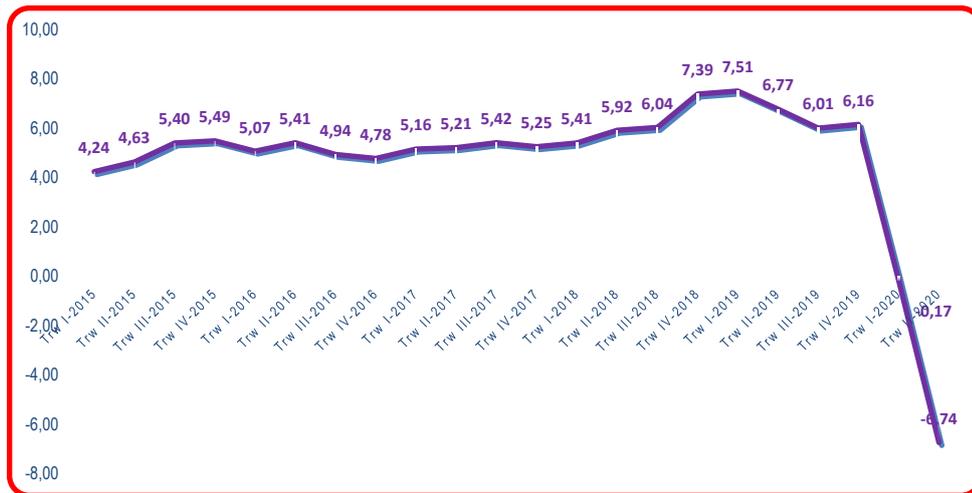


Penyumbang kontraksi pertumbuhan terbesar di triwulan II-2020 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil pertumbuhan minus 3,79 persen, diikuti konstruksi minus 2,38 persen, transportasi dan perdagangan minus 1,81 persen, jasa lainnya minus 1,18 persen, dan industri pengolahan minus 0,96 persen. Masih belum bergeliatnya sektor pariwisata DIY masih belum menggerakkan aktivitas ekonomi di kategori-kategori tersebut.

Di sisi lain, di masa pandemi ini hingga triwulan II-2020 ini masih ada kategori yang mampu tumbuh positif sehingga menghambat tidak terjadi kontraksi yang lebih dalam. Katogori informasi dan komunikasi mencapai pertumbuhan tertinggi di antara kategori yang lain yaitu sebesar 20,74 persen, diikuti jasa kesehatan 17,91 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,06 persen, jasa pendidikan 5,13 persen, jasa pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 5,02 persen, dan pengadaan air 3,16 persen. Kategori informasi dan komunikasi mempunyai kontribusi persentase dalam struktur PDRB sebesar 10,29 persen, menempati urutan ketiga setelah industri pengolahan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sehingga, informasi dan komunikasi memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 2,32 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan diberlakukannya *Work From Home* (WFH) dan *Learn From Home* (LFH) yang masih diperpanjang hingga akhir triwulan II-2020. Seiring dengan kebijakan tersebut banyak kegiatan rapat di perkantoran dan seminar yang dilakukan secara daring atau *online* untuk menjadi solusi di tengah pandemi. Semakin banyak masyarakat DIY yang menggunakan aplikasi *goshop* untuk belanja di pasar tradisional.

Seperti disebut di atas bahwa pada triwulan II-2020 akan memperoleh berkah pergeseran musim panen padi, sehingga pertanian mampu memberikan andil pertumbuhan terbesar kedua yaitu 0,77 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi di kategori pertanian selain tanaman pangan adalah perkebunan dan peternakan. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya adalah jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

**Gambar 7.4. Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulanan 2015-2020 (y-on-y)**

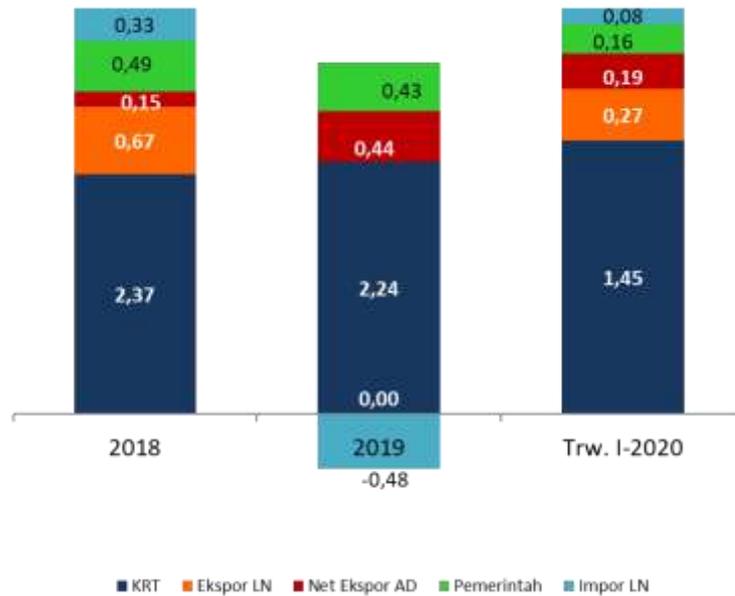


### B. Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Triwulan I dan II 2020 (y-on-y)

Pandemi COVID-19 di Indonesia baru ditemukan di awal Maret 2020, namun situasinya begitu cepat menggerogoti kebugaran ekonomi hampir semua negara. Dampak tersebut juga sangat dirasakan di DIY. Dibandingkan kondisi Triwulan I-2019, hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami perlambatan di triwulan I-2020. Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar 7,23 persen, konsumsi lembaga swasta nonprofit (PKLNPR) kontraksinya lebih dalam lagi yaitu 8,80 persen. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi di komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, masing-masing hanya tumbuh 2,54 persen dan 1,33 persen.

Aktivitas ekonomi triwulan I-2020 dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh peran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 67,84 persen, atau lebih tinggi 2,95 poin persen dibanding triwulan IV-2019. Komponen kedua yang memberikan kontribusi cukup besar adalah pembentukan modal tetap bruto yaitu 30,58 persen, atau turun 8,59 poin persen. Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,32 persen, atau lebih rendah 5,54 poin persen.

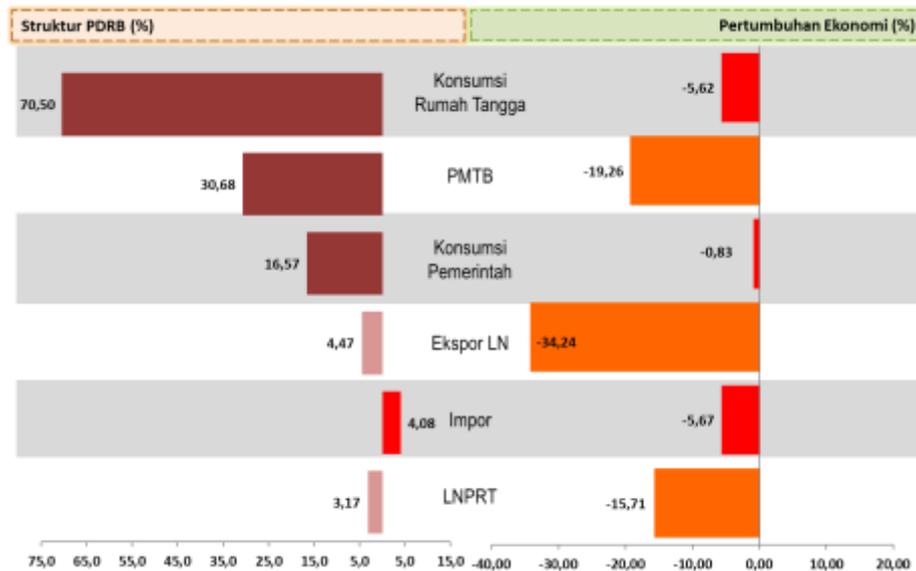
Gambar 7.5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi D. I. Yogyakarta Tahun 2018 – 2020 menurut Pengeluaran (Persen)



Pangsa pertumbuhan komponen dalam pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 (*y-on-y*) dijelaskan lewat andil pertumbuhannya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pangsa kontribusi sebesar 67,84 persen memberikan andil pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,45 persen. Sementara itu komponen pengeluaran lainnya memberikan andil pertumbuhan di bawah 1 persen. PMTB yang mempunyai kontribusi terbesar kedua, ternyata mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam sehingga juga memberikan andil kontraksi yang cukup besar.

Di triwulan II-2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) dari sisi pengeluaran dipicu oleh terjadinya kontraksi pertumbuhan di semua komponen pengeluaran. Komponen ekspor luar negeri mengalami kontraksi paling dalam yaitu 34,24 persen. Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap permintaan ekspor dari DIY. Ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 juga menyebabkan perlambatan aktivitas investasi di DIY. Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami kontraksi terbesar kedua, yaitu 19,26 persen. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit (LNPN) kontraksinya sebesar 15,71 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 5,62 persn, dan pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) sebesar 0,83 persen.

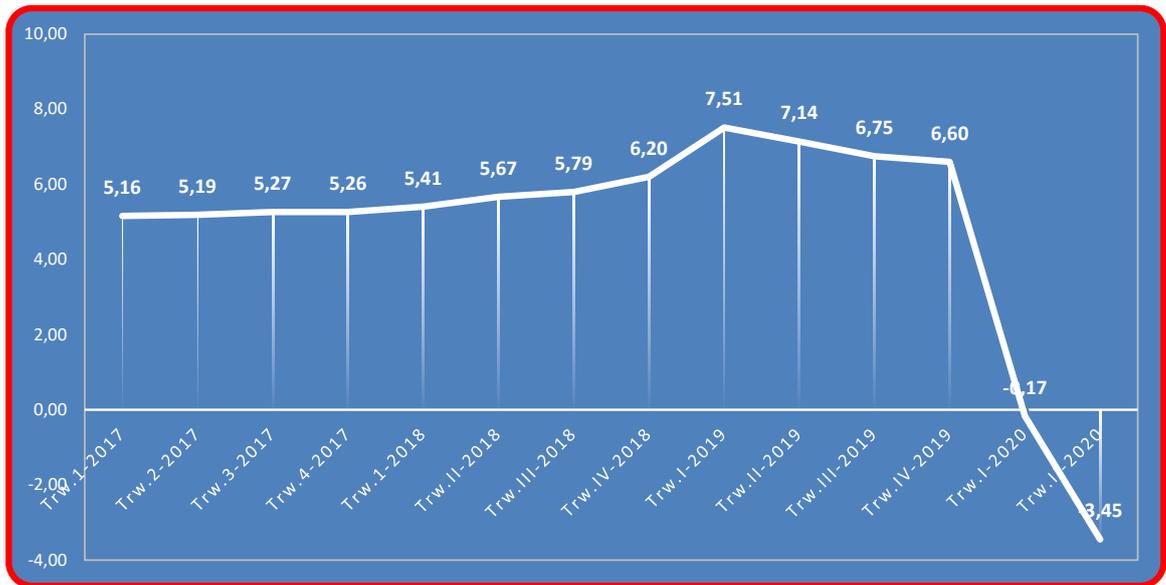
Gambar 7.6. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Triwulan II – 2020 (y-on-y)



Struktur PDRB DIY menurut pengeluaran (konsumsi) atas dasar harga berlaku di triwulan II-2020 masih didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu 70,50 persen, kemudian diikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 30,68 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah 16,57 persen. Meskipun pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar, akan tetapi aktivitas pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak memberikan andil pertumbuhan positif. Selama pandemi telah terjadi penurunan pendapatan masyarakat akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan andil kontraksi pertumbuhan sebesar -3,31 persen. Andil terbesar pada kontraksi pertumbuhan ekonomi triwulan ini adalah komponen PMTB yaitu -5,42 persen.

### C. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Semester I 2020

Kinerja perekonomian DIY selama semester I 2020 tahun ini jika dibandingkan dengan semester yang sama di tahun 2019 (c-to-c), terlihat melambat dan berbalik arah. Pertumbuhan ekonomi kumulatif semester I 2019 sebesar 7,14 persen, sementara di semester I 2020 ini mengalami kontraksi sebesar 3,45 persen. Sepuluh kategori mengalami kontraksi, bahkan lima di antaranya mencapai dua digit. Dua kategori kontraksinya mencapai 20-an persen dan tiga kategori belasan persen. Kategori jasa lainnya dan penyediaan akomodasi dan makan minum, mengalami kontraksi 22,52 persen dan 20,48 persen. Kategori transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, dan konstruksi, masing-masing mengalami kontraksi 19,08 persen, 17,68 persen, dan 16,18 persen.

**Gambar 7.7. Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulanan 2017-2020 (y-on-y)**

Jika di semester I tahun sebelumnya seluruh kategori tumbuh positif, di tahun ini hanya ada tujuh kategori saja dan dua di antaranya tumbuh mencapai dua digit. Kedua kategori tersebut adalah informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan, yang masing-masing tumbuh sebesar 16,06 persen dan 13,76 persen. Jasa pendidikan tumbuh 5,56 persen, sedangkan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, real estate, pengadaan listrik, dan pengadaan air masing-masing pertumbuhannya kurang dari 4 persen.

Perlambatan pertumbuhan perekonomian semester I 2020 yang ditinjau dari sisi lapangan usaha PDRB tercermin pula dari sisi pengeluaran PDRB. Hampir semua komponen pengeluaran mengalami kontraksi, kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Kontraksi terdalam pada semester I 2020 terjadi pada komponen net ekspor antardaerah sebesar 58,86 persen, diikuti kontraksi yang terjadi pada komponen ekspor luar negeri sebesar 14,49 persen, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 13,43 persen.

Di semester I 2020 ini, andil terbesar terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yaitu sebesar -3,67 persen. Andil kontraksi terbesar berikutnya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu -0,93 persen dan diikuti ekspor luar negeri sebesar -0,75 persen.

#### **D. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Saat COVID-19 dan Saat Kondisi Normal**

Secara kasat mata, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan dalam semua sendi kehidupan ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi dampak dapat dipantau dengan membandingkan geliat perekonomian saat kondisi normal dan kondisi di semester I 2020 atau triwulan I dan II 2020. Bisa jadi pandemi ini berdampak kurang menggembirakan secara sosial tetapi menguntungkan secara ekonomi di suatu kategori. Dampak pandemi juga bisa

## Bab 7 | Perekonomian DIY di Tengah Pandemi COVID-19

berbentuk tidak menguntungkan secara ekonomi tetapi meningkatkan nilai sosial, dan yang paling dirasakan adalah tidak menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomi.

Oleh karena keterbatasan indikator yang tersedia, di sini hanya akan dibahas dampak pandemi terhadap nilai tambah ekonomi. Data dasar yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi triwulan I-II 2018, 2019, dan 2020 (*y-on-y*). Marilah kita cermati tabel berikut.

**Tabel 7.1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral DIY Triwulan I dan II 2020 (*y-on-y*)**

Lapangan Usaha (1)	Trw.I 2020			Trw.II 2020		
	Tanpa Covid <sup>1)</sup> (2)	Saat ini (3)	Dampak Covid <sup>2)</sup> (4)	Tanpa Covid <sup>1)</sup> (5)	Saat ini (6)	Dampak Covid <sup>2)</sup> (7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,93	-8,92	-12,85	4,44	10,06	5,62
Pertambangan dan Penggalian	10,62	-6,91	-17,53	-4,55	-11,73	-7,18
Industri Pengolahan	5,86	-1,47	-7,33	-1,17	-7,50	-6,33
Pengadaan Listrik, Gas	3,96	7,26	3,31	0,06	-4,74	-4,80
Pengadaan Air	3,44	-1,84	-5,28	5,93	3,16	-2,77
Konstruksi	13,85	-9,75	-23,59	-1,63	-22,18	-20,54
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,35	-0,05	-5,40	-2,08	-9,43	-7,35
Transportasi dan Pergudangan	5,35	-3,23	-8,58	-16,11	-34,30	-18,19
Penyediaan Akomodasi dan Makmin	6,82	-1,28	-8,10	-15,92	-39,34	-23,42
Informasi dan Komunikasi	6,67	11,24	4,58	14,04	20,74	6,71
Jasa Keuangan	9,74	-2,03	-11,77	4,04	0,25	-3,79
Real Estate	5,68	4,31	-1,37	3,89	2,75	-1,14
Jasa Perusahaan	4,32	-7,48	-11,80	-10,55	-27,48	-16,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,46	2,24	-1,21	6,90	5,02	-1,88
Jasa Pendidikan	5,78	5,99	0,21	5,64	5,13	-0,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,37	9,55	3,18	12,51	17,91	5,40
Jasa lainnya	6,37	-2,18	-8,55	-18,46	-42,75	-24,29
<b>Total</b>	<b>6,46</b>	<b>-0,17</b>	<b>-6,63</b>	<b>0,02</b>	<b>-6,74</b>	<b>-6,75</b>

Keterangan: 1) Rata-rata pertumbuhan triwulan I/II 2018 dan 2019 (*y-on-y*)

2) Selisih pertumbuhan triwulan I/II 2020 dengan rata-rata pertumbuhan triwulan I/II 2018 dan 2019

Sumber: Data PDRB DIY diolah.

Perbedaan pertumbuhan di triwulan I-2020 saat awal Covid-19 dengan pertumbuhan saat kondisi “normal” adalah sebesar -6,63 persen. Perbedaan paling lebar terjadi di kategori konstruksi yaitu -23,59 persen, kemudian diikuti pertambangan dan penggalian yaitu -17,53 persen, dan pertanian sebesar -12,85 persen. Di triwulan II-2020 perbedaan pertumbuhan semakin melebar menjadi -6,75 persen, dengan memposisikan kategori jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan konstruksi mempunyai perbedaan pertumbuhan terbesar, masing-masing -24,29 persen, -23,42 persen, dan 20,54 persen. Sementara kategori pertanian justru mempunyai perbedaan positif sebesar 5,62 persen.

Di pembahasan sebelumnya tersirat disebutkan bahwa kategori konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan pertanian tidak bisa menjadi tolok ukur untuk

membandingkan dampak pandemi karena kategori pertanian mengalami kondisi pergeseran musim, sedangkan konstruksi dan pertambangan karena adanya proses dan selesainya pembangunan mega proyek bandara YIA. Sehingga, agak sulit memisahkan dampak pandemi pada ketiga kategori tersebut. Untuk itu dampak pandemi Covid-19 dapat dilihat di kategori yang lain.

Tampak bahwa kategori yang potensial penyumbang nilai tambah PDRB DIY, di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan mempunyai perbedaan yang cukup besar antara masa pandemi dan masa “normal”. Hal ini berarti kategori-kategori ini paling dalam merasakan dampak buruk pandemi Covid-19.

### E. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Saat COVID-19 dan Saat Kondisi Normal

Dampak pandemi Covid-19 juga merambah perekonomian dari sisi pengeluaran. Bahkan, dampak buruk yang dirasakan lebih dalam terutama karena menyangkut pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan investasi yang merupakan kontributor terbesar dalam PDRB pengeluaran.

**Tabel 7.2. Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran DIY Triwulanan I dan II 2020 (y-on-y)**

Komponen Pengeluaran	Triw. I-2020			Triw. II-2020		
	Tanpa Covid <sup>1)</sup>	Saat ini	Dampak Covid <sup>2)</sup>	Tanpa Covid <sup>1)</sup>	Saat ini	Dampak Covid <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PKRT	4,60	2,54	-2,06	4,54	-5,62	-10,16
PKLNPRT	7,96	-8,80	-16,76	7,58	-15,71	-23,29
PKP	3,19	1,33	-1,86	4,68	-0,83	-5,51
PMTB	11,37	-7,23	-18,60	12,16	-19,26	-31,42
Perubahan Inventori	2,04	0,54	-1,51	2,19	7,97	5,78
Ekspor LN	6,96	5,25	-1,72	7,25	-34,24	-41,49
Impor LN	2,50	2,01	-0,49	0,43	-5,67	-6,10
Net Ekspor Antardaerah	3,07	-17,93	-21,00	14,60	-66,21	-80,81
PDRB	6,46	-0,17	-6,63	6,35	-6,74	-13,08

Keterangan: 1) Rata-rata pertumbuhan triwulan I/II 2018 dan 2019 (y-on-y)

2) Selisih pertumbuhan triwulan I/II 2020 dengan rata-rata pertumbuhan triwulan I/II 2018 dan 2019

Sumber: Data PDRB DIY diolah.

Berdasarkan Tabel 7.2 dapat dijelaskan bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi masa pandemi dan masa “normal” di triwulan I-2020 sebesar -6,63 persen. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh besarnya perbedaan di level komponen pengeluaran. Perbedaan pertumbuhan tertinggi ada di komponen net ekspor antardaerah, diikuti PMTB, dan PKLNPRT. Pada triwulan II-2020 perbedaan pertumbuhan semakin melebar seiring dengan masih meningkatnya tren penambahan kasus positif Covid-19.

Perbedaan pertumbuhan masa pandemi dan “normal” di triwulan II-2020 sebesar minus 13,08 persen. Semua komponen pengeluaran mempunyai perbedaan pertumbuhan minus. Perbedaan pertumbuhan yang meningkat dibanding triwulan I-2020 tersebut terutama didorong oleh tingginya perbedaan pertumbuhan di komponen ekspor antardaerah, ekspor luar negeri, pembentukan modal tetap bruto, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.



**BAB 8**  
**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi





## BAB VIII

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

1. Nilai PDRB DIY tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar Rp141,40 triliun meningkat sekitar Rp39,95 triliun dari tahun 2015 yang sebesar Rp101,44 triliun. Sementara atas dasar harga konstan meningkat sekitar Rp21,02 triliun dari Rp83,47 triliun menjadi Rp104,49 triliun.
2. Tiga lapangan usaha yang kontribusinya terbesar adalah industri pengolahan (C), konstruksi (F), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Masing-masing lapangan usaha tersebut memberi kontribusi sebesar 12,85 persen, 11,11 persen, dan 10,35 persen.
3. Dalam dua tahun terakhir pertanian tergeser dari urutan ketiga ke urutan keempat dalam dua tahun terakhir pemerintah menghadirkan pembangunan mega proyek seperti bandara YIA, *under-pass* Kentungan, jalan jalur lintas selatan, dan pusat perdagangan.
4. Performa perekonomian DIY lebih didominasi oleh kelompok sektor tersier yang mencakup 11 lapangan usaha yaitu perdagangan dan semua sektor jasa. Pangsa kontribusi sektor primer dan tersier cenderung menurun, sehingga sektor sekunder meningkat.
5. Lima lapangan usaha di tahun 2019 yang tumbuh di atas 7 persen, adalah konstruksi (F) dan pengadaan air (E), penyediaan akomodasi dan makan minum (I), jasa keuangan (K), dan informasi dan komunikasi (J).
6. Pertumbuhan ekonomi DIY 2019 sebesar 6,60 persen dan termasuk dalam sembilan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen di tahun 2019.
7. Hingga tahun 2018, PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku sebesar Rp36,79 juta. Sementara itu PDRB per kapita kabupaten/kota berkisar Rp25,43 juta hingga Rp84,73 juta dengan yang terendah Bantul dan tertinggi Kota Yogyakarta.
8. Dilihat indeks perkembangan sektoral, DIY mempunyai leading sektor karena berkembang cepat yaitu informasi dan komunikasi (J), jasa keuangan (K), konstruksi (F), jasa kesehatan (Q), akomodasi dan penyediaan makan minum (I), dan pengadaan listrik dan gas (D) dengan nilai indeks atas dasar harga konstan di atas 170.
9. Dari sisi PDRB pengeluaran, geliat perekonomian DIY masih didominasi oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang mempunyai kontribusi 65,39 persen di tahun 2019 meskipun kecenderungan perkembangannya dalam lima tahun terakhir sedikit berkurang. Sementara itu, kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto

meningkat pesat, dari 30,36 persen di tahun 2015 menjadi 35,02 persen di tahun 2019. Artinya, investasi masuk cukup tinggi yang berdampak memacu arus pembangunan di DIY. Bila tahun 2018 pertumbuhan PMTB mampu menembus dua digit yaitu 10,17 persen, di tahun 2019 sedikit melambat menjadi 9,74 persen.

10. Oleh karena pangsa kontribusi Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan yang terbesar, maka andil pertumbuhannya juga paling tinggi.
11. Dalam sepuluh tahun terakhir pola perkembangan inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional mempunyai kemiripan dan Yogyakarta cenderung sedikit lebih rendah. Kelompok komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Yogyakarta selama tahun 2019, antara lain: sandang; pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan bahan makanan.
12. Perekonomian DIY 2019 telah mulai tumbuh lebih cepat namun belum banyak memberikan kesempatan kerja. Meskipun demikian dari sisi produktivitas tenaga kerja terdapat peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
13. Melalui analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dalam periode 2015-2019 lapangan usaha potensial untuk Kulon Progo adalah konstruksi (F) dan pertambangan dan penggalian (B), atau kelompok sektor sekunder. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mempunyai lapangan usaha potensial yaitu usaha yang berbasis jasa (sektor tersier). Lapangan usaha potensial untuk Bantul adalah industri pengolahan (C), pengadaan listrik dan gas (D), perdagangan besar dan eceran (G), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Lapangan usaha potensi untuk Gunungkidul masih pengadaan air (E), diiringi perdagangan (G), dan jasa lainnya (RSTU).
14. Tren persentase kemiskinan semakin menurun, meskipun masih relatif tinggi dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa dan juga lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan ( $P_0$ ) lebih besar ada di daerah perdesaan. Kantong kemiskinan DIY masih terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.
15. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan Rasio Gini (RG) dan Kriteria Bank Dunia (KBD) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk masih relatif tinggi. Kenaikan persentase pendapatan lebih banyak dinikmati oleh 20% penduduk berpendapatan tertinggi.
16. Sementara ketimpangan antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) menunjukkan tren menurun.
17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai hasil yang memuaskan karena menempatkan DIY pada urutan kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, di bawah DKI Jakarta.

**B. Rekomendasi****Saat Kondisi “Normal”**

1. Memberikan perhatian lebih untuk mengangkat program jitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Mendorong pertumbuhan lapangan usaha yang potensial di tingkat kabupaten/kota.
3. Menghadirkan investasi yang berskala besar untuk membangkitkan perekonomian daerah pinggiran. Diperlukan mega proyek sejenis pembangunan bandara baru di Kulon Progo untuk mengangkat perekonomian di daerah marginalnya DIY yang lain, yaitu Gunungkidul dan juga Bantul.
4. Perlu melakukan *review* semua target pembangunan karena semua aktivitas ekonomi terdampak pandemi.
5. Master plan pembangunan tetap harus dipelihara untuk dilanjutkan implementasinya saat situasi sudah memungkinkan.
6. Perbaikan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota sudah mulai nampak hasilnya, namun perlu diperhatikan bahwa penopang pertumbuhan saat ini bersifat sementara karena diungkit oleh mega proyek. Untuk itu sektor riil lainnya perlu digerakkan terutama yang mampu menggerakkan geliat perekonomian masyarakat, seperti perdagangan, akomodasi dan makan minum, dan jasa perusahaan, dan jasa perorangan lainnya.
7. UMKM yang telah terbukti lebih mampu bertahan saat krisis perlu dilakukan pendampingan dan penguatan modal dan ketrampilan.
8. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian. Artinya, sendi-sendi ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang harus lebih dipacu pertumbuhannya. Bila ini berjalan dengan baik, maka tidak hanya pertumbuhan yang dapat diperbaiki tetapi kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran juga dapat ditekan lebih rendah.
9. Optimalisasi program yang diorientasikan untuk mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor yang masih potensi seperti subkategori dari industri pengolahan yaitu industri makanan, industri kulit, industri kerajinan, dan industri kreatif lainnya.

**Semasa Pandemi COVID-19**

1. Mengutamakan program penanganan pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Membantu menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi untuk menjamin kecukupan pangan dan energi keluarga.
3. Mempermudah dan meningkatkan kualitas akses layanan kesehatan.

4. Mempermudah dan meningkatkan akses layanan pendidikan.
5. Adaptasi model pembelajaran baru dengan tetap menjaga kualitas pengajaran.
6. Mengkonsolidasikan dan menyederhanakan program pembangunan.
7. Mengurangi kerentanan terpaparnya COVID-19.
8. Pemberdayaan UMKM untuk menjaga agar tetap ada pendapatan bagi yang rentan menjadi pengangguran.
9. Mengembangkan ekonomi lokal melalui padat karya tunai dari Dana Desa.
10. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dengan memperdayakan sumber daya yang ada.
11. Mengembangkan produk unggulan dengan memulai dari satuan wilayah terkecil yang bisa digerakkan.
12. Memberikan restrukturisasi kredit untuk yang terdampak COVID-19.
13. Memberikan hibah atau pinjaman lunak untuk modal kerja produktif.

# DAFTAR PUSTAKA





## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander E.R., 2000, *Why Planning Vs. Markets is an Oxymoron: Asking The Right Question, Planning & Markets*, University of Southern, California, Los Angeles.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFYogyakarta, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2010, *Ekonomi pembangunan*. Edisi kelima, STIM YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Asian Development Bank, 2010, *Key Indicators for Asia and the Pacific*. Asian Development Bank: Mandaluyong City, Philippines.
- Badan Pusat Statistik RI, 2019, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2019, *Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta 2014-2018*, Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2019, *Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2014-2018*, Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- BPS Provinsi DIY, 2019, *Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2019*, Yogyakarta.
- Boediono, 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFY Yogyakarta, Yogyakarta.
- Boediono, 1999. *Ekonomi Makro*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4 (ed. Ke-6), BPFYogyakarta, Yogyakarta.
- Herrick Bruce dan Kandleberger Charles P, 1988, *Economic Development (diterjemahkan oleh Drs. Komarudin, Drs. A. Hasyuri Ali, Drs. G. Kartasapoetra)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Internet Encyclopedia of Philosophy, *Adam Smith (1723—1790)*, Accessed March 1, 2020.
- Irawan dan Suparmoko, M. 2002, *Ekonomi Pembangunan*, BPFYogyakarta, Yogyakarta.
- Kartasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Tingkat Nasional Tahun 2011-2017*, Jakarta, Indonesia ([inklusif.bappenas.go.id/data](http://inklusif.bappenas.go.id/data))
- Klasen, Stephen, 2010, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper Series, Mandaluyong City, Philippines.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Limbong, Bernhard, 2013, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, *Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila* Seminar Bulanan III, PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker, 2002, *The Essence of The Economy*, Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022*, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko, 2008, *The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*, JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, \_\_.
- Ridwan, 2016, *Pembangunan Ekonomi Regional*, Pustaka Puitika Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations*, Forth Edition, Tree Press, New York.
- Sukirno, Sadono, 1976, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan*, LP3ES UI Jakarta, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1999, *Pengantar Teori Makroekonomi*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang Parulian, 2016, *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, P.J, 2001, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma, LP3ES No. 3.
- Tambunan, Tulus.T.H, 1999, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tikson, Deddy, T. 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*, Jakarta.
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2015, *Economic Development 12<sup>th</sup> Edition*, Addison Wesley, London.
- Thomas, V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., and Wang Yang, 2001, *The Quality of Growth*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Uppal, J.S., dkk, 2000, *Taxation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto Hg, 1990, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- World Bank, 1991, *The Challenge of Development*, World Development Report 1991.
- World Economic Forum, 2017, *The Inclusive Growth and Development Report 2017*, Geneva, Swiss.
- Yadiansyah, 2007. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi Di Indonesia Periode 1993-2005*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No.1/2007 Hal. 59-78, Malang.

# LAMPIRAN





**Lampiran Tabel 1.**  
**PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>10.793.840,1</b>	<b>11.456.173,0</b>	<b>11.932.787,9</b>	<b>12.708.213,7</b>	<b>13.255.030,7</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9.442.590,2	10.036.120,9	10.423.478,0	11.157.338,2	11.656.876,1
	a. Tanaman Pangan	3.808.409,6	4.134.843,7	4.232.040,5	4.572.744,8	4.664.722,6
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	287.655,4	298.985,8	294.665,5	309.755,4	464.248,2
	c. Perkebunan Semusim	53.795,0	55.701,7	59.325,1	64.355,4	68.512,9
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2.735.787,8	2.815.065,7	2.974.072,0	3.121.359,1	3.227.260,4
	e. Perkebunan Tahunan	225.176,9	254.106,9	273.274,6	285.128,2	300.700,1
	f. Peternakan	2.136.761,6	2.265.239,7	2.358.965,9	2.561.088,5	2.682.245,4
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	195.003,9	212.177,4	231.134,5	242.906,8	249.186,6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	902.903,4	955.185,0	1.004.944,9	1.020.262,4	1.086.968,1
	3 Perikanan	448.346,5	464.867,1	504.365,0	530.613,1	511.186,6
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>573.133,0</b>	<b>593.156,2</b>	<b>615.943,0</b>	<b>687.661,1</b>	<b>722.619,2</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Biji Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	573.133,0	593.156,2	615.943,0	687.661,1	722.619,2
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13.303.467,8</b>	<b>14.547.348,3</b>	<b>15.635.872,1</b>	<b>16.869.995,9</b>	<b>18.172.378,5</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	7.103.601,4	7.941.762,8	8.558.240,6	9.390.162,7	10.286.782,3
	3 Pengolahan Tembakau	742.297,4	794.422,8	910.077,8	981.946,4	1.030.848,5
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.458.642,5	1.602.087,3	1.736.475,9	1.892.258,0	2.076.929,7
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	378.490,2	404.318,7	430.499,1	421.218,3	430.011,7
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	204.404,5	205.278,4	225.302,1	241.765,9	244.916,7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	293.838,4	322.792,3	346.837,1	374.195,8	405.210,5
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	131.001,4	142.898,6	152.564,8	158.413,1	164.063,2
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	318.017,1	306.053,3	310.263,1	314.391,4	319.979,6
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	426.568,7	438.024,2	472.977,9	495.085,0	494.992,4
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	890.732,6	935.009,2	938.695,9	925.055,5	963.729,3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	494.955,9	542.431,8	562.134,1	582.981,7	593.930,6
	14 Industri Alat Angkutan	3.104,5	3.052,6	3.189,3	3.345,7	3.525,2
	15 Industri Furnitur	538.313,4	572.726,5	625.513,0	692.138,3	732.577,6
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	319.499,7	336.489,5	363.101,3	397.038,1	424.881,0
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>118.012,2</b>	<b>141.794,3</b>	<b>173.689,0</b>	<b>186.513,3</b>	<b>202.276,0</b>
	1 Ketenagalistrikan	117.037,3	140.746,6	172.558,0	185.375,1	201.012,6
	2 Gas	974,9	1.047,7	1.131,0	1.138,2	1.263,4
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>109.697,2</b>	<b>114.764,9</b>	<b>121.272,2</b>	<b>128.125,2</b>	<b>139.653,1</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9.499.916,9</b>	<b>10.286.733,8</b>	<b>11.313.409,2</b>	<b>13.351.677,6</b>	<b>15.715.532,2</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>8.342.646,2</b>	<b>9.297.746,0</b>	<b>10.220.290,9</b>	<b>11.156.434,4</b>	<b>11.981.014,2</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.401.769,5	1.569.787,6	1.720.350,8	1.863.979,7	2.066.386,3
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6.940.876,7	7.727.958,4	8.499.940,0	9.292.454,6	9.914.627,9
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>5.763.846,2</b>	<b>6.248.794,0</b>	<b>6.783.602,2</b>	<b>7.469.963,5</b>	<b>7.975.660,9</b>
	1 Angkutan Rel	101.336,8	108.248,1	130.059,7	142.811,4	191.886,3
	2 Angkutan Darat	3.485.831,2	3.627.080,5	3.804.087,3	4.047.057,6	4.449.142,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	992.290,7	1.205.344,0	1.402.533,6	1.676.883,0	1.526.365,1
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.184.387,5	1.308.121,4	1.446.921,5	1.603.211,5	1.808.266,7
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>10.383.401,7</b>	<b>11.255.100,2</b>	<b>12.304.098,9</b>	<b>13.273.486,4</b>	<b>14.636.463,0</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	2.050.489,2	2.273.996,0	2.596.088,2	2.952.305,4	3.564.265,8
	2 Penyediaan Makan Minum	8.332.912,5	8.981.104,2	9.708.010,8	10.321.181,0	11.072.197,2
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8.244.241,8</b>	<b>8.957.494,4</b>	<b>9.785.905,1</b>	<b>10.523.889,6</b>	<b>11.283.225,3</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>4.022.438,4</b>	<b>4.334.778,8</b>	<b>4.642.314,7</b>	<b>5.106.466,1</b>	<b>5.649.248,2</b>
	1 Bank	3.052.521,2	3.273.041,3	3.474.376,3	3.842.638,9	4.244.913,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	305.491,8	329.514,0	359.084,4	382.790,7	414.399,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	656.551,6	723.822,6	799.593,9	871.439,0	979.235,9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7.873,8	8.401,0	9.260,1	9.597,5	10.699,5
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>7.116.820,4</b>	<b>7.800.511,0</b>	<b>8.368.916,8</b>	<b>9.022.612,2</b>	<b>9.895.072,4</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>1.048.359,3</b>	<b>1.115.852,4</b>	<b>1.209.401,7</b>	<b>1.309.147,9</b>	<b>1.437.497,9</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>8.379.231,5</b>	<b>9.217.107,9</b>	<b>10.213.350,4</b>	<b>10.949.666,3</b>	<b>11.631.325,3</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>8.598.743,9</b>	<b>9.010.143,8</b>	<b>9.697.395,2</b>	<b>10.533.809,4</b>	<b>11.508.225,5</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2.553.550,8</b>	<b>2.759.864,8</b>	<b>3.003.721,3</b>	<b>3.220.939,8</b>	<b>3.535.220,9</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2.589.171,1</b>	<b>2.824.989,7</b>	<b>3.109.029,3</b>	<b>3.375.735,3</b>	<b>3.659.739,5</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>101.440.518,4</b>	<b>109.962.353,6</b>	<b>119.130.999,9</b>	<b>129.874.337,9</b>	<b>141.400.183,1</b>

**Lampiran Tabel 2.**  
**PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>7.667.601,7</b>	<b>7.779.801,3</b>	<b>7.930.182,1</b>	<b>8.101.333,3</b>	<b>8.184.692,0</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.666.702,6	6.766.494,7	6.883.545,6	7.069.776,5	7.170.745,8
	a. Tanaman Pangan	2.838.357,6	2.916.633,1	2.895.314,1	2.950.946,0	2.941.429,2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	220.477,6	219.115,2	223.213,2	229.613,1	331.553,2
	c. Perkebunan Semusim	40.253,7	38.481,5	40.244,1	41.785,0	43.584,3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.709.503,9	1.694.434,8	1.751.517,6	1.791.571,1	1.752.690,2
	e. Perkebunan Tahunan	160.968,8	163.005,1	169.974,7	176.563,8	188.474,6
	f. Peternakan	1.548.209,3	1.581.601,3	1.643.457,2	1.715.413,1	1.749.017,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	148.931,6	153.223,6	159.824,7	163.884,4	163.997,1
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	700.236,9	708.450,0	728.827,2	711.208,7	712.442,1
	3 Perikanan	300.662,1	304.856,6	317.809,3	320.348,1	301.504,1
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>471.323,2</b>	<b>473.298,7</b>	<b>489.349,2</b>	<b>541.183,6</b>	<b>557.653,5</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	471.323,2	473.298,7	489.349,2	541.183,6	557.653,5
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>10.693.035,7</b>	<b>11.234.472,6</b>	<b>11.878.962,4</b>	<b>12.487.005,4</b>	<b>13.201.887,1</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.724.930,3	6.111.908,0	6.505.523,4	6.954.983,1	7.508.502,4
	3 Pengolahan Tembakau	453.234,7	460.060,2	489.335,7	514.937,1	523.804,6
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.122.114,4	1.193.570,6	1.274.075,8	1.348.910,6	1.439.852,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	300.273,3	310.008,0	323.933,9	307.907,2	305.131,3
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	186.553,1	183.513,3	198.305,1	209.431,9	209.621,1
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	253.685,7	268.713,7	278.534,7	287.372,3	307.555,5
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	135.404,1	144.381,0	152.557,2	154.825,8	157.737,7
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	265.704,0	246.688,5	254.141,5	253.462,1	256.768,1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	335.701,7	336.586,0	360.404,3	373.123,9	369.065,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	777.412,5	801.506,7	799.598,5	770.630,6	785.642,2
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	430.750,2	450.695,5	465.140,1	476.242,6	472.570,0
	14 Industri Alat Angkutan	2.631,5	2.514,7	2.610,9	2.703,0	2.780,6
	15 Industri Furnitur	453.940,5	470.527,2	503.683,8	545.914,7	566.496,2
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	250.699,7	253.799,2	271.117,6	286.560,5	296.359,6
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>127.701,3</b>	<b>145.910,1</b>	<b>151.680,9</b>	<b>156.706,5</b>	<b>165.217,4</b>
	1 Ketenagalistrikan	126.892,6	145.088,0	150.840,0	155.863,5	164.282,9
	2 Gas	808,7	822,1	840,9	843,0	934,5
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>85.260,2</b>	<b>87.268,2</b>	<b>90.288,8</b>	<b>94.923,3</b>	<b>103.372,6</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>7.826.700,7</b>	<b>8.250.608,3</b>	<b>8.830.612,3</b>	<b>9.984.760,0</b>	<b>11.421.140,1</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>6.944.902,7</b>	<b>7.366.324,7</b>	<b>7.787.488,0</b>	<b>8.219.289,3</b>	<b>8.643.437,9</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.091.042,1	1.165.920,9	1.229.214,5	1.291.655,4	1.358.371,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5.853.860,6	6.200.403,8	6.558.273,5	6.927.634,0	7.285.066,0
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>4.541.309,5</b>	<b>4.750.172,8</b>	<b>4.976.405,7</b>	<b>5.304.843,6</b>	<b>5.493.402,2</b>
	1 Angkutan Rel	65.371,0	67.160,6	78.898,8	83.772,3	95.240,4
	2 Angkutan Darat	2.902.683,0	2.957.490,5	3.053.105,4	3.200.755,4	3.382.372,1
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	650.042,7	740.177,1	800.039,5	896.953,5	801.519,5
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	923.212,8	985.344,7	1.044.362,0	1.123.362,4	1.214.270,3
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>7.842.143,3</b>	<b>8.274.501,4</b>	<b>8.788.711,3</b>	<b>9.383.603,3</b>	<b>10.217.676,9</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	1.450.436,0	1.568.773,7	1.743.404,0	1.971.041,2	2.342.698,2
	2 Penyediaan Makan Minum	6.391.707,2	6.705.727,6	7.045.307,3	7.412.562,1	7.874.978,6
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8.891.144,9</b>	<b>9.630.639,1</b>	<b>10.222.383,3</b>	<b>10.884.532,6</b>	<b>11.695.491,8</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>3.060.732,9</b>	<b>3.213.478,1</b>	<b>3.303.797,6</b>	<b>3.506.587,6</b>	<b>3.805.395,9</b>
	1 Bank	2.273.369,4	2.378.617,2	2.420.775,4	2.577.284,2	2.801.423,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	247.199,4	258.517,2	271.204,2	281.162,4	295.922,0
	3 Jasa Keuangan Lainnya	533.921,7	569.907,8	605.103,1	641.227,9	700.527,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.242,4	6.435,9	6.714,9	6.913,1	7.523,5
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>6.082.488,7</b>	<b>6.394.248,8</b>	<b>6.708.239,4</b>	<b>7.079.839,3</b>	<b>7.499.627,4</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>991.563,8</b>	<b>1.026.163,5</b>	<b>1.086.911,8</b>	<b>1.146.811,6</b>	<b>1.224.235,0</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>6.304.910,7</b>	<b>6.656.182,7</b>	<b>6.956.541,3</b>	<b>7.239.151,9</b>	<b>7.477.921,5</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>7.444.276,5</b>	<b>7.672.850,0</b>	<b>8.096.345,9</b>	<b>8.583.073,6</b>	<b>9.146.783,8</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2.210.405,6</b>	<b>2.310.356,4</b>	<b>2.445.240,6</b>	<b>2.593.233,4</b>	<b>2.764.571,4</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2.288.950,1</b>	<b>2.419.533,0</b>	<b>2.558.881,6</b>	<b>2.717.386,1</b>	<b>2.887.199,8</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>83.474.451,5</b>	<b>87.685.809,6</b>	<b>92.302.022,4</b>	<b>98.024.264,3</b>	<b>104.489.706,4</b>

Lampiran Tabel 3.

## Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>2,11</b>	<b>1,46</b>	<b>1,93</b>	<b>2,16</b>	<b>1,03</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,94	1,50	1,73	2,71	1,43
	a. Tanaman Pangan	2,84	2,76	-0,73	1,92	-0,32
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	3,71	-0,62	1,87	2,87	44,40
	c. Perkebunan Semusim	-3,39	-4,40	4,58	3,83	4,31
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-1,30	-0,88	3,37	2,29	-2,17
	e. Perkebunan Tahunan	-3,89	1,27	4,28	3,88	6,75
	f. Peternakan	4,73	2,16	3,91	4,38	1,96
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,97	2,88	4,31	2,54	0,07
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,83	1,17	2,88	-2,42	0,17
	3 Perikanan	4,21	1,40	4,25	0,80	-5,88
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,13</b>	<b>0,42</b>	<b>3,39</b>	<b>10,59</b>	<b>3,04</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,13	0,42	3,39	10,59	3,04
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>2,13</b>	<b>5,06</b>	<b>5,74</b>	<b>5,12</b>	<b>5,73</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	3,14	6,76	6,44	6,91	7,96
	3 Pengolahan Tembakau	-0,75	1,51	6,36	5,23	1,72
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5,96	6,37	6,74	5,87	6,74
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7,42	3,24	4,49	-4,95	-0,90
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	-2,13	-1,63	8,06	5,61	0,09
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	2,03	5,92	3,65	3,17	7,02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,57	6,63	5,66	1,49	1,88
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-9,10	-7,16	3,02	-0,27	1,30
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-6,52	0,26	7,08	3,53	-1,09
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	-1,42	3,10	-0,24	-3,62	1,95
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	6,80	4,63	3,20	2,39	-0,77
	14 Industri Alat Angkutan	-7,07	-4,44	3,83	3,53	2,87
	15 Industri Furnitur	-2,79	3,65	7,05	8,38	3,77
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	2,13	1,24	6,82	5,70	3,42
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>2,19</b>	<b>14,26</b>	<b>3,96</b>	<b>3,31</b>	<b>5,43</b>
	1 Ketenagalistrikan	2,20	14,34	3,96	3,33	5,40
	2 Gas	1,11	1,66	2,28	0,25	10,85
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>2,90</b>	<b>2,36</b>	<b>3,46</b>	<b>5,13</b>	<b>8,90</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>4,24</b>	<b>5,42</b>	<b>7,03</b>	<b>13,07</b>	<b>14,39</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>6,19</b>	<b>6,07</b>	<b>5,72</b>	<b>5,54</b>	<b>5,16</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3,03	6,86	5,43	5,08	5,17
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6,80	5,92	5,77	5,63	5,16
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>3,73</b>	<b>4,60</b>	<b>4,76</b>	<b>6,60</b>	<b>3,55</b>
	1 Angkutan Rel	7,97	2,74	17,48	6,18	13,69
	2 Angkutan Darat	3,29	1,89	3,23	4,84	5,67
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	3,00	13,87	8,09	12,11	-10,64
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	5,40	6,73	5,99	7,56	8,09
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>5,77</b>	<b>5,51</b>	<b>6,21</b>	<b>6,77</b>	<b>8,89</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	7,17	8,16	11,13	13,06	18,86
	2 Penyediaan Makan Minum	5,46	4,91	5,06	5,21	6,24
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>5,11</b>	<b>8,32</b>	<b>6,14</b>	<b>6,48</b>	<b>7,45</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>8,27</b>	<b>4,99</b>	<b>2,81</b>	<b>6,14</b>	<b>8,52</b>
	1 Bank	8,97	4,63	1,77	6,47	8,70
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	4,01	4,58	4,91	3,67	5,25
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7,43	6,74	6,18	5,97	9,25
	4 Jasa Penunjang Keuangan	3,09	3,10	4,34	2,95	8,83
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>6,05</b>	<b>5,13</b>	<b>4,91</b>	<b>5,54</b>	<b>5,93</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>7,31</b>	<b>3,49</b>	<b>5,92</b>	<b>5,51</b>	<b>6,75</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>5,57</b>	<b>5,57</b>	<b>4,51</b>	<b>4,06</b>	<b>3,30</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>7,28</b>	<b>3,07</b>	<b>5,52</b>	<b>6,01</b>	<b>6,57</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>7,15</b>	<b>4,52</b>	<b>5,84</b>	<b>6,05</b>	<b>6,61</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>8,00</b>	<b>5,70</b>	<b>5,76</b>	<b>6,19</b>	<b>6,25</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>

**Lampiran Tabel 4.**  
**Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (persen) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>10,64</b>	<b>10,42</b>	<b>10,02</b>	<b>9,79</b>	<b>9,37</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,31	9,13	8,75	8,59	8,24
	a. Tanaman Pangan	3,75	3,76	3,55	3,52	3,30
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,28	0,27	0,25	0,24	0,33
	c. Perkebunan Semusim	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,70	2,56	2,50	2,40	2,28
	e. Perkebunan Tahunan	0,22	0,23	0,23	0,22	0,21
	f. Peternakan	2,11	2,06	1,98	1,97	1,90
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,89	0,87	0,84	0,79	0,77
	3 Perikanan	0,44	0,42	0,42	0,41	0,36
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,56</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>	<b>0,53</b>	<b>0,51</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Biji Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13,11</b>	<b>13,23</b>	<b>13,12</b>	<b>12,99</b>	<b>12,85</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,00	7,22	7,18	7,23	7,27
	3 Pengolahan Tembakau	0,73	0,72	0,76	0,76	0,73
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,44	1,46	1,46	1,46	1,47
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,37	0,37	0,36	0,32	0,30
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,20	0,19	0,19	0,19	0,17
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,42	0,40	0,40	0,38	0,35
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	0,88	0,85	0,79	0,71	0,68
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,49	0,49	0,47	0,45	0,42
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,53	0,52	0,53	0,53	0,52
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>9,37</b>	<b>9,35</b>	<b>9,50</b>	<b>10,28</b>	<b>11,11</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>8,22</b>	<b>8,46</b>	<b>8,58</b>	<b>8,59</b>	<b>8,47</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,38	1,43	1,44	1,44	1,46
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6,84	7,03	7,13	7,15	7,01
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>5,68</b>	<b>5,68</b>	<b>5,69</b>	<b>5,75</b>	<b>5,64</b>
	1 Angkutan Rel	0,10	0,10	0,11	0,11	0,14
	2 Angkutan Darat	3,44	3,30	3,19	3,12	3,15
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,98	1,10	1,18	1,29	1,08
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,17	1,19	1,21	1,23	1,28
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,33</b>	<b>10,22</b>	<b>10,35</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	2,02	2,07	2,18	2,27	2,52
	2 Penyediaan Makan Minum	8,21	8,17	8,15	7,95	7,83
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>8,13</b>	<b>8,15</b>	<b>8,21</b>	<b>8,10</b>	<b>7,98</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>3,97</b>	<b>3,94</b>	<b>3,90</b>	<b>3,93</b>	<b>4,00</b>
	1 Bank	3,01	2,98	2,92	2,96	3,00
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,65	0,66	0,67	0,67	0,69
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>7,02</b>	<b>7,09</b>	<b>7,02</b>	<b>6,95</b>	<b>7,00</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>8,26</b>	<b>8,38</b>	<b>8,57</b>	<b>8,43</b>	<b>8,23</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>8,48</b>	<b>8,19</b>	<b>8,14</b>	<b>8,11</b>	<b>8,14</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>2,52</b>	<b>2,51</b>	<b>2,52</b>	<b>2,48</b>	<b>2,50</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>2,55</b>	<b>2,57</b>	<b>2,61</b>	<b>2,60</b>	<b>2,59</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran Tabel 5.**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi DIY (persen) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>0,20</b>	<b>0,13</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>	<b>0,09</b>
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,16	0,12	0,13	0,20	0,10
	a. Tanaman Pangan	0,10	0,09	-0,02	0,06	-0,01
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,01	0,00	0,00	0,01	0,10
	c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,03	-0,02	0,07	0,04	-0,04
	e. Perkebunan Tahunan	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
	f. Peternakan	0,09	0,04	0,07	0,08	0,03
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,02	0,01	0,02	-0,02	0,00
	3 Perikanan	0,02	0,01	0,01	0,00	-0,02
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,02	0,06	0,02
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>0,28</b>	<b>0,65</b>	<b>0,73</b>	<b>0,66</b>	<b>0,73</b>
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,22	0,46	0,45	0,49	0,56
	3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,01	0,03	0,03	0,01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,03	0,01	0,02	-0,02	0,00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	-0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-0,03	0,00	0,03	0,01	0,00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,	-0,01	0,03	0,00	-0,03	0,02
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	-0,02	0,02	0,04	0,05	0,02
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	0,01	0,00	0,02	0,02	0,01
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik, Gas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	1 Ketenagalistrikan	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>0,40</b>	<b>0,51</b>	<b>0,66</b>	<b>1,25</b>	<b>1,47</b>
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	<b>0,47</b>	<b>0,43</b>
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,04	0,09	0,07	0,07	0,07
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	0,47	0,42	0,41	0,40	0,36
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>0,21</b>	<b>0,25</b>	<b>0,26</b>	<b>0,36</b>	<b>0,19</b>
	1 Angkutan Rel	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
	2 Angkutan Darat	0,12	0,07	0,11	0,16	0,19
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0,02	0,11	0,07	0,10	-0,10
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>	<b>0,59</b>	<b>0,64</b>	<b>0,85</b>
	1 Penyediaan Akomodasi	0,12	0,14	0,20	0,25	0,38
	2 Penyediaan Makan Minum	0,42	0,38	0,39	0,40	0,47
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>0,54</b>	<b>0,89</b>	<b>0,67</b>	<b>0,72</b>	<b>0,83</b>
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan</b>	<b>0,29</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>	<b>0,22</b>	<b>0,30</b>
	1 Bank	0,24	0,13	0,05	0,17	0,23
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,05	0,04	0,04	0,04	0,06
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	<b>0,44</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>	<b>0,40</b>	<b>0,43</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>	<b>0,24</b>
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>0,64</b>	<b>0,27</b>	<b>0,48</b>	<b>0,53</b>	<b>0,58</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>0,19</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>0,21</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>

**Lampiran Tabel 6.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (dalam juta rupiah) 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>68.730.528,0</b>	<b>74.429.796,0</b>	<b>81.335.810,0</b>	<b>86.753.196,8</b>	<b>92.459.988,7</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	26.286.556,0	28.460.385,0	30.686.630,4	32.605.371,5	34.839.769,0
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.682.819,0	2.919.407,0	3.191.711,9	3.438.352,8	3.692.728,2
1.c. Pakaian	3.324.854,0	3.686.642,0	3.997.231,1	4.332.073,2	4.757.132,8
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8.468.847,0	9.143.147,0	10.235.671,4	10.984.573,2	11.573.300,3
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	3.411.483,0	3.679.768,0	4.005.992,3	4.247.903,6	4.454.352,4
1.f. Kesehatan	3.312.124,0	3.671.351,0	4.046.099,9	4.341.324,4	4.645.629,1
1.g. Transportasi/Angkutan	8.753.886,0	9.276.225,0	10.122.089,0	10.863.212,2	11.284.823,8
1.h. Komunikasi	3.360.001,0	3.540.534,0	4.058.504,3	4.229.606,9	4.586.007,0
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.572.116,0	1.710.637,0	1.838.569,7	1.935.647,6	2.081.787,1
1.j. Pendidikan	4.047.224,0	4.473.539,0	4.873.266,4	5.114.140,8	5.576.854,9
1.k. Penginapan dan Hotel	2.073.547,0	2.254.386,0	2.454.164,1	2.616.591,0	2.702.124,1
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.437.070,0	1.613.774,0	1.825.879,6	2.044.399,6	2.265.479,8
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>3.171.193,0</b>	<b>3.225.070,0</b>	<b>3.756.395,3</b>	<b>4.095.045,7</b>	<b>4.613.731,6</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>17.214.154,0</b>	<b>18.321.761,0</b>	<b>19.508.071,6</b>	<b>21.346.113,0</b>	<b>22.458.453,7</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	9.679.422,0	10.298.756,0	10.967.170,4	11.981.061,8	12.677.479,3
3.b. Konsumsi Individu	7.534.733,0	8.023.005,0	8.540.901,3	9.365.051,2	9.780.974,3
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>30.798.881,0</b>	<b>33.428.978,0</b>	<b>37.111.435,8</b>	<b>43.173.678,2</b>	<b>49.519.127,6</b>
4.a. Bangunan	24.803.517,0	26.755.606,0	29.925.361,5	35.198.441,8	40.057.425,2
4.b. Non-Bangunan	5.995.364,0	6.673.371,0	7.186.074,3	7.975.236,4	9.461.702,4
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>1.151.797,0</b>	<b>1.295.788,0</b>	<b>1.368.184,0</b>	<b>1.435.491,4</b>	<b>1.501.126,3</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>6.266.264,0</b>	<b>6.495.282,0</b>	<b>7.436.958,6</b>	<b>8.749.632,0</b>	<b>8.970.891,8</b>
6.a. Barang	4.764.412,0	4.728.510,0	5.599.613,7	6.470.961,2	6.356.054,1
6.b. Jasa	1.501.852,0	1.766.772,0	1.837.344,9	2.278.670,8	2.614.837,7
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>5.066.145,0</b>	<b>5.922.732,0</b>	<b>6.530.718,6</b>	<b>7.206.068,1</b>	<b>6.934.236,1</b>
7.a. Barang	1.240.178,0	1.840.763,0	2.298.738,3	2.594.883,7	2.455.950,0
7.b. Jasa	3.825.967,0	4.081.969,0	4.231.980,3	4.611.184,4	4.478.286,1
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(20.826.153,0)</b>	<b>(21.311.589,0)</b>	<b>(24.857.417,9)</b>	<b>(28.472.751,1)</b>	<b>(31.188.900,5)</b>
8.a. Ekspor	52.238.029,0	58.232.975,0	62.713.295,5	63.820.931,8	68.474.525,3
8.b. Impor	73.064.183,0	79.544.564,0	87.570.713,4	92.293.682,9	99.663.425,8
<b>P D R B</b>	<b>101.440.518,0</b>	<b>109.962.354,0</b>	<b>119.128.718,8</b>	<b>129.874.337,9</b>	<b>141.400.183,1</b>

**Lampiran Tabel 7.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (dalam juta rupiah) 2015-2019**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>50.193.386,0</b>	<b>52.619.164,0</b>	<b>55.364.064,2</b>	<b>57.552.317,2</b>	<b>59.745.355,4</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	17.270.490,0	17.895.500,0	18.710.656,6	19.380.268,0	20.087.510,4
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1.924.701,0	2.025.104,0	2.124.006,7	2.190.640,1	2.284.769,4
1.c. Pakaian	2.606.391,0	2.754.831,0	2.882.167,5	3.003.953,5	3.128.272,2
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6.085.963,0	6.433.791,0	6.836.626,0	7.109.614,4	7.282.779,3
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	2.530.849,0	2.620.505,0	2.782.330,4	2.871.049,0	2.911.063,5
1.f. Kesehatan	2.519.983,0	2.652.280,0	2.811.784,0	2.971.090,9	3.057.834,9
1.g. Transportasi/Angkutan	6.978.324,0	7.405.227,0	7.792.662,3	8.182.345,0	8.454.210,1
1.h. Komunikasi	2.846.242,0	2.990.940,0	3.154.836,7	3.270.340,4	3.534.308,1
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.206.458,0	1.263.916,0	1.302.424,2	1.335.982,4	1.413.733,2
1.j. Pendidikan	3.387.527,0	3.576.074,0	3.748.691,5	3.829.719,5	4.038.874,0
1.k. Penginapan dan Hotel	1.677.578,0	1.783.261,0	1.900.445,0	2.006.474,9	2.074.402,3
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.158.880,0	1.217.736,0	1.317.433,2	1.400.839,1	1.477.597,9
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2.384.374,0</b>	<b>2.362.344,0</b>	<b>2.589.249,7</b>	<b>2.657.427,1</b>	<b>2.911.995,2</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>12.719.134,0</b>	<b>12.949.746,0</b>	<b>13.104.558,9</b>	<b>13.559.565,8</b>	<b>13.983.251,8</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	6.857.276,0	6.975.741,0	7.062.282,0	7.307.205,9	7.552.980,6
3.b. Konsumsi Individu	5.861.859,0	5.974.005,0	6.042.276,8	6.252.359,9	6.430.271,2
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>22.286.615,0</b>	<b>23.616.948,0</b>	<b>24.791.861,8</b>	<b>27.313.862,5</b>	<b>29.973.484,0</b>
4.a. Bangunan	18.073.133,0	19.170.029,0	20.137.862,1	22.320.310,9	24.264.543,1
4.b. Non-Bangunan	4.213.481,0	4.446.919,0	4.653.999,8	4.993.551,6	5.708.940,9
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>974.645,0</b>	<b>1.045.164,0</b>	<b>1.066.313,9</b>	<b>1.104.088,4</b>	<b>1.137.665,5</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>4.416.252,0</b>	<b>4.400.889,0</b>	<b>4.808.527,4</b>	<b>5.424.802,7</b>	<b>5.420.877,0</b>
6.a. Barang	3.349.434,0	3.192.594,0	3.595.250,9	3.995.688,4	3.818.684,9
6.b. Jasa	1.066.818,0	1.208.295,0	1.213.276,6	1.429.114,3	1.602.192,1
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>3.728.749,0</b>	<b>4.492.511,0</b>	<b>4.905.221,9</b>	<b>5.210.390,7</b>	<b>4.740.934,3</b>
7.a. Barang	1.375.927,0	2.099.847,0	2.488.770,8	2.710.907,9	2.543.564,6
7.b. Jasa	2.352.822,0	2.392.664,0	2.416.451,1	2.499.482,8	2.197.369,6
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>(5.771.205,0)</b>	<b>(4.815.934,0)</b>	<b>(4.519.110,1)</b>	<b>(4.377.408,7)</b>	<b>(3.941.988,2)</b>
8.a. Ekspor	37.561.868,0	39.465.621,0	41.714.888,9	41.663.291,0	42.819.563,0
8.b. Impor	43.333.074,0	44.281.555,0	46.233.999,0	46.040.699,7	46.761.551,2
<b>P D R B</b>	<b>83.474.452,0</b>	<b>87.685.810,0</b>	<b>92.300.243,9</b>	<b>98.024.264,3</b>	<b>104.489.706,4</b>

**Lampiran Tabel 8.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (persen) 2015-2019**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>4,74</b>	<b>4,83</b>	<b>5,22</b>	<b>3,95</b>	<b>3,81</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,61	3,62	4,56	3,58	3,65
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	5,55	5,22	4,88	3,14	4,30
1.c. Pakaian	5,44	5,70	4,62	4,23	4,14
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,99	5,72	6,26	3,99	2,44
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemesinan	5,54	3,54	6,18	3,19	1,39
1.f. Kesehatan	5,16	5,25	6,01	5,67	2,92
1.g. Transportasi/Angkutan	5,06	6,12	5,23	5,00	3,32
1.h. Komunikasi	5,01	5,08	5,48	3,66	8,07
1.i. Rekreasi dan Budaya	5,03	4,76	3,05	2,58	5,82
1.j. Pendidikan	4,88	5,57	4,83	2,16	5,46
1.k. Penginapan dan Hotel	5,69	6,30	6,57	5,58	3,39
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	4,94	5,08	8,19	6,33	5,48
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2,90</b>	<b>-0,92</b>	<b>9,61</b>	<b>2,63</b>	<b>9,58</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>5,50</b>	<b>1,81</b>	<b>1,20</b>	<b>3,47</b>	<b>3,12</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	5,37	1,73	1,24	3,47	3,36
3.b. Konsumsi Individu	5,65	1,91	1,14	3,48	2,85
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>4,34</b>	<b>5,97</b>	<b>4,97</b>	<b>10,17</b>	<b>9,74</b>
4.a. Bangunan	4,20	6,07	5,05	10,84	8,71
4.b. Non-Bangunan	4,97	5,54	4,66	7,30	14,33
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>4,73</b>	<b>7,24</b>	<b>2,02</b>	<b>3,54</b>	<b>3,04</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>3,23</b>	<b>-0,35</b>	<b>9,26</b>	<b>12,82</b>	<b>-0,07</b>
6.a. Barang	3,17	-4,68	12,61	11,14	-4,43
6.b. Jasa	3,40	13,26	0,41	17,79	12,11
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>15,49</b>	<b>20,48</b>	<b>9,19</b>	<b>6,22</b>	<b>-9,01</b>
7.a. Barang	46,91	52,61	18,52	8,93	-6,17
7.b. Jasa	2,65	1,69	0,99	3,44	-12,09
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>-5,39</b>	<b>-16,55</b>	<b>-6,16</b>	<b>-3,14</b>	<b>-9,95</b>
8.a. Ekspor	4,89	5,07	5,70	-0,12	2,78
8.b. Impor	3,39	2,19	4,41	-0,42	1,57
<b>P D R B</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>

**Lampiran Tabel 9.**  
**Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen) 2015-2019**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>67,75</b>	<b>67,69</b>	<b>68,28</b>	<b>66,80</b>	<b>65,39</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	25,91	25,88	25,76	25,11	24,64
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,64	2,65	2,68	2,65	2,61
1.c. Pakaian	3,28	3,35	3,36	3,34	3,36
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,35	8,31	8,59	8,46	8,18
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemesinan	3,36	3,35	3,36	3,27	3,15
1.f. Kesehatan	3,27	3,34	3,40	3,34	3,29
1.g. Transportasi/Angkutan	8,63	8,44	8,50	8,36	7,98
1.h. Komunikasi	3,31	3,22	3,41	3,26	3,24
1.i. Rekreasi dan Budaya	1,55	1,56	1,54	1,49	1,47
1.j. Pendidikan	3,99	4,07	4,09	3,94	3,94
1.k. Penginapan dan Hotel	2,04	2,05	2,06	2,01	1,91
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,42	1,47	1,53	1,57	1,60
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>3,13</b>	<b>2,93</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,26</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>16,97</b>	<b>16,66</b>	<b>16,38</b>	<b>16,44</b>	<b>15,88</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	9,54	9,37	9,21	9,23	8,97
3.b. Konsumsi Individu	7,43	7,30	7,17	7,21	6,92
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>30,36</b>	<b>30,40</b>	<b>31,15</b>	<b>33,24</b>	<b>35,02</b>
4.a. Bangunan	24,45	24,33	25,12	27,10	28,33
4.b. Non-Bangunan	5,91	6,07	6,03	6,14	6,69
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>1,14</b>	<b>1,18</b>	<b>1,15</b>	<b>1,11</b>	<b>1,06</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>6,18</b>	<b>5,91</b>	<b>6,24</b>	<b>6,74</b>	<b>6,34</b>
6.a. Barang	4,70	4,30	4,70	4,98	4,50
6.b. Jasa	1,48	1,61	1,54	1,75	1,85
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>4,99</b>	<b>5,39</b>	<b>5,48</b>	<b>5,55</b>	<b>4,90</b>
7.a. Barang	1,22	1,67	1,93	2,00	1,74
7.b. Jasa	3,77	3,71	3,55	3,55	3,17
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>-20,53</b>	<b>-19,38</b>	<b>-20,87</b>	<b>-21,92</b>	<b>-22,06</b>
8.a. Ekspor	51,50	52,96	52,64	49,14	48,43
8.b. Impor	72,03	72,34	73,51	71,06	70,48
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lampiran Tabel 10.  
Sumber Pertumbuhan PDRB DIY menurut Pengeluaran (persen) 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>2,85</b>	<b>2,91</b>	<b>3,13</b>	<b>2,37</b>	<b>2,24</b>
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	0,76	0,75	0,93	0,73	0,72
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0,13	0,12	0,11	0,07	0,10
1.c. Pakaian	0,17	0,18	0,15	0,13	0,13
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,43	0,42	0,46	0,30	0,18
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemesinan	0,17	0,11	0,18	0,10	0,04
1.f. Kesehatan	0,16	0,16	0,18	0,17	0,09
1.g. Transportasi/Angkutan	0,42	0,51	0,44	0,42	0,28
1.h. Komunikasi	0,17	0,17	0,19	0,13	0,27
1.i. Rekreasi dan Budaya	0,07	0,07	0,04	0,04	0,08
1.j. Pendidikan	0,20	0,23	0,20	0,09	0,21
1.k. Penginapan dan Hotel	0,11	0,13	0,13	0,11	0,07
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	0,07	0,07	0,11	0,09	0,08
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,26</b>	<b>0,07</b>	<b>0,26</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)</b>	<b>0,83</b>	<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>0,49</b>	<b>0,43</b>
3.a. Konsumsi Kolektif	0,44	0,14	0,10	0,27	0,25
3.b. Konsumsi Individu	0,39	0,13	0,08	0,23	0,18
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>1,17</b>	<b>1,59</b>	<b>1,34</b>	<b>2,73</b>	<b>2,71</b>
4.a. Bangunan	0,92	1,31	1,10	2,36	1,98
4.b. Non-Bangunan	0,25	0,28	0,24	0,37	0,73
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)</b>	<b>0,17</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,46</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
6.a. Barang	0,13	-0,19	0,46	0,43	-0,18
6.b. Jasa	0,04	0,17	0,01	0,23	0,18
<b>7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)</b>	<b>0,63</b>	<b>0,91</b>	<b>0,47</b>	<b>0,33</b>	<b>-0,48</b>
7.a. Barang	0,55	0,87	0,44	0,24	-0,17
7.b. Jasa	0,08	0,05	0,03	0,09	-0,31
<b>8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)</b>	<b>0,41</b>	<b>1,14</b>	<b>0,34</b>	<b>0,15</b>	<b>0,44</b>
8.a. Ekspor	2,20	2,28	2,57	-0,06	1,18
8.b. Impor	1,79	1,14	2,23	-0,21	0,74
<b>P D R B</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>6,20</b>	<b>6,60</b>

**Lampiran Tabel 11.**  
**PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.566.769,3	1.656.160,8	1.725.338,8	1.817.768,7	1.906.137,1
B	Pertambangan dan Pengalihan	109.892,1	115.205,9	131.693,5	169.285,2	178.401,2
C	Industri Pengolahan	925.813,9	1.023.907,4	1.124.647,4	1.240.604,7	1.331.235,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.658,5	6.824,0	8.345,0	9.015,4	10.022,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	10.522,2	11.007,2	11.956,4	12.779,3	13.893,1
F	Konstruksi	649.776,4	708.409,5	824.928,3	1.376.840,6	2.397.087,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.008.690,0	1.132.301,2	1.263.364,3	1.388.864,0	1.484.751,8
H	Transportasi dan Pergudangan	636.391,4	668.632,5	709.036,7	773.542,2	906.133,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.720,6	321.636,8	349.976,8	378.608,2	413.159,7
J	Informasi dan Komunikasi	382.516,6	414.314,1	451.340,6	489.314,1	515.235,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	255.816,3	273.517,3	287.561,2	317.063,2	347.719,3
L	Real Estate	256.043,7	280.548,1	305.761,7	330.860,8	359.287,5
M,N	Jasa Perusahaan	22.111,9	23.344,5	25.107,5	27.288,8	29.365,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	684.126,5	758.942,7	844.496,7	908.517,4	962.943,9
P	Jasa Pendidikan	461.610,9	485.151,2	530.264,4	573.164,9	613.341,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112.613,0	122.042,2	133.316,8	142.458,0	154.735,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	286.474,8	310.059,3	333.329,2	362.283,4	393.485,7
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>7.671.548,0</b>	<b>8.312.004,6</b>	<b>9.060.465,3</b>	<b>10.318.258,8</b>	<b>12.016.934,5</b>

Lampiran Tabel 12.  
PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.138.920,2	1.155.841,0	1.178.301,1	1.196.633,6	1.217.211,4
B	Pertambangan dan Penggalian	91.992,8	93.338,8	106.251,7	134.555,2	138.945,8
C	Industri Pengolahan	782.466,7	829.268,5	892.971,7	963.530,3	1.015.724,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.205,3	7.129,3	7.395,1	7.683,9	8.303,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8.523,6	8.717,7	9.123,2	9.656,3	10.470,5
F	Konstruksi	530.760,3	563.694,1	632.725,0	1.010.661,7	1.708.871,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	848.655,9	904.616,7	977.555,7	1.045.970,5	1.100.214,2
H	Transportasi dan Pergudangan	531.194,2	544.962,7	564.608,5	603.973,1	667.249,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	231.152,4	244.033,1	256.643,3	274.679,0	296.802,7
J	Informasi dan Komunikasi	398.651,2	430.829,9	456.081,5	489.528,9	516.723,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189.970,4	197.983,3	200.121,9	213.000,2	229.587,4
L	Real Estate	226.908,3	238.852,4	254.090,3	268.078,2	281.364,3
M,N	Jasa Perusahaan	20.889,2	21.557,5	22.680,2	24.011,2	25.223,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	513.344,6	545.212,3	571.315,8	596.143,7	616.525,9
P	Jasa Pendidikan	405.420,5	419.141,8	449.157,9	473.837,8	495.437,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.499,8	102.755,0	109.624,0	115.834,5	122.336,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	259.240,5	272.742,9	284.758,8	301.791,2	321.590,4
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>6.281.795,8</b>	<b>6.580.677,0</b>	<b>6.973.405,6</b>	<b>7.729.569,1</b>	<b>8.772.582,6</b>

Lampiran Tabel 13.  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,67	1,49	1,94	1,56	1,72
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	1,46	13,83	26,64	3,26
C	Industri Pengolahan	3,52	5,98	7,68	7,90	5,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	14,89	3,73	3,90	8,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,18	2,28	4,65	5,84	8,43
F	Konstruksi	4,30	6,21	12,25	59,73	69,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,52	6,59	8,06	7,00	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3,61	2,59	3,60	6,97	10,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,37	5,57	5,17	7,03	8,05
J	Informasi dan Komunikasi	5,44	8,07	5,86	7,33	5,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,09	4,22	1,08	6,44	7,79
L	Real Estate	6,25	5,26	6,38	5,51	4,96
M,N	Jasa Perusahaan	6,79	3,20	5,21	5,87	5,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,02	6,21	4,79	4,35	3,42
P	Jasa Pendidikan	7,24	3,38	7,16	5,49	4,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	5,39	6,68	5,67	5,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,02	5,21	4,41	5,98	6,56
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4,62</b>	<b>4,76</b>	<b>5,97</b>	<b>10,84</b>	<b>13,49</b>

Lampiran Tabel 14.  
 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,42	19,92	19,04	17,62	15,86
B	Pertambangan dan Penggalian	1,43	1,39	1,45	1,64	1,48
C	Industri Pengolahan	12,07	12,32	12,41	12,02	11,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,09	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12
F	Konstruksi	8,47	8,52	9,10	13,34	19,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	13,15	13,62	13,94	13,46	12,36
H	Transportasi dan Pergudangan	8,30	8,04	7,83	7,50	7,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,87	3,87	3,86	3,67	3,44
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	4,98	4,98	4,74	4,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,29	3,17	3,07	2,89
L	Real Estate	3,34	3,38	3,37	3,21	2,99
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,28	0,26	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8,92	9,13	9,32	8,80	8,01
P	Jasa Pendidikan	6,02	5,84	5,85	5,55	5,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,47	1,47	1,38	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,73	3,73	3,68	3,51	3,27
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lampiran Tabel 15.  
 Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014-2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	0,27	0,34	0,26	0,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,02	0,20	0,41	0,06
C	Industri Pengolahan	0,44	0,75	0,97	1,01	0,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	0,36	0,52	1,05	5,42	9,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,87	0,89	1,11	0,98	0,70
H	Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,22	0,30	0,56	0,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,21	0,19	0,26	0,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,34	0,51	0,38	0,48	0,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	0,13	0,03	0,18	0,21
L	Real Estate	0,22	0,19	0,23	0,20	0,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,41	0,51	0,40	0,36	0,26
P	Jasa Pendidikan	0,46	0,22	0,46	0,35	0,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,11	0,08	0,10	0,09	0,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,32	0,21	0,18	0,24	0,26
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4,62</b>	<b>4,76</b>	<b>5,97</b>	<b>10,84</b>	<b>13,49</b>

Lampiran Tabel 16.  
PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.821.402,7	2.995.874,3	3.131.888,5	3.331.341,2	3.442.614,4
B	Pertambangan dan Penggalian	125.530,4	128.516,3	129.076,0	133.022,5	135.244,9
C	Industri Pengolahan	2.909.864,1	3.180.265,8	3.449.021,2	3.721.096,3	3.999.979,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.882,0	26.436,0	32.302,6	35.203,2	37.927,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	16.192,9	17.043,7	17.976,3	19.081,8	20.715,7
F	Konstruksi	1.803.228,3	1.943.455,3	2.121.975,1	2.374.858,9	2.569.857,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.585.613,0	1.771.632,1	1.945.840,1	2.123.780,1	2.277.891,3
H	Transportasi dan Pergudangan	940.530,7	1.001.483,6	1.070.707,3	1.153.281,4	1.278.987,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.239.275,5	2.439.516,4	2.652.692,0	2.856.632,3	3.140.309,2
J	Informasi dan Komunikasi	1.411.574,2	1.530.258,1	1.668.376,7	1.789.599,9	1.915.284,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	545.349,2	585.215,5	626.184,6	692.766,4	775.317,0
L	Real Estate	1.262.118,4	1.376.057,5	1.486.180,1	1.604.525,1	1.767.422,2
M,N	Jasa Perusahaan	94.901,6	100.784,7	107.584,7	116.052,8	128.328,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.432.619,2	1.578.240,3	1.756.873,4	1.888.560,9	2.010.644,3
P	Jasa Pendidikan	1.372.466,1	1.437.127,9	1.541.563,9	1.661.756,7	1.816.959,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	354.915,3	387.702,9	419.294,0	443.273,9	488.347,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	387.739,7	413.475,5	454.170,4	498.440,4	539.646,6
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>19.325.203,3</b>	<b>20.913.085,9</b>	<b>22.611.706,7</b>	<b>24.443.273,9</b>	<b>26.345.477,4</b>

Lampiran Tabel 17.  
PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.952.982,7	1.982.709,1	2.032.344,0	2.073.022,1	2.075.624,1
B	Pertambangan dan Penggalian	102.422,6	102.781,3	102.845,2	104.459,6	104.172,9
C	Industri Pengolahan	2.283.703,1	2.407.767,2	2.561.718,3	2.703.162,5	2.848.518,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.243,8	28.020,3	29.138,7	30.552,3	31.997,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13.022,1	13.407,7	13.834,6	14.548,3	15.748,5
F	Konstruksi	1.506.241,3	1.567.472,5	1.660.496,6	1.780.777,2	1.872.846,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.315.611,2	1.401.607,7	1.482.797,1	1.566.466,5	1.647.733,2
H	Transportasi dan Pergudangan	777.541,9	810.461,0	841.891,9	888.309,6	945.661,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.646.727,0	1.748.671,5	1.848.338,5	1.973.106,5	2.144.453,2
J	Informasi dan Komunikasi	1.536.406,9	1.665.675,1	1.763.478,5	1.872.376,1	2.008.893,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	418.450,3	437.903,4	450.267,2	479.952,2	527.818,1
L	Real Estate	1.057.941,5	1.119.537,3	1.175.156,4	1.238.685,0	1.318.304,1
M,N	Jasa Perusahaan	87.194,2	90.911,3	94.797,2	99.885,6	107.260,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.063.245,3	1.125.300,6	1.181.300,9	1.235.060,1	1.277.247,3
P	Jasa Pendidikan	1.157.438,0	1.191.595,4	1.253.063,3	1.329.250,2	1.417.604,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	302.837,0	318.577,5	334.917,6	350.395,0	374.991,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	342.511,4	363.114,3	383.485,7	410.868,3	435.894,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.588.520,4	16.375.513,2	17.209.871,5	18.150.877,0	19.154.769,1

Lampiran Tabel 18.  
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42
P	Jasa Pendidikan	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4,97</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,47</b>	<b>5,53</b>

Lampiran Tabel 19.  
 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,60	14,33	13,85	13,63	13,07
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,61	0,57	0,54	0,51
C	Industri Pengolahan	15,06	15,21	15,25	15,22	15,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,33	9,29	9,38	9,72	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8,20	8,47	8,61	8,69	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	4,87	4,79	4,74	4,72	4,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,59	11,67	11,73	11,69	11,92
J	Informasi dan Komunikasi	7,30	7,32	7,38	7,32	7,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	2,80	2,77	2,83	2,94
L	Real Estate	6,53	6,58	6,57	6,56	6,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,49	0,48	0,48	0,47	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7,41	7,55	7,77	7,73	7,63
P	Jasa Pendidikan	7,10	6,87	6,82	6,80	6,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,85	1,85	1,81	1,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,01	1,98	2,01	2,04	2,05
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lampiran Tabel 20.  
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bantul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,27	0,19	0,30	0,24	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
C	Industri Pengolahan	0,40	0,80	0,94	0,82	0,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
F	Konstruksi	0,40	0,39	0,57	0,70	0,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,56	0,55	0,50	0,49	0,45
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,21	0,19	0,27	0,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,65	0,61	0,72	0,94
J	Informasi dan Komunikasi	0,55	0,83	0,60	0,63	0,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,12	0,08	0,17	0,26
L	Real Estate	0,46	0,40	0,34	0,37	0,44
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,02	0,02	0,03	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,36	0,40	0,34	0,31	0,23
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,22	0,38	0,44	0,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,10	0,10	0,09	0,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,18	0,13	0,12	0,16	0,14
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4,97</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,47</b>	<b>5,53</b>

Lampiran Tabel 21.  
PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.535.656,7	3.787.293,3	3.964.000,0	4.247.159,9	4.435.362,2
B	Pertambangan dan Penggalian	188.772,5	195.599,8	201.718,5	213.551,0	224.101,7
C	Industri Pengolahan	1.284.288,4	1.406.422,4	1.535.319,4	1.657.720,0	1.789.517,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.404,2	12.444,1	15.436,4	16.786,6	17.865,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	23.520,7	24.682,0	26.247,7	27.654,1	30.785,6
F	Konstruksi	1.298.853,1	1.407.758,0	1.563.746,8	1.760.029,9	1.955.966,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.218.309,9	1.381.432,0	1.519.918,4	1.659.974,5	1.778.363,4
H	Transportasi dan Pergudangan	707.695,0	756.686,7	805.855,1	859.503,1	949.017,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	813.608,1	883.856,8	958.922,0	1.023.601,8	1.115.778,3
J	Informasi dan Komunikasi	963.597,6	1.052.120,4	1.157.454,9	1.252.635,6	1.359.281,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.775,3	346.143,7	361.954,0	404.314,1	451.049,9
L	Real Estate	474.733,5	528.958,9	578.583,4	631.984,6	700.940,4
M,N	Jasa Perusahaan	60.222,3	64.966,4	70.298,4	75.779,8	83.038,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.289.112,3	1.411.268,5	1.564.517,3	1.678.921,9	1.784.315,3
P	Jasa Pendidikan	876.367,3	919.058,6	994.408,6	1.077.730,5	1.173.154,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	277.851,3	299.358,7	324.943,0	346.612,6	379.949,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	452.888,9	502.230,6	556.518,0	606.189,6	661.386,5
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>13.798.656,9</b>	<b>14.980.280,9</b>	<b>16.199.841,9</b>	<b>17.540.149,4</b>	<b>18.889.873,3</b>

Lampiran Tabel 22.  
**PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.557.403,3	2.613.031,8	2.664.845,1	2.725.292,1	2.753.512,6
B	Pertambangan dan Penggalian	161.383,4	162.657,4	167.046,1	175.047,9	180.071,5
C	Industri Pengolahan	1.035.163,3	1.090.255,5	1.164.612,3	1.225.540,3	1.297.664,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.030,5	12.662,6	13.308,9	13.926,0	14.409,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	17.940,0	18.301,0	19.033,9	19.890,7	22.074,4
F	Konstruksi	1.036.792,7	1.092.138,3	1.176.314,7	1.269.287,8	1.369.864,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.038.835,3	1.111.128,3	1.179.089,8	1.249.923,7	1.315.100,7
H	Transportasi dan Pergudangan	582.657,8	603.642,3	626.905,1	653.464,6	692.289,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	635.346,4	670.616,2	708.164,6	747.951,9	806.778,1
J	Informasi dan Komunikasi	1.011.119,8	1.100.399,7	1.174.524,5	1.258.021,5	1.368.587,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	239.629,5	250.560,2	252.667,9	272.032,7	298.146,8
L	Real Estate	393.209,3	420.060,4	442.615,4	471.461,0	503.841,3
M,N	Jasa Perusahaan	56.662,6	59.527,9	63.147,0	66.419,8	70.916,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	988.811,7	1.040.788,4	1.088.902,2	1.135.166,8	1.173.350,5
P	Jasa Pendidikan	744.844,8	768.101,1	814.691,6	861.120,4	914.327,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239.841,1	250.576,0	265.932,1	280.269,7	298.431,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	401.692,0	431.708,9	459.756,5	490.063,9	524.008,2
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>11.152.363,1</b>	<b>11.696.155,8</b>	<b>12.281.557,9</b>	<b>12.914.880,8</b>	<b>13.603.374,8</b>

Lampiran Tabel 23.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,58	2,18	1,98	2,27	1,04
B	Pertambangan dan Penggalian	0,25	0,79	2,70	4,79	2,87
C	Industri Pengolahan	2,64	5,32	6,82	5,23	5,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,37	14,80	5,10	4,64	3,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,88	2,01	4,00	4,50	10,98
F	Konstruksi	4,36	5,34	7,71	7,90	7,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,89	6,96	6,12	6,01	5,21
H	Transportasi dan Pergudangan	3,68	3,60	3,85	4,24	5,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,43	5,55	5,60	5,62	7,86
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,83	6,74	7,11	8,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,54	4,56	0,84	7,66	9,60
L	Real Estate	6,65	6,83	5,37	6,52	6,87
M,N	Jasa Perusahaan	7,04	5,06	6,08	5,18	6,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,26	5,26	4,62	4,25	3,36
P	Jasa Pendidikan	7,61	3,12	6,07	5,70	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,19	4,48	6,13	5,39	6,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,65	7,47	6,50	6,59	6,93
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4,82</b>	<b>4,88</b>	<b>5,01</b>	<b>5,16</b>	<b>5,33</b>

Lampiran Tabel 24.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,62	25,28	24,47	24,21	23,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1,37	1,31	1,25	1,22	1,19
C	Industri Pengolahan	9,31	9,39	9,48	9,45	9,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,41	9,40	9,65	10,03	10,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8,83	9,22	9,38	9,46	9,41
H	Transportasi dan Pergudangan	5,13	5,05	4,97	4,90	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,90	5,90	5,92	5,84	5,91
J	Informasi dan Komunikasi	6,98	7,02	7,14	7,14	7,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,34	2,31	2,23	2,31	2,39
L	Real Estate	3,44	3,53	3,57	3,60	3,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,43	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	9,34	9,42	9,66	9,57	9,45
P	Jasa Pendidikan	6,35	6,14	6,14	6,14	6,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	2,00	2,01	1,98	2,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,28	3,35	3,44	3,46	3,50
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lampiran Tabel 25.  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,60	0,50	0,44	0,49	0,22
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,01	0,04	0,07	0,04
C	Industri Pengolahan	0,25	0,49	0,64	0,50	0,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02
F	Konstruksi	0,41	0,50	0,72	0,76	0,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,63	0,65	0,58	0,58	0,50
H	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,19	0,20	0,22	0,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,32	0,32	0,32	0,46
J	Informasi dan Komunikasi	0,51	0,80	0,63	0,68	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,18	0,10	0,02	0,16	0,20
L	Real Estate	0,23	0,24	0,19	0,23	0,25
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,46	0,47	0,41	0,38	0,30
P	Jasa Pendidikan	0,49	0,21	0,40	0,38	0,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,10	0,13	0,12	0,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,27	0,24	0,25	0,26
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>4,82</b>	<b>4,88</b>	<b>5,01</b>	<b>5,16</b>	<b>5,33</b>

Lampiran Tabel 26.  
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.826.715,0	2.972.354,3	3.071.678,6	3.243.038,2	3.403.633,1
B	Pertambangan dan Penggalian	147.413,2	152.783,8	153.789,8	169.102,3	183.676,9
C	Industri Pengolahan	4.543.920,0	4.967.607,9	5.324.535,7	5.776.250,6	6.244.767,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32.016,3	38.678,7	47.254,0	50.235,1	54.689,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	17.198,3	17.998,6	19.099,0	20.230,2	21.902,0
F	Konstruksi	3.671.128,5	3.961.585,0	4.379.154,3	5.159.977,8	5.978.725,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	2.574.664,1	2.894.590,8	3.160.936,4	3.433.651,5	3.704.461,3
H	Transportasi dan Pergudangan	2.377.612,6	2.688.158,8	2.972.225,7	3.367.000,7	3.357.228,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.450.076,4	3.775.147,6	4.122.801,9	4.450.570,3	4.929.770,1
J	Informasi dan Komunikasi	2.726.066,7	2.963.963,3	3.247.928,5	3.481.173,0	3.747.296,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.114.723,3	1.198.586,9	1.280.647,4	1.422.568,0	1.575.357,3
L	Real Estate	2.626.348,2	2.936.364,4	3.149.558,2	3.382.571,7	3.709.643,8
M,N	Jasa Perusahaan	578.396,9	616.791,5	668.865,1	724.570,9	797.241,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2.251.056,6	2.524.427,4	2.786.354,1	2.986.918,7	3.174.205,7
P	Jasa Pendidikan	3.346.591,6	3.516.897,4	3.791.740,9	4.119.553,9	4.511.265,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	791.283,7	868.689,9	947.867,0	1.016.163,6	1.118.209,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	751.294,1	838.216,8	923.426,9	989.677,4	1.068.710,8
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>33.826.505,4</b>	<b>36.932.843,2</b>	<b>40.047.863,6</b>	<b>43.793.253,6</b>	<b>47.580.784,0</b>

Lampiran Tabel 27.  
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.003.474,9	2.016.941,4	2.040.451,7	2.071.604,2	2.105.980,9
B	Pertambangan dan Penggalian	115.517,4	115.645,9	115.878,5	126.231,2	133.527,6
C	Industri Pengolahan	3.582.533,8	3.765.148,7	3.980.364,1	4.203.118,3	4.455.255,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34.426,8	39.848,2	41.413,6	42.353,1	44.822,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13.445,4	13.693,3	14.140,3	14.887,2	16.075,0
F	Konstruksi	3.107.439,5	3.252.179,9	3.481.506,1	3.936.807,4	4.430.767,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	2.132.734,9	2.276.434,0	2.396.461,4	2.517.080,0	2.649.325,5
H	Transportasi dan Pergudangan	1.775.484,4	1.906.956,6	2.009.538,3	2.171.673,7	2.136.569,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.738.288,4	2.890.850,2	3.067.088,3	3.275.256,3	3.573.630,6
J	Informasi dan Komunikasi	2.908.483,0	3.152.445,2	3.353.383,7	3.560.299,5	3.841.352,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	845.349,5	886.738,5	911.738,4	977.150,9	1.061.895,9
L	Real Estate	2.333.477,3	2.458.358,7	2.581.857,8	2.713.511,7	2.873.693,7
M,N	Jasa Perusahaan	552.150,3	569.749,9	602.866,6	636.152,6	680.371,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.702.107,9	1.804.658,7	1.876.409,0	1.953.565,1	2.018.630,7
P	Jasa Pendidikan	2.893.218,8	2.990.810,7	3.161.823,1	3.351.494,9	3.579.032,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	690.675,4	720.867,6	764.436,2	810.809,0	866.476,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	669.199,2	702.047,4	741.233,6	777.210,0	822.401,9
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>28.098.006,9</b>	<b>29.563.375,2</b>	<b>31.140.590,6</b>	<b>33.139.204,9</b>	<b>35.289.808,4</b>

Lampiran Tabel 28.

Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	0,67	1,17	1,53	1,66
B	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,11	0,20	8,93	5,78
C	Industri Pengolahan	1,96	5,10	5,72	5,60	6,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,46	15,75	3,93	2,27	5,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,02	1,84	3,26	5,28	7,98
F	Konstruksi	4,44	4,66	7,05	13,08	12,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,43	6,74	5,27	5,03	5,25
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	7,40	5,38	8,07	-1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,07	5,57	6,10	6,79	9,11
J	Informasi dan Komunikasi	5,48	8,39	6,37	6,17	7,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,65	4,90	2,82	7,17	8,67
L	Real Estate	6,62	5,35	5,02	5,10	5,90
M,N	Jasa Perusahaan	7,13	3,19	5,81	5,52	6,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,20	6,02	3,98	4,11	3,33
P	Jasa Pendidikan	7,88	3,37	5,72	6,00	6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	4,37	6,04	6,07	6,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,19	4,91	5,58	4,85	5,81
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,18</b>	<b>5,22</b>	<b>5,34</b>	<b>6,42</b>	<b>6,49</b>

Lampiran Tabel 29.  
 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,36	8,05	7,67	7,41	7,15
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,41	0,38	0,39	0,39
C	Industri Pengolahan	13,43	13,45	13,30	13,19	13,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,12	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,85	10,73	10,93	11,78	12,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7,61	7,84	7,89	7,84	7,79
H	Transportasi dan Pergudangan	7,03	7,28	7,42	7,69	7,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,20	10,22	10,29	10,16	10,36
J	Informasi dan Komunikasi	8,06	8,03	8,11	7,95	7,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,30	3,25	3,20	3,25	3,31
L	Real Estate	7,76	7,95	7,86	7,72	7,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,71	1,67	1,67	1,65	1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,65	6,84	6,96	6,82	6,67
P	Jasa Pendidikan	9,89	9,52	9,47	9,41	9,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,35	2,37	2,32	2,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,22	2,27	2,31	2,26	2,25
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lampiran Tabel 30.  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Sleman Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,13	0,05	0,08	0,10	0,10
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02
C	Industri Pengolahan	0,26	0,65	0,73	0,72	0,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,49	0,52	0,78	1,46	1,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,48	0,51	0,41	0,39	0,40
H	Transportasi dan Pergudangan	0,25	0,47	0,35	0,52	-0,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	0,54	0,60	0,67	0,90
J	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,87	0,68	0,66	0,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,25	0,15	0,08	0,21	0,26
L	Real Estate	0,54	0,44	0,42	0,42	0,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,06	0,11	0,11	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,31	0,36	0,24	0,25	0,20
P	Jasa Pendidikan	0,79	0,35	0,58	0,61	0,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,11	0,15	0,15	0,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,19	0,12	0,13	0,12	0,14
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,18</b>	<b>5,22</b>	<b>5,34</b>	<b>6,42</b>	<b>6,49</b>

Lampiran Tabel 31.  
PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45.154,5	46.844,5	47.858,9	50.620,9	52.990,6
B	Pertambangan dan Penggalian	1.041,0	1.087,0	1.120,6	1.149,5	1.183,6
C	Industri Pengolahan	3.659.952,7	3.961.459,2	4.217.233,8	4.485.033,1	4.823.506,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48.055,6	57.414,6	70.344,7	75.277,3	81.767,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	42.035,3	43.862,7	45.993,1	48.378,1	51.777,6
F	Konstruksi	2.133.134,0	2.265.491,9	2.422.777,8	2.683.150,9	2.872.931,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.923.298,7	2.130.571,8	2.345.123,5	2.550.074,6	2.742.495,2
H	Transportasi dan Pergudangan	1.094.829,6	1.152.941,9	1.238.619,8	1.326.611,9	1.491.284,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.540.966,4	3.862.455,8	4.241.593,1	4.578.376,5	5.028.895,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.767.355,9	2.999.250,3	3.270.519,6	3.521.879,0	3.754.663,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.790.994,2	1.936.084,3	2.083.550,7	2.269.743,3	2.489.417,5
L	Real Estate	2.496.071,1	2.664.981,3	2.850.160,9	3.072.626,6	3.348.084,4
M,N	Jasa Perusahaan	296.115,3	311.413,0	338.219,8	365.438,3	396.038,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2.682.897,3	2.941.107,9	3.261.124,0	3.486.756,3	3.703.369,0
P	Jasa Pendidikan	2.535.454,3	2.660.407,1	2.850.179,4	3.101.517,7	3.376.943,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.016.645,1	1.085.552,8	1.181.954,2	1.283.065,1	1.388.276,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	717.935,4	774.487,0	842.671,4	919.144,1	995.433,1
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>26.791.936,3</b>	<b>28.895.413,1</b>	<b>31.309.045,2</b>	<b>33.818.853,1</b>	<b>36.599.057,0</b>

Lampiran Tabel 32.  
PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.052,7	36.377,3	36.766,9	37.296,9	37.844,1
B	Pertambangan dan Penggalian	851,2	856,1	876,7	886,6	895,5
C	Industri Pengolahan	2.996.573,4	3.127.536,8	3.276.812,3	3.394.676,6	3.581.412,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51.794,6	58.253,3	60.420,3	62.198,7	65.684,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	32.797,8	33.527,3	34.601,9	36.204,7	38.718,4
F	Konstruksi	1.722.508,1	1.783.818,9	1.877.754,4	1.981.260,9	2.064.286,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.569.644,8	1.659.173,7	1.754.131,8	1.845.196,0	1.938.551,1
H	Transportasi dan Pergudangan	870.912,2	895.301,9	938.000,0	987.436,2	1.050.362,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.589.749,8	2.739.335,5	2.926.573,7	3.127.938,8	3.394.660,5
J	Informasi dan Komunikasi	3.035.921,6	3.281.050,1	3.474.909,1	3.704.297,6	3.959.894,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.374.111,3	1.443.196,6	1.488.716,7	1.564.443,2	1.683.378,7
L	Real Estate	2.074.601,9	2.167.878,8	2.264.807,4	2.388.465,9	2.512.666,1
M,N	Jasa Perusahaan	278.211,9	285.922,7	304.281,7	320.469,5	338.813,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2.021.480,1	2.140.289,8	2.238.654,4	2.328.916,2	2.404.059,6
P	Jasa Pendidikan	2.235.519,7	2.307.655,3	2.424.677,3	2.574.870,8	2.734.512,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	879.118,7	920.126,8	973.057,3	1.035.916,8	1.096.179,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	623.162,3	655.987,2	693.384,2	738.176,8	783.205,6
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>22.393.012,2</b>	<b>23.536.288,1</b>	<b>24.768.426,1</b>	<b>26.128.652,1</b>	<b>27.685.125,6</b>

Lampiran Tabel 33.  
Laju Pertumbuhan Pdrb Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,89	0,90	1,07	1,44	1,47
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,58	2,41	1,13	1,00
C	Industri Pengolahan	1,79	4,37	4,77	3,60	5,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	12,47	3,72	2,94	5,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,61	2,22	3,21	4,63	6,94
F	Konstruksi	2,89	3,56	5,27	5,51	4,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,99	5,70	5,72	5,19	5,06
H	Transportasi dan Pergudangan	3,92	2,80	4,77	5,27	6,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	5,78	6,84	6,88	8,53
J	Informasi dan Komunikasi	4,72	8,07	5,91	6,60	6,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,88	5,03	3,15	5,09	7,60
L	Real Estate	5,20	4,50	4,47	5,46	5,20
M,N	Jasa Perusahaan	7,20	2,77	6,42	5,32	5,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,60	5,88	4,60	4,03	3,23
P	Jasa Pendidikan	7,03	3,23	5,07	6,19	6,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	4,66	5,75	6,46	5,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,13	5,27	5,70	6,46	6,10
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,09</b>	<b>5,11</b>	<b>5,24</b>	<b>5,49</b>	<b>5,96</b>

Lampiran Tabel 34.  
 Distribusi Persentase PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	13,66	13,71	13,47	13,26	13,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,22	0,22	0,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi	7,96	7,84	7,74	7,93	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7,18	7,37	7,49	7,54	7,49
H	Transportasi dan Pergudangan	4,09	3,99	3,96	3,92	4,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,22	13,37	13,55	13,54	13,74
J	Informasi dan Komunikasi	10,33	10,38	10,45	10,41	10,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,68	6,70	6,65	6,71	6,80
L	Real Estate	9,32	9,22	9,10	9,09	9,15
M,N	Jasa Perusahaan	1,11	1,08	1,08	1,08	1,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	10,01	10,18	10,42	10,31	10,12
P	Jasa Pendidikan	9,46	9,21	9,10	9,17	9,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,79	3,76	3,78	3,79	3,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,68	2,68	2,69	2,72	2,72
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lampiran Tabel 35.  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Yogyakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2019**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	0,25	0,58	0,63	0,48	0,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
F	Konstruksi	0,23	0,27	0,40	0,42	0,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,42	0,40	0,40	0,37	0,36
H	Transportasi dan Pergudangan	0,15	0,11	0,18	0,20	0,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,67	0,80	0,81	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	1,09	0,82	0,93	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,31	0,19	0,31	0,46
L	Real Estate	0,48	0,42	0,41	0,50	0,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,03	0,08	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,50	0,53	0,42	0,36	0,29
P	Jasa Pendidikan	0,69	0,32	0,50	0,61	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	0,18	0,22	0,25	0,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,19	0,15	0,16	0,18	0,17
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,09</b>	<b>5,11</b>	<b>5,24</b>	<b>5,49</b>	<b>5,96</b>



